

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BUTON**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

LAODE ABDUL HAMBALI

NIM : 014936097

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2010

ABSTRACT

District Territorial Separation Policy in Increasing The Community Welfare in Buton Regency

LAODE ABDUL HAMBALI

Univesitas Terbuka

hambali_laode@yahoo.co.id

Key words : Policy, District Separation, Community Welfare

This writing was inspired by the curiosity of the writer to look into the territorial separation policy, mainly a district separation or enlargement which in present time find attention from many parties uprising a various of judgement and opinion that sometimes taken granted on the meaning and advantage from separation.

The objective of this research is to describe and for analyze the things relating to the district territorial separation policy, the relation between district separation and community welfare increment as well as factors being a restrictive and supporting on the realization of welfare increment following the district separation in Buton Regency. To asses the community welfare rate, used some welfare indicators, those were community income rate, infra and supra structures, education, health and housing.

The research carried out in 8 (eight) districts of 13 (thirteen) separated districts situated in Buton Regency used qualitative descriptive method. Determination on 8 (eight) districts as targeted research determined by cluster sampling. Data collecting was done by depth interview as well as field observation and documentation study. As for the amount of informants being interviewed is as many more or less 160 persons confirmed by using purposive sampling.

Based on the analysis showed that the district separation policy in Buton Regency has been implemented well based on the mechanism and procedure as mandated either in the regulation number 22 of 1999 or regulation number 32 of 2004 on Region Government and Home Affairs Ordinance number 4 of 2000 about District Formation Direction.

Several welfare indicators (income, education, health, basal infra and supra structure and housing) are used in analyzing the relation of district separation with welfare increment. The result of analysis showed a positive relation between the district separation and welfare increment, a positive corelation was occurred inasmuch as being formed a new district, forces on duty by government to have an intervention on the infra and suprastructure which in turn to increase the income as well as the community empowerness which becomes a potency and all at once to be a booster in their welfare increment.

The suporting factors of the community welfare increasing are active partisipation of the community in ancillary a territorial separation as well as behaviour and governmental will in executing the development intervention, whereas the inhibiting factors that is there are still being a policy which less take a part in the commoness, such as finding the civil servant mutation from district in territorial separation and some customary or cultural values which less take a part in the agent of change despite in the time of observation those cases is scrutiny

ABSTRAK**Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton****LAODE ABDUL HAMBALI****Univesitas Terbuka****hambali_laode@yahoo.co.id****Kata Kunci : Kebijakan, Pemekaran Kecamatan , Kesejahteraan Masyarakat**

Tulisan ini terinspirasi dari keingintahuan penulis akan kebijakan pemekaran wilayah, khususnya pemekaran kecamatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari banyak pihak yang memunculkan berbagai penilaian dan pendapat yang kadang meniscayakan makna dan manfaat dari sebuah pemekaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, hubungan antara pemekaran kecamatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan setelah pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan beberapa indikator kesejahteraan yakni, tingkat pendapatan masyarakat, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan perumahan.

Penelitian dilaksanakan pada 8 kecamatan dari 13 kecamatan pemekaran yang ada di Kabupaten Buton dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penetapan 8 kecamatan sasaran penelitian ditentukan secara *cluster sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi lapangan dan studi dokumentasi Adapun jumlah informan yang diwawancarai sebanyak \pm 160 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah terselenggara dengan baik berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Beberapa indikator kesejahteraan (pendapatan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, serta perumahan) digunakan dalam menganalisis hubungan pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan, karena dengan terbentuknya kecamatan baru, mengharuskan pemerintah melakukan intervensi pembangunan sarana dan prasarana dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan serta keberdayaan masyarakat yang merupakan potensi sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraannya.

Faktor pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemekaran serta sikap dan kemauan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan, sedangkan faktor penghambatnya yakni masih adanya kebijaksanaan yang kurang berpihak pada "pemerataan" seperti adanya mutasi pegawai dari kecamatan pemekaran serta adanya kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang kurang berpihak pada perubahan meskipun pada saat penelitian hal-hal tersebut relatif kecil

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

P E R N Y A T A A N

TAPM yang berjudul : Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber, baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Kendari,

2009

Yang Menyatakan,

LAODE ABDUL HAMBALI

NIM. 014 936 097

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN TAPM

Judul TAPM : **Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton**

Penyusun TAPM :
Nama : **LAODE ABDUL HAMBALI**
NIM : **014938495**
Program Studi : **Magister Administarsi Publik**
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Ir. MARSUKI ISWANDI, M.Si.
NIP 19651128 199103 1 005

Prof. Dr. ASMIDDIN , M.Si.
NIP. 19560615 198603 1 005

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program
Magister Administrasi Publik.

Direktur Program Pascasarjana,

Dra. Susanti, M.Si.
NIP 19671214 199303 2 002

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.
NIP. 19541007 197302 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : LAODE ABDUL HAMBALI
NIM : 014938495
Program Studi : Magister Administarsi Publik
Judul TAPM ; Pemekaran Wilayah Kecamatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Nopember 2009

Waktu : 10.00 - selesai

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM,

Ketua Komisi Penguji : Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (.....)

Penguji Ahli : Dr. Wifridus B. Elu, M.Si (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. ASMIDIN, M.Si. (.....)

Pembimbing II : Dr. Ir. Marsuki Iswandi, M.Si (.....)

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas mengawali prakata ini selain sujud dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dialah Allah, yang telah memberikan kekuatan dan bimbingan kepada penulis, sehingga meskipun dengan kegundahan hati dan kelelahan fisik akhirnya selesai juga TAPM ini yang akan dipersembahkan kepada mereka yang sedikit menghargai buah karya ini. TAPM ini terinspirasi dari keingintahuan penulis akan fenomena kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, khususnya pemekaran kecamatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan, sehingga memunculkan berbagai macam penilaian dan pendapat yang kadang meniscayakan makna dan manfaat dari sebuah pemekaran.

Disadari sepenuhnya dalam proses penyusunan TAPM ini, penulis mengalami berbagai kendala yang mungkin saja dapat menggagalkan penyelesaiannya, namun karena bantuan dan dorongan berbagai pihak akhirnya selesai juga karya tulis ini. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bupati Buton yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton dan jajaran Pemerintah Kabupaten Buton serta komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan, baik yang bersifat materil maupun hal-hal yang bersifat informatif dan administratif.

3. Seluruh pengelola Universitas Terbuka UPBJJ Kendari dan para dosen yang telah membantu, mendidik serta memberikan suasana yang kondusif selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Prof. Dr. Asmiddin, M.Si. dan Dr. Ir. Marsuki Iswandi, M.Si yang telah membimbing dan memberi motivasi, mulai dari tahap penelitian hingga penyusunan tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, serta teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, khususnya teman-teman dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu masukan berupa kritikan dan saran dari pemerhati pemekaran wilayah sangat penulis harapkan untuk perbaikan tesis ini. Akhirnya kepada keluarga dan kerabat, khususnya isteri tercinta Hj. Iriani Kadir, S.Sos serta kedua ananda tersayang, penulis persembahkan hasil jerih payah dan buah do'a yang *di Ijaba*, semoga mampu menepis derita pengorbanan selama ini.-

W a s s a l a m,

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
A B S T R A K	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	(1
A. Latar.Belakang	1
B. Perumusan.Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Kebijakan	10
2. Pemekaran Wilayah	16
3. Indikator Kesejahteraan	19
B. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain Penelitian	29
B. Populasi dan Sampel	29
C. Instrumen Penelitian	31
D. Prosedur Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	32
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Buton	34
1. Letak Geografi dan Keadaan Wilayah	34
2. Kependudukan dan Tenaga Kerja	37

3. Perekonomian	43
4. Pendidikan	45
5. Kesehatan	47
B. KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN	49
1. Penyusunan Kebijakan Pemekaran	49
2. Implementasi Pemekaran Kecamatan	58
3. Evaluasi Kebijakan Pemekaran	95
C. HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH/KECAMATAN DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	101
1. Pendapatan Masyarakat	103
2. Sarana dan Prasarana Dasar	109
3. Pendidikan	113
4. Kesehatan	117
5. Perumahan	119
D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYAAKAT	122
1. Faktor-faktor Pendukung	123
2. Faktor-faktor Penghambat	125
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	127
DAFTAR KEPUSTAKAAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Tahun 2005-2006	38
Tabel 4. 2.	Kepadatan Penduduk Kecamatan Tahun 2005 – 2006	39
Tabel 4. 3.	Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin	40
Tabel 4. 4.	Usia Kerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin	41
Tabel 4. 5.	Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006	42
Tabel 4. 6.	Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Buton Tahun 2003 – 2007	44
Tabel 4. 7.	PDRB Kabupaten Buton Tahun 2003 – 2007	45
Tabel 4. 8.	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Tahun 2004 – 2007	46
Tabel 4. 9.	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Tahun 2004 – 2007	47
Tabel 4.10.	Banyaknya Tenaga Kesehatan Tahun 2004 – 2007	48
Tabel 4.11.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Lasalimu Selatan	64
Tabel 4.12	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun 2003 – 2007	65
Tabel 4.13	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun 2003 – 2007	66
Tabel 4.14	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Talaga Raya	70
Tabel 4.15.	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Talaga Raya Tahun 2003 – 2007	71
Tabel 4.16.	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Talaga Raya Tahun 2003 – 2007	71
Tabel 4.17.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Siompu	76
Tabel 4.18	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Siompu Tahun 2003 – 2007	76
Tabel 4.19	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Siompu Tahun 2003 – 2007	77

Tabel 4.20.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Batuatas	79
Tabel 4.21	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Batuatas Tahun 2003 – 2007	80
Tabel 4.22	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Batuatas Tahun 2003 – 2007	81
Tabel 4.23.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Wolowa	83
Tabel 4.24	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Wolowa Tahun 2003 – 2007	84
Tabel 4.25.	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Wolowa Tahun 2003 – 2007	84
Tabel 4.26	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kecamatan Wabula	86
Tabel 4.27.	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Wabula Tahun 2003 – 2007	87
Tabel 4.28.	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Wabula Tahun 2003 – 2007	87
Tabel 4.29.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Mawasangka Timur	90
Tabel 4.30.	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Mawasangka Timur Tahun 2003 – 2007	91
Tabel 4.31.	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Mawasangka Timur Tahun 2003 – 2007	91
Tabel 4.32.	Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid TK, SD SLTP dan SMU Thn 2003-2007 Kec. Sangia Wambulu	93
Tabel 4.33.	Keadaan Sarana Kesehatan Kecamatan Sangia Wambulu Tahun 2003 – 2007	94
Tabel 4.34.	Keadaan Tenaga Kesehatan Kecamatan Sangia Wambulu Tahun 2003 – 2007	95
Tabel 4.35.	Anggaran Rutin Kecamatan Tahun 2004 s.d. Tahun 2007	99

Tabel 4.36.	Pendapatan Rata-Rata Masyarakat pada Kecamatan Pemekaran Sebelum dan Sesudah Pemekaran	106
Tabel 4.37	Prosentase Kenaikan Pendapatan Setelah Pemekaran	108
Tabel 4.38	Pengaruh Sarana-prasana Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	111
Tabel 4.39.	Keadaan Sarana-Prasarana Dasar Kecamatan Pemekaran Tahun 2008	112
Tabel 4.40.	Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesejahteraan	116
Tabel 4.41.	Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Pendidikan	117

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Alur Kerangka Berpikir	28
Gambar	3.1	Proses Analisis Data	33

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3. Target dan Realisasi PBB pada Kecamatan Pemekaran Tahun 2004 s.d Tahun 2008
- Lampiran 4. Perbandingan Pendapatan Masyarakat serta Target dan Realisasi PBB pada Kecamatan Pemekaran sebelum dan sesudah Pemekaran
- Lampiran 5. Data Perkembangan Sarana Pendidikan dan Tenaga Pendidik Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Buton Tahun 2003 dan Tahun 2007
- Lampiran 6. Analisa Prosentase Kunjungan Warga ke Puskesmas Serta Kasus Penyakit Menular Tahun 2005 sd. 2007
- Lampiran 7. Data Perkembangan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Buton Tahun 2003 dan Tahun 2007
- Lampiran 8. Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Pemekaran Tahun 2004 s.d Tahun 2007
- Lampiran 9. Keadaan Kecamatan di Kabupaten Buton Tahun 200 - 2005
- Lampiran 10. Peta Kabupaten Buton
- Lampiran 11. Daftar Informan

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah, khususnya pemekaran kecamatan merupakan fenomena baru dalam tatanan pemerintah daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan pemekaran kecamatan yang semula merupakan kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sekarang ini menjadi kewenangan pemerintah daerah yakni pembentukannya ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana yang diatur pada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Berbagai argumen dan alasan dikemukakan, baik yang bersifat normatif maupun pragmatis untuk mendukung gagasan dan keinginan pemekaran wilayah agar dapat diakomodir untuk menjadi sebuah kebijakan publik. Alasan yang cukup populer dikemukakan selain dalam rangka peningkatan pelayanan publik juga untuk peningkatan pengelolaan sumber daya daerah, pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang kesemuanya bermuara pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah/wilayah pemekaran.

Dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 antara lain telah melahirkan daerah-daerah baru sebagai akibat dari adanya kebijakan pemekaran wilayah, namun kebijakan yang terkesan mempermudah pemekaran ini telah memunculkan pandangan pro-kontra yang menilai bahwa pemekaran wilayah sesungguhnya adalah sebuah kebijakan yang kurang ideal, sebagaimana dikemukakan oleh Sidik dan Wardhani (<http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/18/18422610>, tanggal 11 Februari 2008) bahwa:

Proses pemekaran daerah selama ini tidak memiliki rancangan besar sebagai pijakan ideal. Akibatnya, alih-alih mendekatkan pelayanan publik pada rakyat, pemekaran lebih banyak menjadi arena perebutan kekuasaan elite lokal. Kecurigaan itu setidaknya disuarakan mayoritas responden yang terjaring dalam jajak pendapat yang diselenggarakan 5-6 Februari 2008 terhadap 1.034 pengguna telepon. Sebanyak 60,5% responden menilai pemekaran daerah selama ini lebih banyak dijadikan komoditas politik yang menguntungkan kelompok politik tertentu.

Publik pun menilai proses pemekaran daerah sarat dengan tarikan kepentingan yang lebih bersifat elitis. Sekitar enam dari sepuluh responden berpendapat pemekaran, sebetulnya, lebih merepresentasikan keinginan elite politik ketimbang aspirasi masyarakat. Hanya sebagian kecil responden (33,4 %) yang beranggapan pemekaran daerah itu akan menguntungkan masyarakat.

Pendapat senada yang memandang pemekaran selama ini belum memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga disampaikan oleh Syarif Hidayat, salah seorang peneliti ekonomi politik dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan bahwa : "daerah pemekaran di Indonesia sebagian besar dibentuk berdasarkan kriteria yang tidak realistis. Lobi dan jaringan politik yang kuat membuat daerah yang sebenarnya tidak layak dimekarkan akhirnya bisa menjadi

daerah otonom baru. Daerah dimekarkan berdasarkan kriteria pernyataan, bukan kriteria kenyataan.”(Kompas, 10 Maret 2007).

Menteri Dalam Negeri (dalam Suara Karya: 19 September 2007)

memberikan pendapat tentang pemekaran wilayah, menjelaskan bahwa:

”Pemekaran daerah belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ... Mengenai evaluasi terhadap daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah, Mendagri Mardiyanto menjelaskan, evaluasi daerah otonom baru telah dilakukan terhadap daerah otonom yang dibentuk sejak 1999 hingga 2004 yang berjumlah 148 daerah otonom baru. Dari 148 daerah otonom baru, dia menjelaskan, hingga saat ini telah selesai dievaluasi sebanyak 48 daerah, sedangkan 100 daerah lainnya masih dalam proses observasi lapangan dan analisis. Dari 48 daerah otonom baru yang telah selesai dievaluasi, secara umum diperoleh gambaran bahwa pemekaran daerah belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Pernyataan Sidik dan Wardhani berdasarkan hasil cacah pendapat yang dilakukan terhadap 1.034 pengguna telepon, yang 60,5% di antaranya menilai pemekaran daerah selama ini lebih banyak dijadikan komoditas politik yang menguntungkan kelompok politik tertentu, namun yang menjadi keraguan dari kebenaran kesimpulan ini adalah keberadaan responden yang jumlahnya terlalu minim dibanding dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu pengguna telepon. Selain itu, daerah asal serta latar belakang para responden tersebut tidak diketahui keberadaannya. Adapun pendapat Bapak Mardianto didasarkan atas evaluasi yang dilaksanakan oleh DEPDAGRI terhadap 48 daerah pemekaran dari 148 daerah yang telah mekar hingga tahun 2004, tetapi dari 48 daerah yang dievaluasi oleh DEPDAGRI, bukan termasuk Kabupaten Buton.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Laode Ida, menjelaskan tentang pemekaran daerah (dalam BAPPENAS, 2007 : 1), sebagai berikut:

“Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ... akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan, ... memperbaiki pemerataan pembangunan, dan memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil.”

Menurut penulis, hubungan pemekaran wilayah dan peningkatan kesejahteraan adalah persoalan yang kurang atau belum maksimal diteliti, oleh karena itu, beberapa pendapat tersebut merupakan tantangan sekaligus pendorong dalam melakukan kajian terhadap kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Buton. Sebagai sebuah kebijakan publik, konsep pemekaran wilayah baru dapat dikatakan bermanfaat dan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat apabila kebijakan tadi dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan sukses. Dalam menjalankan kebijakan, asumsi bahwa suatu kebijakan dinilai baik apabila dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan tersebut mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Memahami masalah pemekaran wilayah sebagai salah satu bentuk “kebijakan publik” berarti berusaha untuk memahami proses pembentukan kebijakan yang dimulai dari pengungkapan atau penentuan “siapa-siapa yang menjadi aktor dalam pembentukan kebijakan tersebut” (Charles Lindblom dalam Winarno, 2008 : 92), sampai dengan “proses perumusan kebijakan melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu tahap formulasi kebijakan dan analisis kebijakan yakni untuk mengidentifikasi kemungkinan penetapan kebijakan yang dapat memecahkan masalah, yang dilanjutkan dengan implementasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan” (Keban, 2008 : 67-79).

Pada prinsipnya pemerintah pusat bersifat bijaksana dan fleksibel terhadap daerah yang menuntut pemekaran kecamatan sepanjang pemekaran tersebut dilakukan menurut prosedur dan persyaratan yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, namun karena pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Buton yang menjadi obyek penelitian dan penulisan ini terbentuk tahun 2001 hingga pertengahan tahun 2004, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton dalam melakukan pemekaran kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Berdasarkan harapan masyarakat dan fenomena elit politik yang bersinergi dengan ruang yang diberikan oleh aturan perundang-undangan menjadikan sebuah kekuatan yang mendorong daerah berlomba untuk memekarkan diri, sehingga dengan kenyataan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton telah mengeluarkan kebijakan pemekaran wilayah dalam bentuk peraturan daerah tentang pembentukan beberapa kecamatan (Kumpulan Lembaran Daerah Kabupaten Buton : 2007) sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lasalimu Selatan, tanggal 4 Oktober 2001; 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Mawasangka Timur, tanggal 24 Juli 2002; 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Siompu, tanggal 24 Juli 2002; 4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kadatua, tanggal 24 Juli 2002; 5) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Talaga Raya, tanggal 24 Juli 2002;

6) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Batuatas, tanggal 24 Juli 2002; 7) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Siontapina, tanggal 2 September 2004; 8) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Wabula, tanggal 2 September 2004; 9) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Wolowa, tanggal 2 September 2004; 10) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lapandewa, tanggal 2 September 2004; 11) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Siompu Barat, tanggal 2 September 2004; 12) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Mawasangka Tengah, tanggal 2 September 2004, dan 13) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sangia Wambulu, tanggal 2 September 2004.

Menyimak data di atas, maka terdapat beberapa kecamatan yang telah dibentuk 6 sampai 7 tahun lalu yaitu Kecamatan Lasalimu Selatan, Mawasangka Timur, Siompu, Kadatua, Talaga Raya dan Kecamatan Batuatas dan selebihnya dibentuk pada 4 tahun yang lalu, yaitu Kecamatan Siontapina, Wabula, Wolowa, Lapandewa, Siompu Barat, Mawasangka Tengah, dan Kecamatan Sangia Wambulu. Dengan demikian, apabila implementasi kebijakan pemekaran daerah berjalan efektif maka sudah terbentuk wilayah-wilayah pertumbuhan baru dan peningkatan pembangunan pada daerah pemekaran yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan data tersebut dalam latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Buton?
2. Bagaimana hubungan implementasi kebijakan pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton?

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis hal-hal, sebagai berikut:

1. Proses dan kinerja kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Buton.
2. Hubungan antara kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Buton.

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan konsep kebijakan pemekaran wilayah.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan penyusunan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Buton dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemekaran wilayah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pemekaran atau pembentukan kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah merupakan sebuah kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan tersebut dilakukan oleh organisasi publik yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah.

Menganalisis kebijakan pemekaran/pembentukan kecamatan menurut konsep analisis kebijakan publik, dikaji dari berbagai informasi yang relevan serta klaim pengetahuan sebagai kesimpulan yang mencerminkan alasan mengapa suatu kebijakan dikeluarkan. Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multiple metode untuk meneliti dan beragumen, untuk memproduk dan mentrasformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat digunakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan (Dunn dalam Nugroho, 2007 : 36). Pendapat yang berbeda mengenai analisis kebijakan dikemukakan oleh Weimer dan Vining (1999 : 486) yang menjelaskan analisis kebijakan sebagai berikut: *policy analysis is client oriented advice relevant to public decissions and informed by social values* (analisis kebijakan adalah *advis* yang berorientasi pada klien yang berkaitan dengan keputusan publik dan memuat nilai-nilai sosial).

Adapun tinjauan pustaka dan kerangka berpikir berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta penulisan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan

Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai kebijakan, perlu dibedakan antara pengertian "kebijakan" dan "kebijaksanaan". Anderson (2003 : 2) memberikan pengertian kebijakan: "*Policy is defined as relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Kebijakan didefinisikan sebagai cara-cara tindakan yang agak mapan dan memiliki tujuan yang disertai oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku dalam membahas suatu masalah yang bersangkutan). Pelaku (*actors*) menurut Anderson adalah pejabat (*official*), perwakilan pemerintah (*a governmental agency*) atau pembuat undang-undang (*legislature*). Ealau dan Prewitt (Suharto, 2006 : 7 dan Jones, 1996 : 47), mendefinisikan kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku secara konsisten dan berulang.

Keban (2008 : 58-59) menjelaskan bahwa kebijaksanaan merupakan keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, yang mengandung makna melanggar sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu sedangkan kebijakan merupakan keputusan alternatif yang dipilih dari analisis mendalam terhadap berbagai alternatif terbaik.

a. Kebijakan Publik

Banyak pakar memberikan definisi terhadap kebijakan publik. Salah satunya yang disampaikan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008 : 60) yang menyatakan kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam

pemerintahan. Di sini terlihat adanya pemenuhan kebutuhan terhadap nilai pemerintahan yang baik agar dapat mendukung pemerintah dalam menghasilkan kebijakan publik sebagaimana yang diharapkan oleh Chandler dan Plano tersebut dan mensyaratkan perlunya keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Defenisi lebih sederhana adalah kebijakan publik menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008 : 61) yang melihat kebijakan sebagai “*what ever a government decides to do or not to do*“ (kebijakan publik adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan atau langkah tindakan di dalamnya terdapat proses yang memvisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu. Dunn (2003 : 22-25) membagi proses pembuatan kebijakan ke dalam 5 tahapan:

- (1) *Penyusunan agenda kebijakan.* Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dunn (2003 : 226) mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan 4 fase yang saling tergantung, yaitu pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*).
- (2) *Formulasi kebijakan.* Pada fase ini, para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik analisis dalam upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa sebuah pilihan kebijakan adalah lebih baik dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti analisis biaya dan manfaat,

serta pembahasan tentang alternatif-alternatif apa saja yang dapat dikembangkan dan berkaitan dengan masalah siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Untuk itu dibutuhkan *forecasting*, sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (*policy futures*) berikut konsekuensi masing-masing kebijakan tersebut.

- (3) *Adopsi kebijakan*. Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga setelah melalui proses rekomendasi.
- (4) *Implementasi kebijakan*. Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang atau peraturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Winarno, 2008 : 144-145).
- (5) *Penilaian kebijakan*. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan, apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi guna mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan efektifitas dampak kebijakan. Thomas Dye (dalam Parsons, 2008 : 547) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Nugraha (2007 : 8.6) adalah merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan organisasi publik menyusul satu keputusan guna mencapai sasaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan operasionalisasi dari berbagai aktivitas untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Selanjutnya, Higgins (dalam Nugraha, 2007 : 8.6) merumuskan bahwa “implementasi adalah rangkuman dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dengan menggunakan strategi dan sumber daya lain untuk mencapai sasaran.” Berkaitan dengan implementasi kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 1997 : 173).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa orientasi kebijakan sangat “*concern*” kepada masyarakat, yakni suatu upaya dalam memberdayakan dan memecahkan masalah publik serta menciptakan ruang publik agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan sejak proses formulasi kebijakan, implementasi kebijakan sampai penilaian kebijakan. Pada saat yang sama, dibutuhkan kebijakan publik yang mampu mengembangkan, memberi daya dan kemandirian bagi masyarakat yang masih kurang berdaya.

Saat ini pengetahuan mengenai praktek implementasi kebijakan telah menghasilkan berbagai model yang dikembangkan para ahli untuk meneliti atau menganalisis implementasi suatu kebijakan serta menjelaskan bagaimana sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

(1) *Model pelaksanaan perencanaan dari atas ke bawah (The Top-down approach)*. Model ini adalah yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997 : 174), dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna (*Perfect Implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya;
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

(2) *Model Proses Implementasi (A Model of The Policy Implementation Process)*. Model ini dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (Wahab, 1997 : 176) dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implemementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak, merupakan konsep-konsep

penting dalam prosedur implementasi. Selanjutnya kedua ahli di atas juga mengemukakan sejumlah variabel bebas yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja (*performance*), yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan pelaksanaan, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan, yaitu: kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana dan lingkungan di mana kebijakan itu dilaksanakan. Berdasarkan model-model implementasi kebijakan di atas, maka pengelompokan faktor kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Kebijakan*; (a) kebijakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung, (b) hubungan ketergantungan harus kecil, (c) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (d) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.
- 2) *Organisasi*; (a) tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, (b) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, (c) tiap-tiap yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
- 3) *Lingkungan*; kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana.

2. Pemekaran Wilayah Kecamatan

Kata *wilayah* seringkali memiliki pengertian yang sama dengan kata *daerah*, tergantung disiplin ilmu atau konteks yang membahasnya. UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian yang berbeda terhadap kata daerah dan kata wilayah. Kata wilayah (administratif) adalah wilayah kerja gubernur selaku wakil pemerintah, sedangkan daerah bermakna daerah otonomi yang berarti: "Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Wilayah kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah otonom. Dalam konteks pemekaran, "daerah" dan "wilayah" memiliki pengertian yang berdekatan karena sama-sama mempunyai kawasan geografis tertentu. Pemekaran daerah sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004, seperti dijelaskan dalam ketentuan umum PP Nomor 78 Tahun 2007 adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi dua daerah atau lebih. KEPMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan tidak jelas mengurai pengertian atau penjelasan mengenai pembentukan atau pemekaran kecamatan, sedangkan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yakni pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pandangan lain mengenai pemekaran wilayah ini dikemukakan oleh Chalid (2006 : 9.27-9.31), pengembangan wilayah pada masa desentralisasi cenderung diartikan sebagai pemekaran wilayah yang pada dasarnya memiliki muatan politis yang kental. Pemekaran wilayah lebih pada upaya mengakomodasi elit-elit di daerah agar desentralisasi tidak terjebak pada disintegrasi. Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan bukan merupakan satu-satunya masalah yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pengembangan wilayah, masalah lain yang terpenting adalah partisipasi masyarakat yang merupakan hal baru dan mewah setelah terjadinya perubahan sistem dari sentralistik ke desentralisasi. Pengembangan wilayah pada hakekatnya adalah pengembangan daerah yang bersifat menyeluruh yakni pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi yang lebih prinsip adalah mengupayakan secara maksimal potensi sumber daya manusia untuk mengelola secara bijak sumber daya obsolut yang dimiliki.

Sebagai sebuah kebijakan publik, konsep pemekaran kecamatan akan dapat memberikan kontribusi langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila kebijakan tadi dapat diadopsi dan diimplementasikan dengan sukses. Weimer (dalam Syarmadani, 2005 : 24) berpendapat: "*Public Policies cannot directly contribute to substantive values unless they are adopted and successfully implemented.*" Adopsi dan implementasi ini penting karena hanya dengan cara itulah sebuah kebijakan dapat mencapai

hasil, oleh karena itu sebuah konsep kebijakan tidak semestinya mengabaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan implementasi.

Penetapan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang pembentukan kecamatan sebagaimana disebutkan di atas tentu mempunyai alasan tersendiri. Secara formal pertimbangan dimekarkannya beberapa kecamatan dimaksudkan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Hal ini yang semestinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja adalah aturan tersebut. Bila mencermati pendapat Chalid sebelumnya, tentu terdapat harapan selain yang dinyatakan secara formal. Pemekaran wilayah diharapkan akan memunculkan sejumlah dampak yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi yang melatarbelakangi alasan pemekaran wilayah adalah tidak seimbang jumlah pemerintah kecamatan dengan luas wilayah dan beban tugas pelayanan yang harus diselenggarakan. Setidaknya terdapat dua sudut pandang terhadap kendala yang menjadi kelemahan pelayan publik di tingkat kecamatan. *Pertama*, dari sudut pandang pemerintah kecamatan, yaitu dirasakan masih terlalu besarnya rentang kendali ke pemerintah bawahan yang ditandai dengan jumlah desa dan kelurahan yang dikoordinasikan, sangat luasnya wilayah yang harus dilayani, serta beban tugas yang berat karena banyaknya publik yang harus dilayani. *Kedua* adalah masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani antara jarak pelayanan yang jauh, waktu pelayanan yang relatif lama serta biaya menuju tempat pelayanan yang relatif lebih besar.

3. Indikator Kesejahteraan

Banyak teori maupun indikator yang memperlihatkan tentang bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan, namun yang paling dominan membicarakan indikator kesejahteraan adalah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut Mahi (2006 : 7) menyatakan: "pengembangan perekonomian daerah yang tersusun dengan baik pada dasarnya akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Ada 3 pilar penentu makro ekonomi suatu negara yakni (1) *pertumbuhan ekonomi*, (2) *pengendalian harga-harga* dan (3) *perluasan kesempatan kerja*."

Selain persoalan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, persoalan sosial serta sarana dan prasarana juga merupakan indikator yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan dalam jangka pendek terhadap implementasi kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kuncoro yakni indikator kunci pembangunan pada dasarnya diklasifikasi menjadi (1) indikator ekonomi dan (2) indikator sosial. Indikator ekonomi adalah GNP (GNI) per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, sedang yang termasuk indikator sosial yakni HDI dan PQLI (Kuncoro, 2006 : 18). Oleh karena itu, dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan yang menjadi pembanding untuk mengetahui hubungan pemekaran kecamatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), *Physical Quality Life Index (PQLI)*, *Human Development Index (HDI)* dan Indikator BKKBN.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pencapaian kesejahteraan masyarakat pada bidang ekonomi sebagai tujuan pembangunan antara lain dapat dilihat dari pendapatan nasional per kapita, pengurangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk perhitungan pendapatan per kapita di suatu daerah sering direpresentasikan oleh *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita*. Pendapatan regional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan regional per kapita adalah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk.

Indikator keberhasilan pemekaran dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat secara sektoral. Dalam hal ini, sektor-sektor yang menjadi unggulan wilayah pemekaran dapat dijadikan indikator operasional dengan melihat kontribusi nilai tambah sektor tersebut terhadap pendapatan masyarakat yang secara langsung berumbas pada peningkatan pendapatan daerah. Sebagai contoh, pada kecamatan yang didominasi sektor pertanian seperti beberapa kecamatan yang berada di daratan Pulau Buton, maka kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB merupakan salah satu indikator keberhasilan pemekaran wilayah.

Arsyad (2005 : 6) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan

terjadinya pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun cara tersebut mempunyai kelemahan terhadap pengukuran perbaikan kesejahteraan karena pada saat penentuan/penghitungan PDB/PNB dalam jangka waktu tertentu, selain akan terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, juga terjadi penambahan penduduk. Jika tingkat pertumbuhan PDB/PNB sama atau lebih rendah dari pada tingkat pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau bahkan menurun. Ini berarti bahwa pertumbuhan PDB/PNB tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. *Physical Quality Life Index (PQLI)*

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Moris D. Moris memperkenalkan *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup) yang merupakan indeks gabungan dari 3 indikator yaitu: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf (Chalid, 2006 : 6.18). Indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh Moris tersebut lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pada bidang kesehatan dan pendidikan

c. *Human Development Index (HDI)*

United Nations Development Program (UNDP) dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dikaitkan dengan pembangunan sosial ekonomi yang mereka lakukan, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Seperti halnya PQLI, HDI melakukan analisis berdasarkan 3 tujuan

atau produk pembangunan (Chalid, 2006 : 6.19), yaitu: (1) usia panjang yang diukur dari tingkat harapan hidup, (2) pengetahuan yang diukur dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), serta (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan dengan daya beli mata uang masing-masing negara.

Kendati HDI memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pembangunan, Todaro (dalam Chalid, 2006:6.19) memberikan catatan berikut:

- a. Pembentukan HDI sebagian didorong oleh strategi politik yang didesain untuk memfokuskan perhatian pada aspek pembangunan kesehatan dan pendidikan;
- b. Ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang bagus namun bukan ideal (misalnya, Tim PBB ingin menggunakan status nutrisi bagi anak di bawah usia 5 tahun sebagai indikator kesehatan ideal, tetapi datanya tidak tersedia);
- c. Nilai HDI suatu negara mungkin membawa dampak yang kurang menguntungkan karena mengalihkan fokus dari masalah ketidakmerataan dalam negara tersebut;
- d. Alternatif pendekatannya memandang GNP perkapita, dan kemudian melengkapinya dengan indikator sosial lain masih dihargai;
- e. Kita harus selalu ingat bahwa indeks ini merupakan indikator pembangunan yang relatif, bukan absolut sehingga bila semua negara mengalami peningkatan pada tingkat tertimbang yang sama maka negara miskin tidak akan memperoleh penghargaan atas kemajuannya.

Selanjutnya, pada kesempatan lain, Todaro (dalam Arsyad, 2005 : 5) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya harga diri (*self esteem*), dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

d. Indikator BKKBN

BKKBN mengeluarkan indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dengan cara mengukur pemenuhan kebutuhan baik fisik, maupun sosiologis masyarakat. Indikator tersebut menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga di Indonesia. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan akan didapat kriteria keluarga.

Kriteria keluarga tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator berikut ini:

- Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti; kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- Keluarga Sejahtera I (KS-I), yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, dengan indikator keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut, makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memakai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah, jika ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- *Keluarga Sejahtera II (KS-II)*, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar minimal serta kebutuhan sosial psikologis, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, dengan indikator anggota keluarga mampu makan daging dan telur, luas lantai rumah untuk tiap penghuni tak kurang dari 8 meter, punya penghasilan tetap, berpendidikan dan ikut program KB.

- *Keluarga Sejahtera III (KS-III)*, yaitu keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis, serta kebutuhan pengembangan, dengan indikator; ada upaya peningkatan pengetahuan agama, memiliki tabungan, ikut kegiatan di lingkungan tempat tinggal, berekreasi minimal 6 bulan sekali, memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio atau televisi.
- *Keluarga Sejahtera III-Plus (KS III-Plus)*, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosiologis, kebutuhan pengembangan serta aktif dalam kegiatan sosial masyarakat.

B. Kerangka Berpikir

Kebijakan desentralisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang melahirkan kewenangan daerah melakukan pemekaran wilayah/kecamatan bertujuan agar semua potensi yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memberdayakan masyarakat, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan absolut dan kesejahteraan relatif dapat segera diwujudkan. Pemerintah daerah melalui berbagai instrumennya harus mampu menggiring semua sumber daya yang ada menuju pola produksi, alokasi dan distribusi yang lebih baik, sehingga pada gilirannya daerah lebih mandiri dalam kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi (UNPAD, laporan hasil penelitian, 2003 dalam LAN, 2004 : 5).

Beberapa indikator kesejahteraan yang dikemukakan sebelumnya merupakan tolok ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan desentralisasi yang sekaligus sebagai indikator tercapai atau tidaknya tujuan

pemekaran wilayah. Keberhasilan tujuan pemekaran pada bidang ekonomi antara lain dapat dilihat dari pendapatan per kapita masyarakat, yang berpengaruh langsung pada keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, pengurangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Makin tinggi serta makin merata kenaikan tingkat pendapatan masyarakat menunjukkan makin berhasil kebijakan pemekaran dan program pembangunan. Sebagai konsekuensi logis dari adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan berpengaruh pada pendapatan per kapita di suatu daerah yang sering direpresentasikan dalam bentuk *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita*.

Keberhasilan tujuan pemekaran pada bidang sosial dapat dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Indikator pada sektor pendidikan adalah adanya kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas, indikator ini secara operasional dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid yang secara teoritis berkorelasi positif dengan daya serap murid terhadap materi ajaran yang diberikan. Artinya, makin tinggi rasio guru terhadap murid, maka makin baik daya serap murid terhadap materi yang diajarkan sehingga makin tinggi kualitas pendidikan yang didapatkan. Sedangkan indikator kesehatan yang paling utama adalah pemerataan kesehatan bagi masyarakat yang dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap seluruh penduduk. Makin tinggi rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, maka makin besar peluang masyarakat secara umum untuk mendapatkan layanan kesehatan yang makin baik.

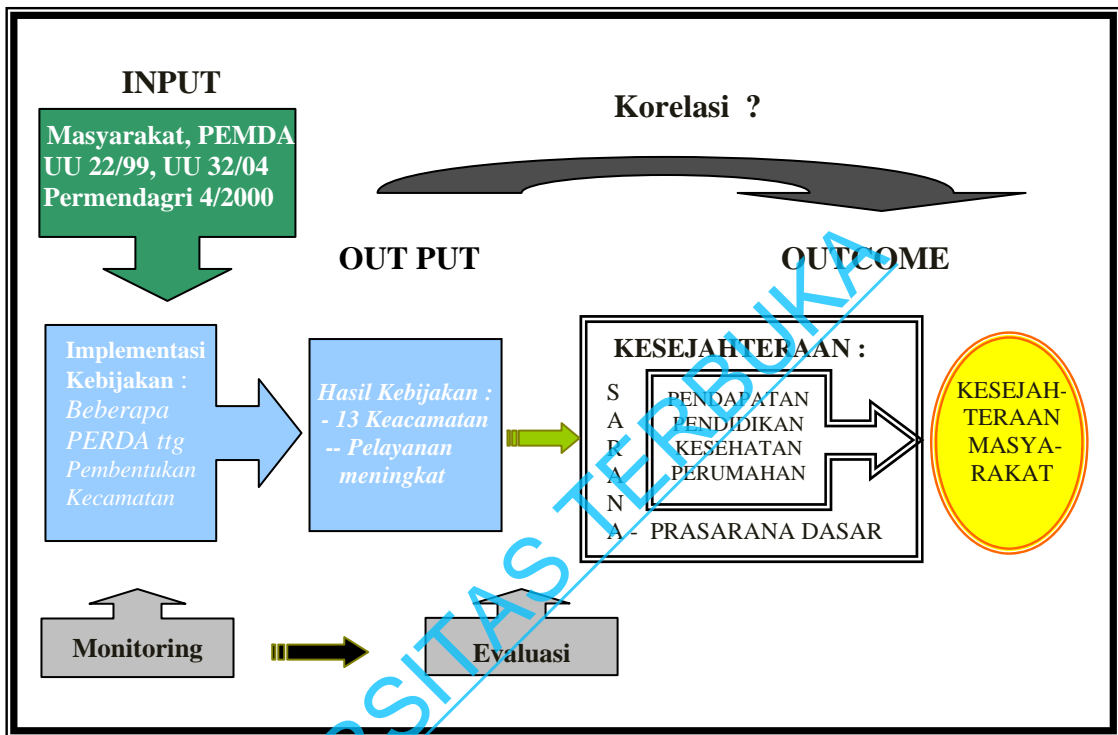
Selain sarana pendidikan dan kesehatan, yang turut dijadikan indikator dalam bidang sosial juga adalah perumahan, meskipun disadari bahwa persoalan ketersediaan perumahan bagi masyarakat adalah relatif, karena masih adanya pemahaman pada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa tinggal serumah dengan orang tua adalah gambaran keluarga yang rukun dan saling mengasihi, sehingga tidak jarang terjadi sebuah keluarga yang secara ekonomis sudah mapan tetapi belum memiliki rumah.

Pada bidang sarana dan prasarana dasar, keberhasilan pemekaran dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah sarana dan prasarana perhubungan, perdagangan, serta sarana dan prasarana penerangan dan air bersih. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang dan kualitas jalan yang didasari pemikiran bahwa makin panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi mobilisasi penduduk antar wilayah dan akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian. Pada sektor perdagangan, penambahan jumlah pasar dan peningkatan frekwensi hari pasar pada pasar-pasar tradisional merupakan salah satu indikator keberhasilan tersendiri pada kecamatan pemekaran. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik dan air bersih merupakan sektor yang penting dan memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu keberadaan listrik dan sumber air bersih dalam rumah tangga dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas diperoleh kerangka berpikir tentang kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Buton telah melahirkan 13 kecamatan baru, memiliki peluang intervensi yang cukup besar untuk mempengaruhi peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat serta pembentukan dan pengembangan titik pertumbuhan kawasan. Apabila kebijakan pemekaran kecamatan berjalan baik, maka diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah pemekaran.
2. Kinerja kebijakan pemekaran kecamatan dinyatakan baik apabila diimplementasikan sesuai dengan rencana serta mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Informasi tentang ketaatan pelaksanaan kebijakan diperoleh berdasarkan hasil pemantauan (monitoring) sedangkan informasi pencapaian tujuan kebijakan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi. Implementasi kebijakan pemekaran wilayah ditentukan oleh kebijakan itu sendiri yang didukung oleh organisasi pelaksana dan lingkungan dimana kebijakan dilaksanakan. Apabila faktor tadi baik, maka diasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan baik.
3. Perubahan derajat tingkat kehidupan masyarakat pada wilayah pemekaran baik secara kuantitatif maupun kualitatif dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, kesehatan masyarakat dan sarana kesehatan, pendidikan, serta kondisi perumahan.

Secara garis besar, kerangka berpikir berkaitan dengan implementasi kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton dapat dilihat pada gambar (2.1) berikut:



Gambar 2.1
Alur Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang orientasi kajiannya pada masalah kebijakan publik, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Rujukan dalam pemilihan metode ini adalah berdasarkan pandangan Irawan (2006 : 1.17) yang mengemukakan bahwa ilmu administrasi sebenarnya dapat diteliti baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, tetapi apabila telah mengkaji persoalan yang berkaitan dengan kebijakan publik maka para peneliti cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya Moleong (2000 : 27) berpendapat bahwa penelitian sosial yang digunakan di lapangan adalah metode kualitatif dengan alasan *pertama* adalah lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, *kedua* yakni metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden, dan *ketiga* lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (1997 : 57), populasi adalah wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu sebagai obyek dan subyek penelitian. Populasi bukan hanya sekedar orang yang berada pada wilayah penelitian tetapi juga termasuk benda-benda dan seluruh sifat dan karakter yang dimiliki oleh subyek maupun obyek yang berada

di lokasi penelitian. Irawan (2006 : 4.18) menjelaskan populasi adalah keseluruhan elemen yang diteliti/dipelajari oleh peneliti yang bisa berwujud air, udara, desa, sistem, dokumen dan manusia. Oleh karena itu, maka populasi penelitian ini adalah beberapa kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Buton yang mekar atau terbentuk setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dilihat dari waktu pembentukan, ada 1 kecamatan yang telah terbentuk tahun 2001, 5 kecamatan terbentuk tahun 2002, dan 7 kecamatan yang terbentuk tahun 2004. Dari 13 kecamatan baru tersebut, 5 kecamatan merupakan kepulauan, 3 kecamatan berada di Pulau Muna dan 5 kecamatan berada di daratan Pulau Buton. Berdasarkan keadaan kecamatan-kecamatan tersebut, maka untuk penentuan sampel digunakan teknik *cluster sampling* yakni 3 kecamatan yang berada di Pulau Buton (Kecamatan Lasalimu Selatan terbentuk tahun 2001, serta Kecamatan Wabula dan Kecamatan Wolowa terbentuk tahun 2004) dan 5 kecamatan berada di luar Pulau Buton yaitu Kecamatan Batuatas, Kecamatan Talaga Raya dan Kecamatan Siompu dibentuk tahun 2002 yang ketiga-tiganya adalah kepulauan, serta 2 kecamatan berada di Pulau Muna yaitu Kecamatan Mawasangka Timur terbentuk tahun 2002 dan Kecamatan Sangia Wambulu terbentuk tahun 2004. Selain di kecamatan, penelitian juga dilakukan di beberapa kantor yakni Kantor Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Kantor Statistik Kabupaten Buton.

Adapun informan yang akan dijadikan sumber data yakni aparat Pemerintahan Kabupaten Buton (Sekretaris Daerah, Asisten Tata Praja, Sekretariat Dewan, Kabag Tapem, Kabag Hukum dan Kepala/Staf SKPD terkait

serta anggota DPRD) yang terlibat dalam pemekaran serta para camat, lurah/kades, tokoh masyarakat, pemuda dan beberapa anggota masyarakat di tiap kecamatan sasaran sampel yang secara keseluruhan berjumlah 164 orang. Tidak semua informan dimintai keterangan atau menjelaskan permasalahan yang sama, tetapi dalam menentukan informan yang akan diwawancarai untuk menjelaskan suatu permasalahan digunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan pada kemampuan/keahlian pada bidang atau permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 1997 : 62).

C. Instrumen Penelitian

Agar mendapatkan informasi dan data yang akurat mengenai dampak pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton, khususnya pada wilayah pemekaran maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan instrumen penelitian antara lain metode survei dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, observasi non partisipasi (*non-participation observation*). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Irawan (2006 : 4.27) bahwa instrumen pengumpulan data pada penelitian kualitatif lebih bersifat longgar, fleksibel dan dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, dan instrumen atau teknik yang sering digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi dan observasi lapangan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

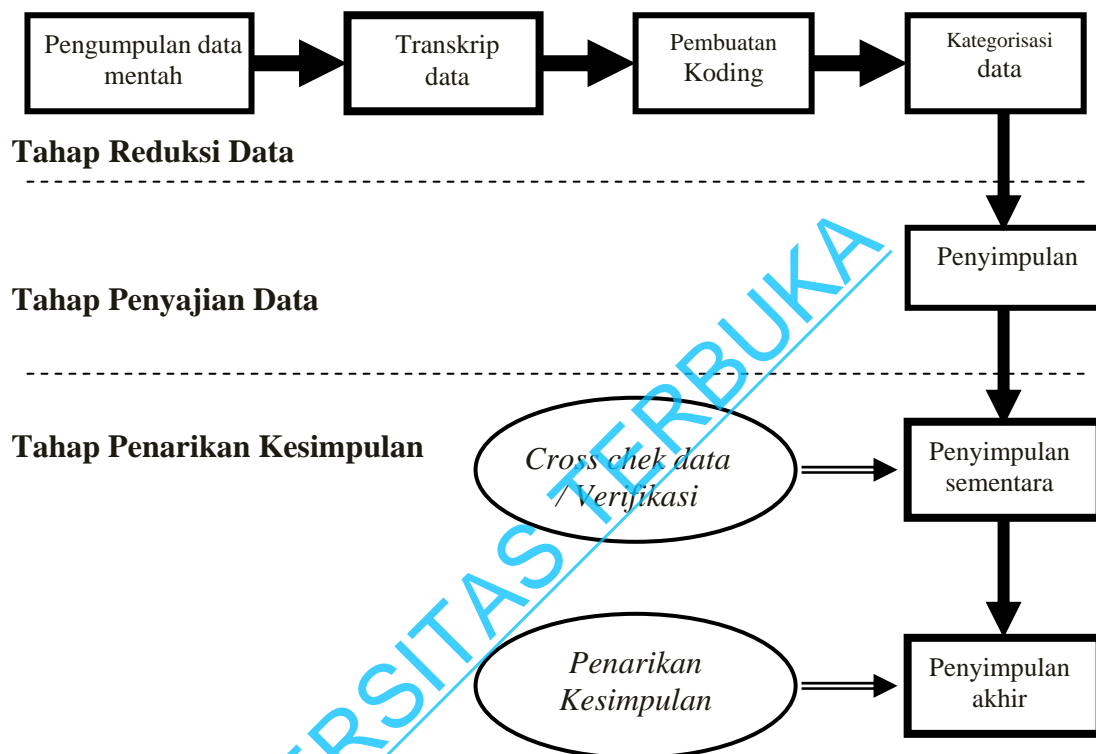
Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa untuk mendapatkan data yang akurat digunakan beberapa metode dan teknik

pengumpulan data, namun pada umumnya pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik yaitu pengambilan data yang bersumber dari dokumentasi melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi di lapangan (*field research*) yakni melakukan wawancara dengan beberapa informan terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang bersifat luwes dengan susunan pertanyaan dan kata-kata yang dapat berubah pada saat wawancara, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, usia, pendidikan, dan pekerjaan) responden yang dihadapi (Wahyudin dalam Mulyana, 2003 :181).

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif terdapat perbedaan yang tegas antara pengumpulan data dan analisis yakni data dianalisis setelah semua data didapatkan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan hampir bersamaan dengan saat pengumpulan data (Irawan, 2006 : 5.20). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992 : 73) bahwa analisis ini sudah berlangsung sejak tahap pengumpulan data. Oleh karena itu, maka langkah praktis melakukan analisis data dilakukan melalui proses sebagaimana dikemukakan Irawan (2006 : 5.23-5.29) berikut: data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan atau kajian kepustakaan/dokumentasi, kemudian diubah dalam bentuk tertulis/catatan (transkrip data), selanjutnya dari sekian data tertulis/tercatat ditentukan kata kuncinya yang kemudian diberi kode. Konsep kata-kata kunci yang ada disederhanakan menjadi kategori-kategori dan

menarik kesimpulan sementara, dan setelah data menjadi kesimpulan sementara di *cross check* untuk mencocokkan dengan sumber lain dan mengevaluasi kembali untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir. Alur analisis ditunjukkan gambar (3.1)



Gambar 3.1 Proses Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BUTON

1. Letak Geografis dan Keadaan Wilayah

Secara geografis Kabupaten Buton terletak antara $4^{\circ} 96' \text{ LS} - 6^{\circ} 25' \text{ LS}$ dan $120^{\circ} 00' \text{ BT} - 123^{\circ} 34' \text{ BT}$, serta memiliki wilayah daratan seluas $\pm 2.488,71 \text{ Km}^2$ atau 248.871 Ha yang berada di bagian tenggara Pulau Sulawesi, meliputi sebagian Pulau Muna dan sebagian Pulau Buton serta beberapa pulau lainnya. Dari sudut *Oceanografi* memiliki perairan laut yang cukup luas, yaitu diperkirakan sekitar $21.054,69 \text{ Km}^2$.

Adapun batas-batas Kabupaten Buton adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Muna;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Sebelum terbentuknya Kota Bau-Bau melalui UU Nomor 13 Tahun 2001 serta Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi melalui UU Nomor 29 Tahun 2003, ketiga wilayah daerah otonom ini merupakan bagian dari Kabupaten Buton dengan luas daratan $\pm 6.463 \text{ Km}^2$ yang terletak antara $4^{\circ} 30' \text{ LS} - 6^{\circ} 00' \text{ LS}$ dan $120^{\circ} 00' \text{ BT} - 125^{\circ} 00' \text{ BT}$. Adapun jumlah kecamatan ketika itu sebanyak 21, masing-masing: (1) Kecamatan Betoambari; (2) Kecamatan Wolio; (3) Kecamatan Sorawolio, (4) Kecamatan Bungi, (5) Kecamatan Kapontori, (6) Kecamatan Lasalimu,

(7) Kecamatan Pasarwajo, (8) Kecamatan Sampolawa, (9) Kecamatan Batauga, (10) Kecamatan Gu, (11) Kecamatan Lakudo, (12) Kecamatan Mawasangka, (13) Kecamatan Kabaena, (14) Kecamatan Kabaena Barat, (15) Kecamatan Rumbia, (16) Kecamatan Poleang, (17) Kecamatan Poleang Timur, (18) Kecamatan Wangi-wangi, (19) Kecamatan Kaledupa, (20) Kecamatan Tomia, dan (21) Kecamatan Binongko.

Setelah pembentukan Kota Bau-Bau pada bulan Juni 2001 dengan cakupan wilayah Kecamatan Betoambari, Kecamatan Wolio, Kecamatan Sorawolio, dan Kecamatan Bungi, maka jumlah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton berkurang 4 kecamatan, namun pada bulan Oktober 2001 bertambah lagi dengan dibentuknya Kecamatan Lasalimu Selatan (pemekaran Kecamatan Lasalimu) dan Kecamatan Rarowatu (pemekaran Kecamatan Rumbia). Pada bulan Juli 2002 dibentuk lagi 6 kecamatan, masing-masing: Kecamatan Mawasangka Timur (pemekaran Kecamatan Mawasangka), Kecamatan Sionpu dan Kecamatan Kadatua (pemekaran Kecamatan Batauga), Kecamatan Talaga Raya (pemekaran Kecamatan Kabaena), Kecamatan Batuatas (pemekaran Kecamatan Sampolawa), dan Kecamatan Wangi-wangi Selatan (pemekaran Kecamatan Wangi-wangi). Dengan demikian Kabupaten Buton kembali mempunyai 25 kecamatan.

Pembentukan Kabupaten Wakatobi dengan cakupan wilayah 5 kecamatan (Wangi-wangi, Wangi-wangi Selatan, Kaledupa, Tomia dan Binongko) serta pembentukan Kabupaten Bombana dengan cakupan wilayah 6 kecamatan (Kabaena, Kabaena Barat, Rumbia, Rarowatu, Poleang dan Poleang Timur) kembali menyisakan Kabupaten Buton dengan hanya 14

kecamatan saja, namun pada tahun 2004 terjadi lagi penambahan kecamatan menjadi 21 dengan terbentuknya Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wabula, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Mawasangka Tengah, dan Kecamatan Sangia Wambulu. Dengan demikian, sejak tahun 2005 jumlah kecamatan di Kabupaten Buton telah bertambah menjadi 21 kecamatan (*BPS - Buton Dalam Angka 2007*: hal 3), yaitu:

- a. Kecamatan yang terdapat di Pulau Buton yaitu:
 - Kecamatan Lasalimu
 - Kecamatan Lasalimu Selatan
 - Kecamatan Pasar wajo
 - Kecamatan Siotapina
 - Kecamatan Wolowa
 - Kecamatan Sampolawa
 - Kecamatan Batauga
 - Kecamatan Kapontori
 - Kecamatan Lapandewa
 - Kecamatan Wabula
- b. Kecamatan yang terdapat di Pulau Muna:
 - Kecamatan Mawasangka
 - Kecamatan Mawasangka Timur
 - Kecamatan Mawasangka Tengah
 - Kecamatan Sangia Wambulu
 - Kecamatan Gu
 - Kecamatan Lakudo
- c. Kecamatan yang terdapat di kepulauan yaitu:
 - Kecamatan Batu Atas
 - Kecamatan Talaga Raya
 - Kecamatan Siompu Barat
 - Kecamatan Siompu
 - Kecamatan Kadatua

Ditinjau dari jumlah desa dan kelurahan, pada tahun 2007 Kabupaten Buton memiliki 178 desa dan 29 kelurahan sementara pada tahun 2003 dengan jumlah kecamatan ketika itu sebanyak 14 kecamatan, mempunyai 141 desa dan 24 kelurahan. Dengan demikian ada penambahan jumlah desa dan kelurahan. Menurut *informan* nomor 144 mengatakan bahwa:

“ ... bertambahnya desa sebanyak 37 buah terjadi sebagai akibat pembentukan desa baru sebanyak 21 desa di tahun 2005 dan pada tahun 2006 sebanyak 20 desa, sedangkan bertambahnya 5 kelurahan yaitu adanya pemekaran 1 kelurahan ditahun 2006 dan perubahan status dari desa menjadi kelurahan, yakni pada tahun 2005 terjadi perubahan status 2 desa menjadi kelurahan dan pada tahun 2006 juga terjadi perubahan status 2 desa menjadi kelurahan ... ”

Adapun perkembangan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

2. Kependudukan dan Tenaga Kerja

a. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 240.958 jiwa (laki-laki 118.894 dan perempuan 122.064), dan pada tahun 2003 setelah diadakan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk (P4B) tercatat jumlah penduduk sebanyak 257.159 jiwa (laki-laki 127.729 dan perempuan 129.430) atau selama 3 tahun naik sejumlah 16.901 jiwa atau sekitar 2,25% per tahun. Pada tahun 2005 penduduk mencapai 270.100 jiwa (laki-laki 132.664 dan perempuan 137.436) atau tumbuh sebesar 2,30% dibandingkan dengan tahun 2004 yang tumbuh sebesar 2,57% per tahun sejak tahun 2000, dan berdasarkan pencatatan terakhir jumlah penduduk Kabupaten Buton tahun 2006 sebanyak 271.657 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 135.227 jiwa dan perempuan 136.430 jiwa. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buton pada kurun waktu tahun 2000-2006 sebesar 2,05% per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan selama kurun waktu tahun 2000-2006 dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari data tersebut ada beberapa kecamatan yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu Wabula sebesar -0,13%, Wolowa sebesar -0,07% dan Lapandewa sebesar -5,83%, sedangkan kecamatan lain mengalami pertumbuhan positif. Dari semua

kecamatan yang ada di Kabupaten Buton, Kecamatan Lasalimu Selatan merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terbesar yaitu 3,29% per tahun.

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton
Menurut Kecamatan Tahun 2000 – 2006

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		LAJU PERTUMBUHAN PERTAHUN (%)
		2000	2006	
1	2	3	4	5
1	Lasalimu	8.677	9.900	2,22
2	Lasalimu Selatan	12.783	15.612	3,39
3	Siontapina	10.969	12.182	1,76
4	Pasarwajo	30.867	35.286	2,26
5	Wabula	4.939	4.900	-0,13
6	Wolowa	4.053	4.037	-0,07
7	Sampolawa	20.196	24.153	3,03
8	Lapandewa	7.765	5.415	-5,83
9	Batu Atas	7.822	8.646	1,68
10	Batauga	11.516	14.254	3,62
11	Siompu	8.474	8.783	0,60
12	Siompu Barat	7.198	7.725	1,18
13	Kadatua	8.247	10.362	3,88
14	Kapontori	11.610	13.033	1,95
15	G u	16.642	18.600	1,87
16	Sangia Wambulu	5.927	6.897	2,56
17	Lakudo	21.180	23.850	2,00
18	Mawasangka	18.327	20.520	1,90
19	Mawasangka Timur	6.490	7.913	3,36
20	Mawasangka Tengah	8.117	9.439	2,55
21	Talaga Raya	8.705	10.150	2,59
Jumlah		240.504	271.657	2,05

Sumber: BPS Kab. Buton Tahun. 2007

Kecamatan Batuatas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.204 yang berarti bahwa pada setiap 1 Km², rata-rata dihuni oleh 1.204 penduduk, sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Lasalimu yaitu sebesar 30 jiwa per Km². Adapun rata-rata keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Buton tahun 2005 dan tahun 2006 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton Menurut
Kecamatan Tahun 2005-2006

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	PENDUDUK		KEPADATAN	
			2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7
1	Lasalimu	327,29	9.844	9.900	30	30
2	Lasalimu Selatan	88,09	15.523	15.612	176	177
3	Siontapina	181,02	12.112	12.182	67	67
4	Pasarwajo	356,40	35.083	35.286	98	99
5	Wabula	51,58	4.872	4.900	94	95
6	Wolowa	65,02	4.014	4.037	62	62
7	Sampolawa	153,66	24.015	24.155	156	157
8	Lapandewa	45,16	5.384	5.415	119	120
9	Batu Atas	7,18	8.596	8.646	1.197	1.204
10	Batauga	75,83	14.175	14.254	187	188
11	Siompu	32,50	8.732	8.783	269	270
12	Siompu Barat	10,00	7.680	7.725	768	773
13	Kadatua	23,67	10.303	10.362	435	438
14	Kapontori	113,00	12.958	13.033	115	115
15	G u	104,00	18.494	18.600	178	179
16	Sangia Wambulu	10,00	6.857	6.897	686	690
17	Lakudo	225,00	23.713	23.850	105	106
18	Mawasangka	271,55	20.403	20.520	75	76
19	Mawasangka Timur	126,23	7.868	7.913	62	63
20	Mawasangka Tengah	150,22	9.385	9.439	62	63
21	Talaga Raya	71,31	10.091	10.150	142	142
	Jumlah	2.488,71	270.100	271.657	109	109

Sumber: BPS Kab Buton Tahun 2007

b. Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buton sebesar 107.390 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 65.378 jiwa dan perempuan 42.012 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut sebesar 92.916 jiwa 86,52% telah bekerja yang terdiri dari laki-laki sebanyak 60.424 jiwa dan perempuan

sebanyak 32.492 jiwa. Disisi lain, dapat pula dianalisa bagian angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau disebut pengangguran terbuka.

Pada tahun 2006 dari sejumlah 10 orang angkatan kerja, sekitar 1 orang diantaranya masih mencari pekerjaan. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Buton mencapai 14.474 jiwa, yang sebahagian besar adalah perempuan dengan jumlah 9.520 jiwa (65,77%), sedangkan laki-laki sebesar 4.954 jiwa (34,23%). Untuk penduduk yang telah bekerja, laki-laki berjumlah 60.424 jiwa (65,03%) lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang berjumlah 32.492 jiwa (34,97%), (lihat Tabel 4.3). Rendahnya prosentase perempuan yang secara resmi tercatat bekerja disebabkan oleh sistem nilai yang berlaku di Kabupaten Buton yang masih memprioritaskan laki-laki.

Tabel 4.3.

Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2006

NO	JENIS KEGIATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
I	Angkatan Kerja	65.378	42.012	107.390
	1. Bekerja	60.424	32.492	92.916
	2. Mencari Pekerjaan	4.954	9.520	14.474
II	Bukan Angkatan Kerja	29.395	63.458	92.853
	1. Sekolah	24.139	23.273	47.412
	2. Mengurus R. Tangga	1.056	35.916	36.972
	3. Lainnya	4.200	4.269	8.469
	JUMLAH I + II	94.773	105.470	200.243
III	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,42	77,34	86,52
IV	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	68,98	39,83	53,63

Catatan: Angkatan Kerja yang bekerja tidak termasuk PNS Kabupaten Buton sebanyak 5.606 jiwa (Laki-laki 3.879 jiwa dan Perempuan 1.727)

Selain angkatan kerja, pada tabel 4.2. juga ditampilkan jumlah penduduk 10 tahun keatas yang bukan angkatan kerja. Pada tabel tersebut, tercatat bahwa pada tahun 2006 jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 92.853 jiwa (46,37%) dari total penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut yang masih bersekolah sebanyak 47.412 jiwa (51,06%), mengurus rumah tangga sebanyak 36.972 jiwa (39,82%), dan kegiatan lainnya sebanyak 8.469 jiwa (9,12%).

Dari sejumlah 92.916 jiwa angkatan kerja yang bekerja, lebih dari setengahnya menekuni pekerjaan dalam bidang pertanian dan selebihnya menekuni pekerjaan industri, pertambangan dan penggalian, konstruksi, perdagangan, keuangan, transportasi dan komunikasi serta pekerjaan lainnya. yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Penduduk Usia 10 Tahun Keatas (Usia Kerja)
Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2006

NO	LAPANGAN USAHA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pertanian	41.780	23.227	65.007
2	Pertambangan dan Penggalian	133	-	133
3	Industri	1.710	2.766	4.476
4	Listrik dan Gas	-	-	-
5	Konstruksi	742	-	742
6	Perdagangan	6.490	4.661	11.151
7	Transportasi dan Komunikasi	4.038	176	4.214
8	Keuangan	38	88	126
9	Jasa	5.493	1.574	7.067
10	Lainnya	-	-	-
Jumlah		60.424	32.492	92.916

Sumber: BPS Kab. Buton Tahun 2007

Hal yang menarik dan menimbulkan pertanyaan terhadap data yang disajikan pada tabel 4.4. yaitu dari berbagai bentuk kegiatan/pekerjaan yang disebutkan pada tabel tersebut, tidak termasuk di dalamnya angkatan kerja yang berprofesi sebagai PNS, sementara menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Buton tahun 2007 yang dihimpun dan bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton tercatat bahwa jumlah PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton sebanyak 5.606 yang terdiri dari 3.201 laki-laki dan 2.405 perempuan yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2006

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	BANYAKNYA PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sampai dengan Sekolah Dasar (SD)	25	-	25
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	8	-	8
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1.162	879	2.041
4	Diploma I, II, Akta I, II	731	654	1.385
5	Diploma III, Akta III/Sarjana Muda	165	63	228
6	Sarjana Lengkap (S1)	1.062	806	1.868
7	Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3)	48	3	51
Jumlah		3.201	2.405	5.606

Sumber: Dinas Nakertrans Kab. Buton Tahun. 2007

Walaupun disadari bahwa sebagian besar pegawai Kabupaten Buton yang bekerja pada unit-unit kerja tingkat kabupaten masih berdomisili dan menjadi warga Kota Bau-Bau, tetapi setidaknya ada PNS yang bekerja di kecamatan dan tentu saja menjadi penduduk Kabupaten Buton, dan oleh karena itu sudah semestinya jumlah angkatan kerja sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 dan 4.4. harus memuat jenis pekerjaan PNS.

3. Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum perekonomian Bangsa Indonesia sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 telah memperlihatkan pertumbuhan yang terus meningkat pasca krisis ekonomi yang terjadi dipenghujung tahun 1998. Demikian pula halnya di Kabupaten Buton, proses pemulihan ekonomi setelah krisis ekonomi menyebabkan PDRB Kabupaten Buton pada tahun 1998 ikut merosot dan inflasi yang cukup tinggi, kini telah memperlihatkan hasil yang cukup bagus yang berdampak pada perubahan struktur perekonomian.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Untuk menghitung PDRB ada beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain: (1) Pendekatan produksi yakni jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi disuatu negara atau daerah dalam waktu tertentu, (2) Pendekatan pendapatan yang merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan serta penyusutan pajak, (3) Pendekatan pengeluaran yang meliputi pengeluaran rumah tangga dan swasta, konsumsi pemerintah, penyertaan/pembentukan modal tetap, perubahan stok dan ekspor dalam waktu tertentu (BPS-PDRB Buton 2007 ; 2008: 3).

Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton yang dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga konstan (ADH Konsatan) yakni pada

tahun 2003 sebesar Rp. 547.319,43 juta, pada tahun 2004 menjadi Rp. 585.884,05 juta, tahun 2005 sebesar Rp. 626.381,06 juta dan tahun 2006 menjadi Rp. 669.878,39 juta sedangkan tahun 2007 sebesar Rp. 711.077,42 juta atau mengalami pertumbuhan 6,15%. Prosentasi pertumbuhan ekonomi tersebut masih tergolong rendah dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang mencapai 7,96% maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,32% (BPS-PDRB Buton 2007; 2008:14). Prosentasi pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor usaha sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Sektoral
Kabupaten Buton Tahun 2003 -2007

NO	SEKTOR	2003 (%)	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)
1	Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	5,99	6,23	4,89	5,45	5,66
2	Tambang dan galian	5,98	7,96	26,62	30,95	19,31
3	Industri pengolahan	4,65	11,90	9,19	2,77	5,71
4	Listrik dan air bersih	10,33	2,94	5,63	0,93	37,34
5	Konstruksi/bangunan	3,76	18,75	4,83	3,37	4,21
6	Perdagangan, hotel dan restoran	3,15	6,50	6,30	14,56	4,80
7	Angkutan dan komunikasi	6,74	7,29	8,85	5,28	1,90
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7,72	8,12	42,94	9,52	12,28
9	Lain-lain	9,12	3,80	2,63	4,17	5,52
PDRB		6,09	7,05	6,91	6,94	6,15

Sumber : BPS Kab. Buton 2007

b. PDRB Per kapita

Salah satu indikator mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari PDRB per kapita per tahun. Berdasarkan hal tersebut, PDRB per kapita

penduduk Kabupaten Buton dari tahun ke tahun berikutnya meningkat yang secara jelas dapat dilihat dari tabel 4.7.

Tabel 4.7.
PDRB Perkapita Kabupaten Buton Tahun 2003 -2007

NO	TAHUN	ADH Berlaku (Rp)	ADH Konstan (Rp)
1	2003	2.880.115,72	2.158.608,21
2	2004	3.234.335,20	2.253.183,54
3	2005	3.648.768,26	2.319.998,59
4	2006	4.294.644,21	2.463.032,69
5	2007	4.816.299,47	2.579.489,02

Sumber: BPS Kab. Buton Tahun. 2007

4. Pendidikan

Program pemerintah pada bidang pendidikan yaitu mengupayakan peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berilmu pengetahuan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui perluasan wajib belajar dari 6 tahun ke 9 tahun bahkan 12 tahun (tamat SLTA) serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan meliputi penambahan gedung sekolah dan guru, perbaikan kurikulum serta peningkatan kesejahteraan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *informan* nomor 141 menjelaskan, bahwa:

“Strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Buton dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan belajar, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar. Relevansi pendidikan yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan agar pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.” (Wawancara, tanggal 29 Desember 2008)

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Buton selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pendidikan sejak tahun 2004 sampai tahun 2007 seperti banyaknya sekolah di semua jenjang, jumlah guru dan murid, perbandingan jumlah guru per sekolah dan jumlah murid per sekolah serta perbandingan jumlah murid per tiap guru disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2004 – 2007

TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RATA-RATA		
					GURU/SEKOLAH	MURID/SEKOLAH	MURID/GURU
TK	2007	152	462	6.049	3	40	13
	2006	139	453	6.148	3	44	14
	2005	108	287	3.810	3	35	13
	2004	69	197	3.007	3	44	15
SD	2007	260	1.819	49.361	7	190	27
	2006	252	1.770	45.565	7	181	26
	2005	246	1.949	44.871	8	182	23
	2004	246	1.518	41.758	6	170	28
SLTP	2007	46	805	13.159	18	286	16
	2006	42	879	12.490	21	297	14
	2005	35	881	11.784	25	337	13
	2004	35	688	11.635	20	332	17
SLTA	2007	29	419	7.004	14	242	17
	2006	28	513	6.534	18	233	13
	2005	17	274	4.944	16	291	18
	2004	15	308	4.121	21	275	13

Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kab. Buton Tahun 2008

Memperhatikan Tabel 4.8, dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan jumlah murid yang bersekolah dan penambahan jumlah sekolah untuk semua jenjang pendidikan, sedangkan tenaga pengajar, khususnya guru SLTP dan SLTA justru menurun sehingga rasio perbandingan guru dengan murid

makin besar. Menurut *informan* nomor 145, hal ini terjadi karena adanya beberapa guru yang dialihfungsikan sebagai pejabat struktural untuk mengisi personil pada SKPD dan kantor kecamatan (*Wawancara, tanggal 29 Desember 2008*).

5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Buton dititikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta pemenuhan tenaga kesehatan di setiap kecamatan sampai ke desa-desa. Untuk melihat pembangunan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di Kabupaten Buton ditunjukkan pada tabel 4.9. dan tabel 4.10.

Tabel 4.9.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Tahun 2004 – 2007

<i>NO</i>	<i>FASILITAS KESEHATAN</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
1	Rumah Sakit Umum	-	1	1	1
2	Puskesmas Non Perawatan	8	8	11	12
3	Puskesmas Perawatan Umum	5	4	5	5
4	Puskesmas Perawatan Persalinan	8	8	9	8
5	Puskesmas Pembantu	67	68	72	72
6	Posyandu	330	330	343	380
7	Mobil Puskesmas Keliling	18	18	18	30
8	Boat Puskesmas Keliling	-	-	4	4
	Jumlah	436	437	463	512

Data: Diolah dari data BPS Tahun 2004 – 2007

Pada tabel 4.9 tersebut terlihat bahwa perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Buton dari tahun 2004 sampai tahun 2007 hanya terdapat satu perubahan yang berarti yakni sebuah Rumah Sakit Umum di Pasarwajo sebagai Ibukota Kabupaten Buton, sedangkan fasilitas lain umumnya yang berubah hanya status, misalnya dari Puskesmas non perawatan menjadi

Puskesmas Perawatan Umum atau Puskesmas Perawatan Persalinan. Untuk Puskesmas Pembantu (Pustu) terjadi penambahan dari 67/68 unit tahun 2004/2005 bertambah menjadi 72 unit pada tahun 2006/2007. Jika dilihat dari perkembangan sarana kesehatan yang ada, maka penambahan ini lebih disebabkan oleh bertambahnya jumlah kecamatan dari 14 buah pada awal tahun 2004 menjadi 21 kecamatan pada tahun 2005.

Perkembangan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Buton, khususnya mengenai tenaga kesehatan disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Banyaknya Tenaga Kesehatan Tahun 2004 – 2007

NO	TENAGA KESEHATAN	2004	2005	2006	2007
1	Dokter Umum	13	10	9	10
2	Dokter Gigi	1	1	1	2
3	Dokter Ahli	-	-	-	-
4	Magister Kesehatan	-	-	1	1
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	9	12	19	16
6	Perawat				197
7	Para Medis Perawatan	285	306	296	173
8	Para Medis Non Perawatan			76	137
9	Bidan				103
10	Para Medis Pembantu	26	26	10	10
11	Tenaga Kesehatan lainnya	-	-	-	77
	Tenaga Non Kesehatan			23	20
	Jumlah	334	355	435	746

Data: Diolah dari data BPS Tahun 2004 - 2007

Menyimak Tabel 4.10 tersebut, ternyata Kabupaten Buton yang telah memiliki RSUD yang bertipe C belum memiliki dokter ahli yang definitif bekerja di RSUD Pasarwajo. *Informan* nomor 154 menjelaskan: “kalaupun saat ini ada seorang dokter Ahli Penyakit Dalam, adalah merupakan tenaga kontrakan dari kerja sama antara Pemkab Buton dan Universitas Hasanuddin Makassar”. (Wawancara, tanggal 30 Desember 2008).

B. KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Untuk menilai kinerja pemekaran kecamatan setidaknya ada 2 indikator yang digunakan yaitu ketaatan untuk melaksanakan kebijakan serta pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari rencana pembuatan kebijakan yang meliputi penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan, sedangkan pencapaian tujuan merupakan hasil akhir dari seluruh proses kebijakan yang dalam konteks penelitian dan penulisan tesis ini yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Penyusunan Kebijakan Pemekaran

Langkah awal yang dilakukan pada saat menyusun atau merumuskan suatu kebijakan adalah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi sebab atau alasan disusunnya suatu kebijakan publik. Dunn (2003 : 210) mengemukakan pandangan mengenai perumusan masalah yakni:

Memahami masalah kebijakan sangat penting karena merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis kebijakan. Para analis kebijakan sering gagal karena mereka memecahkan masalah yang salah atau memberikan solusi yang salah terhadap masalah yang tepat.

Berkaitan dengan perumusan masalah kebijakan, E.E.Schattschneider (dalam Dunn, 2003 : 210) menegaskan bahwa: "masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai atau kesempatan yang tidak terealisasi tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik".

Berbagai hal yang mempengaruhi dalam penyusunan suatu kebijakan publik, antara lain adalah persoalan kewenangan, pembiayaan, personil dan sarana atau perlengkapan.

a. Kewenangan

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang dan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pemekaran kecamatan. Pembentukan kecamatan baru menurut kedua undang-undang tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah syarat-syarat pembentukan kecamatan terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Berkaitan dengan kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton, penulis telah mewawancarai *informan* nomor 143 yang menjelaskan bahwa:

"... keinginan masyarakat di wilayah pemekaran untuk memekarkan wilayah mereka menjadi kecamatan direspon positif oleh pemerintah sepanjang persyaratan formal terpenuhi, yakni luas wilayah, jumlah desa/kelurahan serta jumlah penduduk sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2000. Selain persyaratan formal, pemerintah kabupaten juga membentuk tim untuk melakukan kajian lapangan menilai kelayakan pemekaran dari segi geografis dan demografis serta aspek sosial-politik dan kamtibmas." (*Wawancara, tanggal 18 Desember 2008*).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh *informan* nomor 139 yang menjelaskan bahwa:

"... setelah ada UU Nomor 22 Tahun 1999 di mana kewenangan pembentukan kecamatan berada di pemerintahan daerah, maka banyak masyarakat yang mengajukan proposal pemekaran kecamatan dengan alasan mereka membentuk kecamatan baru karena persoalan

pelayanan pemerintahan. Semua wilayah yang mengusulkan pemekaran kecamatan adalah wilayah-wilayah yang sangat jauh dari ibukota kecamatan, seperti wilayah Mawasangka Timur yang jaraknya lebih 40 Km dari Mawasangka; Siompu dan Kadatau yang beribukota di Laompo yang dipisahkan laut, demikian pula Talaga Raya dengan Kabaena bahkan seperti Batuatas dengan ibukota kecamatan di Sampolawa dipisahkan laut yang cukup jauh dengan kondisi perairan yang tidak menentu ...” (*Wawancara, tanggal 18 Desember 2008*).

Meskipun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tidak mengisyaratkan adanya usulan dari masyarakat dalam pembentukan kecamatan, namun pembentukan/pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton mengharuskan adanya persyaratan usulan atau dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat pembentukan kecamatan yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa syarat administrasi pembentukan kecamatan, meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur.

Proses penyusunan peraturan daerah tentang pembentukan/pemekaran kecamatan di Kabupaten diawali dengan usulan/proposal pembentukan kecamatan yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat dan disetujui oleh seluruh pengurus BPD dan Kepala Desa yang ada dalam lingkup wilayah pemekaran. Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusannya dikirimkan kepada DPRD. Kepala Daerah membentuk tim yang bertugas melakukan kajian atas usulan masyarakat tersebut, kemudian setelah semua persyaratan terpenuhi maka dibuat rancangan peraturan daerah dan diajukan pada DPRD untuk pembahasannya

Setelah dilakukan pembahasan maka Pemerintah Kabupaten Buton bersama DPRD Kabupaten Buton menyetujui untuk menetapkan peraturan daerah tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan yakni: 1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lasalimu Selatan, tanggal 4 Oktober 2001; 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Mawasangka Timur, tanggal 24 Juli 2002; 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Siompu, tanggal 24 Juli 2002; 4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kadatua, tanggal 24 Juli 2002; 5) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Talaga Raya, tanggal 24 Juli 2002; 6) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Batuatas, tanggal 24 Juli 2002; 7) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Siotapina, tanggal 2 September 2004; 8) Peraturan Daerah Nomor 16

Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Wabula, tanggal 2 September 2004; 9) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Wolowa, tanggal 2 September 2004; 10) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Lapandewa, tanggal 2 September 2004; 11) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Siompu Barat, tanggal 2 September 2004; 2) Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Mawasangka Tengah, tanggal 2 September 2004; dan 13) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Sangia Wambulu, tanggal 2 September 2004.

Penetapan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Buton yang mengatur tentang pemekaran/pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Buton tentu mempunyai alasan tersendiri. Secara formal pertimbangan dimekarkannya beberapa kecamatan dimaksudkan adalah untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Dalam hal ini, setidaknya ada dua sudut pandang terhadap kendala yang menjadi alasan kelemahan pelayanan publik di tingkat kecamatan. *Pertama*, dari sudut pandang pemerintah kecamatan, yakni kondisi geografis, jumlah desa dan kelurahan serta luas wilayah yang dikoordinasikan dirasakan masih terlalu besar yang secara langsung berpengaruh pada rentang kendali ke pemerintah bawahan. *Kedua* adalah dari sudut pandang masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani, permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya jarak pelayanan yang jauh yakni waktu pelayanan relatif lama serta biaya menuju tempat pelayanan relatif lebih besar.

b. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pemekaran kecamatan yakni dana yang dibutuhkan untuk membuat rancangan peraturan daerah (RAPERDA) hingga penetapan RAPERDA menjadi peraturan daerah (PERDA). Adapun kegiatannya dimulai dari penjaringan aspirasi, pembuatan rancangan pra RAPERDA, sosialisasi dan pembahasan/perumusan rancangan pra RAPERDA menjadi RAPERDA pada level eksekutif. Keseluruhan biaya kegiatan tersebut pendanaannya dibebankan pada DPA Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton yang besarnya Rp. 10.000.000,- untuk satu RAPERDA.

Berkaitan dengan persoalan biaya pembuatan RAPERDA tersebut, *informan* nomor 152 menyatakan:

”... proses pembuatan peraturan daerah dimulai dari penjaringan aspirasi, perumusan prarancangan oleh tim perumus, pembahasan prarancangan ditingkat eksekutif dan *steackholder*, pembuatan rancangan peraturan daerah, pengajuan ke DPRD, pembahasan dan penetapan. Jika fase tersebut dilalui maka membutuhkan dana ± Rp. 30.000.000,- namun selama ini DPA Bagian Hukum hanya menganggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk satu perda yang bersumber dari APBD. Untuk pembuatan rancangan peraturan daerah pembentukan kecamatan, saat itu fase penjaringan aspirasi lebih banyak difasilitasi oleh masyarakat karena memang sesungguhnya masyarakat sangat mengharapkan pemekaran ...” (*Wawancara, tanggal 30 Nopember 2008*).

Biaya yang tersedia sebanyak Rp.10.000.000,- untuk pembuatan satu PERDA pembentukan kecamatan baru dengan rangkaian kegiatan sebagaimana telah disebutkan sangatlah minim, tetapi dengan dana tersebut dapat digunakan secara optimal sehingga pembuatan sebuah PERDA pemekaran/ pembentukan kecamatan di Kabupaten Buton dapat terlaksana.

c. Personil

Membahas mengenai personil dalam perumusan kebijakan publik, maka ada 2 sudut pandang yang perlu diperhatikan, yaitu personil dalam pengertian siapa yang berwenang membuat kebijakan dan personil sebagai sumber daya manusia yang menyelenggarakan kebijakan dimaksud. Adapun personil yang membuat kebijakan adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk merumuskan kebijakan, yang dalam konteks pemekaran kecamatan adalah jajaran pemerintah daerah dan DPRD, sedangkan personil yang menyelenggarakan kebijakan adalah karyawan atau sumber daya manusia yang melaksanakan pemerintahan di kecamatan yang dalam hal ini adalah unsur staf dan pejabat di kecamatan.

Pada hakekatnya, penentuan jumlah personil atau sumber daya manusia dalam suatu organisasi dilakukan dengan perencanaan yang matang menurut analisa kebutuhan dan beban tugas, demikian pula halnya dengan pengisian jabatan dan staf pada kantor kecamatan. Berkaitan dengan perencanaan personil dan analisis jabatan, Ivancelia mengatakan bahwa: "perencanaan sumber daya manusia diperlukan dengan alasan: 1) agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan SDM; 2) lebih memuaskan dan lebih baik dalam mengembangkan kemampuan karyawan; dan 3) lebih efektif dalam perencanaan peluang kerja" (Ivancelia dalam Iswanto, 2005 : 2.21), sedangkan analisis jabatan menurut Ivancevich adalah "suatu proses pengumpulan, penganalisaan dan pensintesisan informasi mengenai jabatan" (Ivancevich dalam Iswanto, 2005 : 2.36).

Secara umum pengaturan mengenai pekerjaan dan jabatan pada suatu organisasi tergambar pada struktur organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Gibson, dkk (1985 ; 15-16) yakni: "struktur organisasi merupakan pola formal tentang susunan posisi atau jabatan, hubungan kewenangan dari masing-masing bagian atau sub bagian dalam organisasi, serta bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan."

Demikian pula halnya dengan organisasi kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton. Selama ini, struktur organisasi kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di kecamatan, dan paling terakhir adalah struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton di mana dalam Pasal 13 mengatur tentang organisasi kecamatan. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di dalam Paragraf 4 yang mengatur kecamatan dan kelurahan dijelaskan pada Pasal 32 bahwa:

- (1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahi paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
- (2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Adapun perkembangan struktur organisasi (penamaan dan jumlah jabatan serta eselonisasi) pada kantor kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buton sebagai berikut:

1). Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 yang dirubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2002 yakni:

- Camat 1 (satu) orang, eselon III b
- Sekretaris Camat 1 (satu) orang, eselon IV a
- Kepala Seksi 5 (lima) orang, masing-masing:
 - Kepala Seksi Pemerintahan, eselon IV a
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat, eselon IV a
 - Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pelayanan Umum, eselon IV a
- Kelompok Jabatan Fungsional, non eselon

2). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 yakni:

- Camat 1 (satu) orang, eselon III b
- Sekretaris Camat 1 (satu) orang, eselon IV a
- Kepala Seksi 4 (empat) orang, masing-masing:
 - Kepala Seksi Pelayanan Umum, eselon IV a
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pembangunan, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, eselon IV a
- Kelompok Jabatan Fungsional non eselon

3). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 yakni:

- Camat 1 (satu) orang, eselon III a
- Sekretaris Camat 1 (satu) orang, eselon III b, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, eselon IV b
 - Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, eselon IV b
- Kepala Seksi 4 (empat) orang, masing-masing:
 - Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, eselon IV a
 - Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pembangunan, eselon IV a
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, eselon IV a
- Kelompok Jabatan Fungsional

Selain jumlah personil kecamatan yang tergambar dalam struktur organisasi tersebut, setiap kantor kecamatan juga dilengkapi staf administrasi dan staf fungsional serta pegawai honorer yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan. Dari data yang dikumpulkan, setiap kecamatan memiliki tenaga staf administrasi dan staf fungsional berkisar antara 7 sampai dengan 15 orang dan pegawai honorer antara 3 sampai dengan 7 orang yang kesemuanya itu disesuaikan dengan luas wilayah, keadaan geografis dan jumlah penduduk.

2. Implementasi Pemekaran Kecamatan

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut dilaksanakan oleh unit-unit

administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Van Horn dan Van Metter (dalam Winarno, 2008 : 144) menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan proses kebijakan selanjutnya setelah penetapan undang-undang, yakni tahap pelaksanaan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk meraih tujuan-tujuan atau program-program kebijakan”. Terkait hal tersebut Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2007 : 87) menjelaskan: *“To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation the issuing of authoritative”* (Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan). Menurut Keban, pada tahap ini proses *monitoring* (pemantauan) dilakukan, sedangkan tahap terakhir adalah tahap penilaian kebijakan dimana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi, apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak (Keban ; 2008 : 67). Mazmanian dan Sabatier (dalam Dunn, 2004 : 277) menjelaskan: *“Monitoring is the policy analytic procedure used to produce information about the causes and consequences of public policies. Monitoring, ... is the primary source of knowledge about policy implementation”* (pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan publik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik.... Pemantauan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi).

Implementasi pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Buton yang telah ditetapkan dengan beberapa peraturan daerah, ditandai dengan pengangkatan camat dan perangkat kecamatan, dukungan dana operasional dan pembuatan kantor serta fasilitas pendukung lainnya.

a. Kecamatan Lasalimu Selatan

Sebelum terbentuknya Kecamatan Lasalimu Selatan, kecamatan ini berada dalam wilayah Kecamatan Lasalimu yang ketika itu merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Buton dengan kondisi geografis bergunung serta sarana jalanan yang kurang/pendek dengan kondisi rusak dan berlubang-lubang karena masih pengerasan sehingga dengan keadaan yang seperti itu, sangat membatasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan menghambat distribusi hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat di wilayah Lasalimu Selatan.

Oleh karena itulah, pada tahun 1997 mulai disuarakan oleh masyarakat yang direspon pemerintah kecamatan tentang perlunya pembentukan kecamatan di wilayah Lasalimu Selatan, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta membuka keterisolasian.

Berkaitan dengan hal tersebut, *informan* nomor 3 mengatakan:

"... meskipun Kecamatan Lasalimu termasuk daerah yang memiliki lahan yang subur tetapi keadaan waktu itu tidak cukup mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, bahkan pada tahun 1990-an Kecamatan Lasalimu tergolong kecamatan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena ketika itu pelayanan pemerintah kepada masyarakat sangat terbatas. Pada saat itu jalan-jalan di Lasalimu sangat rusak sehingga petani tidak punya akses untuk menjual hasil pertanian dan perkebunannya. Untuk berurusan dengan kantor camat, khususnya masyarakat yang ada di Wilayah Lasalimu Selatan harus memutar dulu ke Bau-Bau dengan jarak

± 200 Km. Sebenarnya sudah ada juga jalan melewati Lasalimu Pantai tetapi sangat rusak dan tidak dapat dilalui dengan kendaraan. Keadaan ini mendorong masyarakat untuk mau memekarkan diri tapi waktu itu untuk membentuk kecamatan baru sangat sulit karena menurut aturan yang ada sebelum UU Nomor 22 Tahun 1999 harus disetujui pemerintah pusat, makanya dibentuk Kecamatan Pembantu Siontapina dengan wilayah kerja meliputi desa-desa dalam wilayah Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Siotapina saat sekarang ini ..." (*Wawancara, tanggal 24 Nopember 2008*).

(Pendapat yang hampir sama dengan pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh *informan* nomor 14 dan 15).

Memperhatikan pernyataan para *informan* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemekaran kecamatan di wilayah Lasalimu Selatan merupakan sebuah keharusan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat maupun dalam pelayanan pemerintahan, oleh karena itu ketika belum terbit UU Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Buton telah mengusulkan pemekaran Kecamatan Lasalimu dengan pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Siontapina. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga dibentuk Kecamatan Pembantu Siontapina melalui Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 208 Tahun 1998, karena pada waktu itu pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Setelah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam Pasal 66 ayat (6) menyebutkan bahwa "Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah", maka dengan demikian, kewenangan pembentukan kecamatan sudah berada di daerah. Dengan adanya aturan ini maka masyarakat dan pemerintah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kecamatan Siontapina agar Kecamatan Pembantu

Siontapina dijadikan kecamatan yang defenitif. Setelah pembahasan di DPRD maka pada tanggal 15 Oktober 2001 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Lasalimu Selatan.

Perubahan nama Siontapina menjadi Lasalimu Selatan terjadi ketika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Buton, dengan cakupan wilayah terdiri atas 15 desa masing-masing: 1) Desa Ambuau Indah, 2) Desa Lasalimu, 3) Desa Kumbewaha, 4) Desa Siontapina, 5) Desa Sampuabalo, 6) Desa Siomanuru, 7) Desa Matanauwe, 8) Desa Wajajaya, 9) Desa Kinapani Makmur, 10) Desa Sumber Sari, 11) Desa Kuraa, 12) Desa Walompo, 13) Desa Mopaano, 14) Desa Labuandiri, dan 15) Desa Umalaoge.

Setelah Kecamatan Lasalimu Selatan terbentuk maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin meningkat yang diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh *informan* nomor 13, sebagai berikut:

”... masyarakat gembira dengan pemekaran kecamatan karena berurusan dengan pemerintah kecamatan tidak susah lagi. Setelah jadi kecamatan, Desa Ambuau sebagai ibukota kecamatan makin ramai, pasar yang dulunya 2 kali seminggu sekarang sudah setiap hari sehingga petani sudah cukup banyak waktu menjual hasil kebunnya, demikian pula dengan pedagang lainnya semakin meningkat hasil jualannya. Penghasilan masyarakat kepala keluarga rata-rata Rp 40.000,- perhari. Pemerintah semakin banyak menurunkan dana-dana pembangunan, jalan-jalan sudah diperbaiki, pembukaan jalan usaha tani, pendirian sekolah baru, pendirian PUSKESMAS dan PUSTU baru, pendirian pasar di desa-desa lain sebagai tempat pertumbuhan baru, dan banyaknya pemukim baru yang datang dan menetap di Ambuau serta beberapa desa tempat pertumbuhan baru seperti Desa Matanauwe dan Desa Kumbewaha ... ” (*Wawancara, tanggal 24 Nopember 2008*).

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh *informan* nomor 2

(*Wawancara, tanggal 25 Nopember 2008*), sebagai berikut:

”... sebelum pemekaran kami susah berurusan dengan pemerintah kecamatan karena sangat jauh dan susah ke Kamaru. Sekarang sudah bagus dan sudah ramai, kami yang bekerja sebagai pedagang sudah banyak lakunya sebab sudah bisa berjualan tiap hari di Pasar Ambuau, petani dan tukang kebun juga sudah senang karena hasil kebunnya sudah ada yang beli sebab sudah ramai disini, tidak seperti dulu. Sekarang kita dapat Rp 30.000,- sampai Rp 80.000,- tiap hari. Jalan juga sudah bagus, anak-anak yang mau sekolah di SMA tidak perlu ke Bau-Bau karena disini juga sudah ada, hanya PLN yang masih kurang pelayanannya ... ” (Pernyataan yang hampir sama dengan pendapat tersebut juga disampaikan oleh *informan* 6, 7, 8, 9, 10 dan 11).

Terkait dengan perkembangan yang terjadi di Kecamatan Lasalimu Selatan, *informan* nomor 163 menjelaskan:

”... keadaan Lasalimu Selatan sekarang ini jauh lebih baik saat ini dibanding masih bergabung dengan Kecamatan Lasalimu. Selain aspek pelayanan pemerintahan, yang paling terasa dari pemekaran adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Ini semua terjadi karena sebagian besar pencaharian masyarakat adalah petani. Setelah Ambua Indah jadi ibukota kecamatan, keadaannya sudah ramai sehingga petani dan tukang kebun sudah memasarkan hasil-hasil kebunnya setiap hari. Selain itu, sudah banyak pedagang yang datang membeli hasil kebun masyarakat langsung ke Lasalimu Selatan karena jalanan sudah bagus. Sebelum pemekaran penghasilan petani tidak jelas tetapi sekarang ini paling sedikit Rp 1 juta perbulan. Fasilitas pendidikan juga meningkat, dahulu SMA tidak ada sedangkan sekarang sudah 2 unit. Dengan kemajuan itu, Lasalimu Selatan juga sudah memekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan Siotapina. Itu merupakan bukti yang paling nyata atas kemajuan Lasalimu Selatan ... ” (*Wawancara, tanggal 22 Desember 2008*).

Selain pernyataan para *informan* tersebut, beberapa warga yang ditemui dan ditanyakan mengenai keberadaan Lasalimu Selatan sebelum dan setelah pemekaran kecamatan mengatakan bahwa telah banyak kemajuan dan perubahan yang terjadi. Tidak ada seorang *informan*

maupun warga yang menyatakan sisi negatif dari pemekaran, bahkan mereka menyatakan bahwa

kemajuan bukan hanya terjadi di ibukota kecamatan, tapi semua desa merasakan kemajuan karena pembangunan infrastruktur dilaksanakan di seluruh penjuru kecamatan seperti pembuatan jalan usaha tani, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, serta kemudahan akses informasi.

Kemajuan di bidang pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pemekaran, oleh karena itu untuk melihat perkembangan jumlah sekolah, guru dan murid pada tiap jenjang pendidikan sebagai indikator keadaan pendidikan di Kecamatan Lasalimu Selatan ditunjukkan pada Tabel 4. 11, sebagai berikut:

Tabel. 4. 11.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007
Di Kecamatan Lasalimu Selatan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK :						Data pada tahun 2005 masih termasuk dengan Kecamatan Siotapina
	- Sekolah	3	3	10	6	6	
	- Guru	6	6	24	17	17	
- Murid	107	107	345	234	178		
2.	SD :						
	- Sekolah	26	28	28	17	17	
	- Guru	158	173	181	124	123	
- Murid	4691	4907	4.773	2245	2245		
3.	SLTP :						
	- Sekolah	1	2	4	3	3	
	- Guru	13	48	61	50	51	
- Murid	175	852	1009	627	708		
4.	SMU :						
	- Sekolah	1	1	1	2	2	
	- Guru	14	16	14	19	36	
- Murid	117	147	182	322	361		

Sumber: Data diolah dari Wawancara Lapangan dan Data Statistik Tahun 2007

Memperhatikan Tabel 4.11 tersebut, telah terjadi peningkatan jumlah sekolah yang diikuti dengan peningkatan jumlah murid dan guru di Kecamatan Lasalimu Selatan. Pada tahun 2006 terjadi penurunan jumlah sekolah, guru dan murid untuk semua jenjang pendidikan yang disebabkan oleh karena sebagian telah masuk pada wilayah pemerintahan Kecamatan Siotapina yang diresmikan pada awal tahun 2005 sebagai hasil pemekaran Kecamatan Lasalimu Selatan.

Adapun perkembangan pembangunan pada bidang kesehatan di Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.12 dan 4.13 berikut:

Tabel 4.12
Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	1	1	-	-
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	1	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	1	-	1	-	1
4	PUSTU	4	3	3	9	9
5	Posyandu	46	46	46	23	24
6	Puskesmas Keliling. RODA 4	3	2	1	1	2
JUMLAH		54	53	52	33	36

Sumber: Data diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.12 memperlihatkan data keadaan sarana/fasilitas kesehatan tahun 2003 sampai tahun 2007 yang jumlahnya mengalami penurunan dan perubahan status/keberadaan layanan puskesmas. Menurut informan nomor 140 (*Wawancara tanggal 30 Desember 2008*) menerangkan bahwa perubahan status/keberadaan puskesmas pada tahun 2003-2005 adalah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan dikaitkan dengan

kebutuhan masyarakat, sehingga tahun 2004 sampai tahun 2005 ada perubahan status PUSTU menjadi puskesmas non perawatan tetapi pada tahun 2006 statusnya dikembalikan menjadi PUSTU, sedangkan penurunan jumlah kendaraan roda 4 pada tahun 2004 karena dipindahkan penggunaannya pada kecamatan lain yang baru dimekarkan.

Selain sarana kesehatan yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 tersebut, tenaga kesehatan juga merupakan indikator yang terpenting untuk melihat pembangunan pada bidang kesehatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Lasalimu Selatan Tahun 2003-2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	4	4	1	1	1
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	-	2	1
4	- PARA MEDIS	14	25	30	23	16
5	- PEMB. PARA MEDIS	3	-	-	1	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	-	-	-	-	4
8	- PERAWAT	-	-	-	-	11
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	2
JUMLAH		21	29	31	27	35

Sumber: Data diolah dari BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Memperhatikan Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 secara umum terjadi peningkatan sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Lasalimu Selatan. Pada tahun 2006-2007 telah terjadi peningkatan status posyandu menjadi PUSTU dan penambahan satu unit kendaraan mobil puskesmas serta penambahan tenaga kesehatan. Pada saat itu juga data sarana kesehatan Kecamatan Siotapina sudah terpisah dengan Kecamatan Lasalimu Selatan.

Terjadinya penurunan jumlah sarana prasaran kesehatan maupun pendidikan pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 karena pada akhir tahun 2004, Kecamatan Lasalimu Selatan memekarkan lagi satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Siotapina dengan wilayah cakupan meliputi: 1) Desa Kumbewaha, 2) Desa Walompo, 3) Desa Matanauwe, 4) Desa Kuraa, 5) Desa Labuandiri, 6) Desa Sampuabalo, dan 7) Desa Sumber Sari.

Pesatnya pertumbuhan di Lasalimu Selatan tidak berkurang meskipun telah memekarkan kecamatan pada tahun 2004, bahkan pada tahun 2005 terbentuk lagi 3 desa yaitu Desa Mulya Jaya, Desa Harapan Jaya serta Desa Sangia Arano. Ketiga desa yang baru terbentuk tersebut pada mulanya merupakan Satuan Pemukiman Transmigrasi (yakni SP VI, SP VII dan SP VIII) yang telah mengalami kemajuan. Karena telah memenuhi syarat untuk menjadi desa maka aspirasi masyarakat untuk membentuk desa direspon oleh pemerintah sehingga terbentuk desa-desa tersebut melalui Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Mulya Jaya, Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Harapann Jaya dan Perda Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Sangia Arano. Tahun 2006, terjadi lagi pembentukan desa baru melalui Perda Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Mega Bahari yang merupakan peningkatan status Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) serta Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Sumber Agung yang merupakan pemekaran dari Desa Wajah Jaya.

Kemajuan yang terjadi di Kecamatan Lasalimu Selatan diterangkan pula oleh *informan* nomor 144, sebagai berikut:

”... kemajuan di Lasalimu Selatan sungguh luar biasa, setelah terbentuk kecamatan, pemerintah kabupaten membuka jalan-jalan sehingga kawasan pertanian dan perkebunan yang semula terisolir jadi terbuka dan masyarakat yang semula berkebun hanya untuk menghidupi keluarga sendiri, mulai menjual hasil kebun mereka dan ini memicu perubahan yang begitu drastis. Dalam waktu 2 tahun, kawasan-kawasan pemukiman transmigrasi berkembang pesat sehingga melihat kondisi yang ada serta memperhatikan syarat-syarat formil maka kawasan tersebut kami jadikan desa ..., kata kunci di Lasalimu Selatan, kemajuan dibidang pertanian dan perkebunan dapat membentuk desa dan kecamatan, sekali lagi, ini semua karena pemekaran yang membuka keterisolasian ... ” (*Wawancara, tanggal 18 Desember 2008*).

b. Kecamatan Talaga Raya

Kecamatan Talaga Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Talaga Raya mempunyai luas 71,31 km² yang merupakan kepulauan, dan sebahagian wilayahnya berada di Pulau Kabaena. Adapun pulau-pulau yang berada di Kecamatan Talaga Raya yaitu Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil dan Pulau Kokoe. Di Pulau Talaga Besar terdapat Desa Talaga Besar; di Pulau Talaga Kecil terdapat Desa Talaga Dua dan Kelurahan Talaga Satu yang wilayah kedua desa/kelurahan tersebut juga berada di Pulau Kabaena, sedangkan di Pulau Kokoe terdapat Desa Kokoe.

Kecamatan Talaga Raya merupakan pemekaran dari Kecamatan Kabaena dengan batas-batasnya adalah di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Buton, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bombana.

Alasan utama pembentukan Kecamatan Talaga Raya adalah persoalan rentang kendali yang terlalu jauh dengan kecamatan induk yaitu dipisahkan laut dengan kondisi perairan yang berarus dan bergelombang besar.

Setelah menjadi kecamatan, terjadi perkembangan yang cukup signifikan, khususnya pada ibukota kecamatan sehingga pada Tahun 2005 Desa Talaga Satu yang menjadi ibukota kecamatan berubah status menjadi Kelurahan Talaga Satu melalui Perda Nomor 26 Tahun 2005. Perubahan status tersebut, *informan* nomor 153 menjelaskan bahwa:

”... status kelurahan tidak diraih begitu saja tetapi hal ini telah melalui kajian yang dilaksanakan oleh Tim Kajian Pemekaran Wilayah Kabupaten Buton yang melihat berbagai aspek, dan berkesimpulan bahwa Desa Talaga Satu sudah memperlihatkan karakteristik perkotaan sehingga layak statusnya dirubah menjadi kelurahan ... ” (*Wawancara tanggal 13 Desember 2008*).

Terkait dengan pemekaran yang telah banyak memberikan kemajuan yang terjadi di Talaga Raya, dikemukakan pula oleh *informan* nomor 58 yang menjelaskan:

”... manfaat yang paling utama dirasakan adalah pendekatan pelayanan. Sebelum terbentuknya Kecamatan Talaga Raya, penduduk Talaga berurusan dengan pemerintah kecamatan harus menyeberangi laut yang jaraknya melebihi 10 mil dengan kondisi alam yang tidak menentu, ... selain itu, telah terjadi kemajuan pembangunan, yakni sarana pendidikan meningkat seperti adanya pembukaan TK baru, SMA baru, renovasi gedung SD, peningkatan sarana kesehatan seperti status PUSTU menjadi PUSKESMAS, perbaikan PUSTU, pembuatan pos yandu, pembukaan pasar baru, dibidang perhubungan yakni pembuatan jalan. penambahan/perbaikan dermaga, dan yang paling berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat yakni pembukaan areal pertambangan yang menyerap tenaga kerja lebih 200 orang dengan standar gaji minimal Rp. 35.000,- per hari ..., masalah yang ada di Talaga adalah tenaga guru dan kesehatan yang belum cukup, mereka yang ditempatkan tidak betah, selain itu adalah perbatasan antara Buton dengan Bombana di Pulau Kabaena ... ” (*Wawancara tanggal 13 Desember 2008*).

Gambaran perbandingan perkembangan pembangunan pada bidang pendidikan di Kecamatan Talaga Raya, dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel. 4. 14.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Talaga Raya

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK : - Sekolah	1	2	2	3	3	
	- Guru	1	2	6	10	10	
	- Murid	65	97	199	182	310	
2.	SD : - Sekolah	9	9	9	9	9	
	- Guru	48	45	43	41	37	
	- Murid	1811	1911	1950	1979	2063	
3.	SLTP : - Sekolah	1	1	1	1	1	
	- Guru	17	15	17	21	19	
	- Murid	309	415	512	585	610	
4.	SMU : - Sekolah	-	1	1	1	1	
	- Guru	-	14	14	8	14	
	- Murid	-	81	105	161	246	

Sumber : BPS dan Dikbud Kab. Buton Tahun 2003-2007

Memperhatikan tabel 4.14 tersebut, menunjukkan bahwa jumlah murid setiap tahun bertambah, jumlah TK dan SMU juga bertambah yang menurut *informan* nomor 59 mengatakan bahwa:

” ... pembangunan TK dan SMU pada awalnya merupakan swadaya masyarakat, kemudian pada tahun 2006 SMU tersebut mendapat bantuan pembangunan dari dana APBD untuk pembangunan 3 ruang kelas sehingga keberadaan SMU Talaga hari ini telah memiliki 6 ruang kelas serta gedung pelengkap lainnya dan TK mendapat bantuan dari dana PPK, sedangkan jumlah guru secara keseluruhan menurun, khususnya pada SLTP dan SD. Penurunan jumlah guru tersebut karena memasuki usia pensiun dan dipindahkan pada kecamatan lain serta adanya beberapa guru yang beralih fungsi menjadi pegawai kecamatan dan kelurahan.” (Wawancara tanggal 14 Desember 2008).

Perkembangan pembangunan pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Talaga Raya dapat dilihat pada Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.15
Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Talaga Raya Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	-	-
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	1	1	1	1
4	PUSTU	2	1	1	2	2
5	Posyandu	9	9	9	9	10
6	Puskesmas Boat /Speed Boat	-	-	1	1	1
JUMLAH		11	11	12	13	14

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.16
Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Talaga Raya 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	1	-	-	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	2	1	1	-	1
4	- PARA MEDIS	6	7	7	13	8
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	-	-	-	-	3
8	- PERAWAT	-	-	-	-	5
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	3
JUMLAH		9	8	8	13	20

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.16 yang menggambarkan tentang keadaan sarana kesehatan dan tabel 4.17 yang memperlihatkan keadaan tenaga kesehatan di Kecamatan Talaga Raya, secara keseluruhan menunjukkan peningkatan.

Berhubung sebagian besar masyarakat Talaga Raya bermukim di Pulau Talaga Kecil dan Pulau Talaga Besar maka pencaharian masyarakat lebih

banyak berorientasi di laut, seperti nelayan dan peternak rumput laut, tetapi setelah adanya pemekaran dan dibukanya pertambangan nikel maka pencaharian masyarakat sudah banyak yang beralih pada lapangan kerja lain, sebagaimana dikemukakan oleh *informan* nomor 57 menjelaskan:

”... dibanding sebelum pemekaran, saat ini mata pencaharian masyarakat tidak hanya didominasi nelayan, tapi sudah banyak yang beralih ke dagang dan tukang batu, sebagai akibat terbentuknya Kecamatan Talaga Raya. Talaga sekarang sudah ramai, banyak bangunan baru, terlebih lagi setelah dibukanya tambang nikel, banyak masyarakat yang bekerja dipertambangan karena disana mereka telah mendapatkan penghasilan tetap minimal Rp. 35.000,- sehari, bahkan tenaga terampil digaji sampai Rp. 70.000,- per hari, sedangkan kalau melaut belum pasti hasilnya ...”
(*Wawancara tanggal 13 Desember 2008*).

c. Kecamatan Siompu

Siompu menjadi kecamatan yang berdiri sendiri setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Siompu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Batauga.

Wilayah pemerintahan Kecamatan Siompu pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) desa yang meliputi: 1) Desa Watuampara, 2) Desa Lalole, 3) Desa Biwinapada, 4) Desa Wakinamboro, 5) Desa Tongali, 6) Desa Kaimbulawa, 7) Desa Mbanua, dan 8) Desa Molona, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kadatua;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Masiri.

Berkaitan dengan pembentukan Kecamatan Siompu sebagai akibat dari pemekaran Kecamatan Batauga, *informan* nomor 164 mengatakan bahwa:

”... sebelum pemekaran wilayah, masyarakat Kecamatan Batauga yang bermukim di Pulau Siompu dan Pulau Kadatua jika melakukan urusan di Kantor Kecamatan, mereka harus menyeberangi laut dengan jarak yang puluhan mil dan kondisi alam yang tidak menentu. Keinginan masyarakat untuk membentuk kecamatan sendiri di Pulau Siompu dan Kadatua sudah lama. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan maka segenap warga di Siompu dan Kadatua mengusulkan pembentukan kecamatan dan tentu saja usulan itu patut disahuti, ... setelah pemekaran maka masyarakat Siompu dan Kadatua sudah merasakan dampak positifnya antara lain yang paling terasa adalah aspek pelayanan pemerintahan yang tidak perlu lagi ke Batauga yang membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dana-dana pembangunan juga sudah banyak yang turun seperti sekarang ini sudah 16 km jalan yang diaspal di Siompu, sudah ada 2 SMA, 2 Puskesmas, perbaikan dermaga, dan tidak kalah pentingnya yakni pendapatan masyarakat meningkat ...” (*Wawancara tanggal 23 Desember 2008*).

Dampak pembentukan Kecamatan Siompu bagi masyarakat menurut *informan* nomor 16 mengatakan:

”... masyarakat menyambut gembira pembentukan kecamatan, khusus di Biwinapada sebagai ibukota kecamatan, keadaannya saat ini jauh berbeda dengan sebelum pemekaran. Sekarang sudah ramai pasar desa sudah lancar tiap hari, pembangunan fasilitas umum sudah meningkat seperti pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Camat, Kantor UPTD, pembangunan gedung SMA. Pembangunan PUSKESMAS, pengaspalan jalan, pembuatan jalan desa ...” (*Wawancara tanggal 2 Desember 2008*).

Lain halnya dengan *informan* nomor 162 yang menyoroti dampak negatif pembentukan Kecamatan Siompu, sebagai berikut:

”... sisa-sisa kekecewaan masyarakat akibat persoalan ibukota kecamatan sampai saat ini belum habis. Meskipun saat ini di wilayah barat Siompu sudah ada juga kecamatan baru tapi ada indikasi persaingan yang kurang sehat antara kecamatan induk dan kecamatan pemekaran. Karena itu dibutuhkan perhatian pemerintah kabupaten untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa pemekaran hanyalah pemisahan administrasi pemerintahan, bukan pengkotak-kotakan kelompok apalagi sampai pemisahan kultur budaya ...” (*Wawancara tanggal 23 Desember 2008*).

Apa yang dikemukakan oleh *informan* nomor 162 sesungguhnya bermula dari proses pengusulan proposal pemekaran kecamatan hingga penggodokan rancangan peraturan daerah pembentukan kecamatan.

Ketika proses pengusulan dan penggodokan terjadi, peneliti/penulis menjabat sebagai Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton yang membidangi perumusan rancangan perda. Dalam proposal pengusulan serta pengajuan rancangan perda ke DPRD, calon ibukota kecamatan adalah di Desa Molona, sedang pada saat pembahasan terjadi perdebatan alot antara eksekutif dan legislatif dan disepakati bahwa Ibukota Kecamatan Siompu di Biwinapada dengan pertimbangan bahwa telah ada kesiapan warga Biwinapada menghibahkan tanah untuk fasilitas umum dan pemerintahan.

Pada saat implementasi di lapangan, warga Desa Molona menolak dan menghalangi peresmianya, namun Pemerintah Kecamatan Siompu dan Pemerintah Kecamatan Batauga selaku kecamatan induk senantiasa memberi motivasi kepada masyarakat Molona. Dengan motivasi tersebut terjadi percepatan dalam berbagai aspek di Molana, sehingga pada tahun 2004, wilayah Siompu bagian barat dimekarkan lagi menjadi kecamatan baru dengan nama Kecamatan Siompu Barat (Perda Nomor 19 Tahun 2004) yang beribukota di Molona.

Sebagai konsekuensi terbentuknya Kecamatan Siompu Barat, maka luas dan jumlah desa di Kecamatan Siompu berkurang karena 4 desa telah masuk dalam wilayah Siompu Barat yaitu: 1) Desa Molona, 2) Desa Lalole, 3) Desa Mbanua, dan 4) Desa Watuampara.

Terbentuknya Kecamatan Siompu Barat, mempunyai dampak positif bagi Kecamatan Siompu dan Pulau Siompu secara keseluruhan, sebagaimana dikemukakan *informan* nomor 24 bahwa:

”... dengan mekarnya Siompu Barat maka porsi dana pembangunan di Pulau Siompu yang dulu cuma satu menjadi 2 porsi. Khusus di kecamatan Siompu, setelah lepasnya Siompu Barat, maka titik pertumbuhan menyebar ke desa-desa lainnya, padahal sebelum Siompu Barat mekar, pertumbuhan pesat terjadi di Molona dan desa-desa lain di Siompu Barat.. Sebagai akibat pertumbuhan itu maka pada Tahun 2005 Desa Kaimbulawa memekarkan Desa Lontoi dan pada Tahun 2006 Desa Biwinapada memekarkan Desa Nggula-nggula dan Desa Wakinamboro memekarkan Desa Batuawu ... , secara keseluruhan perkembangan di Siompu sangat pesat, jalan sudah diaspal, mobil sebagai angkutan umum sudah ada beberapa unit, SMA Negeri 2 unit, SMP Negeri 2 unit dan 1 unit SMP satu atap, MTs 2 unit, 14 unit SD dan hampir 10 unit TK, Puskesmas 2 unit, perbaikan dermaga dan pembuatan pasar desa yang kesemuanya itu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat...” (Wawancara tanggal 1 Desember 2008).

Adapun tanggapan kalangan wiraswasta berkaitan dengan pembentukan Kecamatan Siompu, semua *informan* yang diwawancarai menyatakan bahwa dampaknya cukup positif bagi peningkatan kesejahteraan, antara lain sebagaimana dikemukakan oleh *informan* nomor 22 mengatakan:

”... kalau mau melihat pendapatan masyarakat dengan pemekaran kecamatan rasa-rasanya susah diukur, tapi yang pasti dengan banyaknya masyarakat tentu akan menambah volume penjualan barang-barang, selain itu dengan banyaknya bangunan dan pekerjaan di Siompu akan membuka lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat ... , saya tidak bisa ukur dengan pasti pendapatan masyarakat tapi upah buruh saja sudah Rp. 30.000,- per hari, jadi penghasilan paling rendah sudah Rp. 30.000 per hari itu. Kalau dulu karena pekerjaan kurang maka upah buruh bangunan cuma Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000, per hari, dulu banyak juga yang nganggur ... ” (Wawancara tanggal 2 Desember 2008).

Pernyataan *informan* yang menerangkan tentang manfaat pemekaran, khususnya pada bidang pendidikan dapat diperbandingkan dengan data perkembangan pembangunan di bidang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.17, berikut:

Tabel. 4. 17.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Siompu

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK : - Sekolah	1	5	5	2	7	
	- Guru	4	20	9	7	18	
	- Murid	62	268	201	112	310	
2.	SD : - Sekolah	10	11	12	8	8	
	- Guru	77	82	102	58	58	
	- Murid	2704	2990	2784	1670	1670	
3.	SMP : - Sekolah	1	2	2	1	1	
	- Guru	10	40	55	28	28	
	- Murid	101	814	888	429	481	
4.	SMA: - Sekolah	1	1	2	1	1	
	- Guru	12	10	15	4	13	
	- Murid	177	197	247	71	134	

Sumber: Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.17, menunjukkan penurunan sarana kependidikan sebagai akibat adanya pemekaran kecamatan baru yaitu pembentukan Kecamatan Siompu Barat sebagai pecahan dari Kecamatan Siompu.

Untuk mengetahui perbandingan pembangunan dibidang kesehatan, khususnya mengenai sarana kesehatan dan tenaga kesehatan diperlihatkan pada Tabel 4.18 dan Tabel 4.19.

Tabel 4. 18

Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Siompu 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	-	1
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	1	1	1	1
4	PUSTU	3	3	3	3	3
5	Posyandu	11	12	12	6	12
6	Mobil Puskesmas Roda 4	-	-	-	-	-
7	Puskesmas Boat /Speed Boat	-	-	-	-	1
JUMLAH		14	16	16	10	17

Sumber: Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 19
Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Siompu 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	-	-	1	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	-	-	-
4	- PARA MEDIS	11	16	15	7	-
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	-	-	-	-	2
8	- PERAWAT	-	-	-	-	7
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	2
JUMLAH		11	16	16	7	11

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.18 menunjukkan adanya peningkatan sarana kesehatan, baik sebelum maupun setelah terbentuknya Kecamatan Siompu Barat, sedangkan jumlah tenaga kesehatan; perkembangannya relatif kecil, bahkan setelah terbentuknya Kecamatan Siompu Barat, maka dokter umum tidak ada lagi di Kecamatan Siompu, karena dokter umum yang ada pada data tahun 2005 bertugas di puskesmas Molona yang telah menjadi ibukota Kecamatan Siompu Barat.

Hal yang menarik dari data sarana kesehatan, bahwa pada saat peresmian pembentukan Kecamatan Siompu Barat, di Kecamatan Siompu dilakukan peresmian peningkatan status posyandu menjadi PUSTU dan peningkatan PUSTU Biwinapada menjadi Puskesmas, sehingga jumlah Puskesmas dan PUSTU tetap meskipun ada pemekaran kecamatan baru.

d. Kecamatan Batuatas

Kecamatan Batuatas dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2002, meliputi Desa Batuatas

Timur, Desa Batuatas Barat, Desa Batuatas Liwu, Desa Wacuala dan Desa Tolando. Kecamatan ini adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Sampolawa dengan keadaan geografis yang dikelilingi oleh Laut Flores sehingga wilayah Batuatas merupakan daerah terpencil di Kabupaten Buton.

Dengan dimekarkannya Batuatas menjadi kecamatan tersendiri maka masalah yang berkaitan pelayanan aparat kecamatan dengan masyarakat yang berada di pulau tersebut dapat teratasi. Selain persoalan pelayanan, telah banyak perubahan yang terjadi sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh *informan* nomor 158, menjelaskan bahwa:

”... telah terjadi perubahan yang besar di Batuatas saat ini dibanding dengan sebelum pemekaran, pertama pada segi pelayanan pemerintahan saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi ke Sampolawa yang jaraknya lebih dari 50 mil dengan kondisi laut yang tidak menentu. Sarana pendidikan meningkat, kalau dulu SMA tidak ada sekarang sudah ada tapi kami minta untuk juga ditambahkan dengan gurunya karena masih kurang, banyak yang pindah. Puskesmas dan beberapa Pustu serta dokter sudah ada, jalanan sudah diaspal sejauh 16 km sehingga melancarkan transportasi masyarakat. Penduduk yang dulu bermukim di luar, setelah jadi kecamatan mereka pada kembali dengan harapan membangun kampung halaman sendiri. Kondisi ini menjadikan Batuatas yang dulu sepi sekarang sudah ramai sehingga pasar-pasar kecil mulai tumbuh, dengan demikian masyarakat yang sebelumnya hanya berpencaharian di laut sekarang ada yang berdagang sembako. Kalau dulu semua dibeli di Sampolawa atau Bau-Bau. Sarana angkutan motor laut saat ini sudah ada yang beroperasi secara tetap setiap 2 hari. Kalau dulu tidak ada jadwal yang tetap tergantung ada tidaknya nelayan yang mau menjual ikannya di Bau-Bau. Dengan adanya motor laut yang tetap beroperasi maka nelayan sudah bisa berpendapatan Rp. 35.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari dibanding dulu cuma untuk makan saja ...” (*Wawancara tanggal 22 Desember 2008, Pendapat senada dengan informan tersebut disampaikan pula oleh informan nomor 159*).

Selain itu, *informan* nomor 76 menjelaskan pula bahwa:

”... kalau dibanding sebelum pemekaran dengan keadaan sekarang sangat jauh berbeda. Perubahan yang jelas terjadi pada aspek pelayanan pemerintahan sudah dekat, sarana dan prasarana umum bertambah

seperti sekolah, puskesmas posyandu, jalanan sudah diaspal sepanjang 16 km. Keadaan juga sudah ramai karena orang-orang Batuatas yang dulu tinggal di luar daerah mulai pulang kampung dengan membawa keberhasilan dari rantau. Sekarang sepeda motor sudah banyak, kalau dulu hanya motor dinas kesehatan 2 unit. Untuk tingkat pendapatan masyarakat bertambah karena adanya sarana angkutan yang ke Bau-Bau yang sudah tetap maka masyarakat lebih rajin melaut karena tidak takut lagi tidak laku dijual karena sudah lancar menjual hasilnya ke Bau-Bau. Yang menjadi persoalan hanya di sini belum ada pasar yang representatif, yang ada hanya pasar-pasar kecil. Kalau kios-kios di rumah penduduk sudah banyak, selain itu persoalan batas dengan Kabupaten Selayar Propinsi Sulawesi Selatan yang tepatnya di Pulau Kawikawia ...” (Wawancara tanggal 20 Desember 2008).

Adapun data perkembangan pembangunan pada bidang pendidikan di Kecamatan Batuatas, dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut:

Tabel 4. 20.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Batuatas

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK :						
	- Sekolah	-	-	-	5	5	
	- Guru	-	-	-	12	12	
	- Murid	-	-	-	271	271	
2.	SD :						
	- Sekolah	5	5	5	5	6	
	- Guru	27	26	33	35	34	
	- Murid	1785	1806	1.869	1982	1982	
3.	SLTP :						
	- Sekolah	1	1	1	1	1	
	- Guru	16	15	18	19	10	
	- Murid	427	423	413	443	530	
4.	SMU :						
	- Sekolah	-	1	1	1	1	
	- Guru	-	13	13	9	8	
	- Murid	-	41	52	90	90	

Sumber: Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Berdasarkan Tabel 4.20 tersebut, dapat diketahui bahwa setelah terbentuknya Kecamatan Batuatas perkembangan sarana pendidikan, yakni pendirian 1 unit SMA Swasta dan 5 unit TK yang merupakan swadaya masyarakat serta 1 unit SD dan peningkatan jumlah murid, sedangkan jumlah guru mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena hampir semua pegawai yang ditempatkan di Kecamatan Batuatas adalah berasal dari luar Batuatas sehingga mereka tidak betah menetap dan akhirnya bermohon untuk pindah tugas.

Adapun perkembangan pembangunan pada bidang kesehatan di Kecamatan Batuatas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.21 dan 4.22 berikut:

Tabel 4. 21
Kondisi Sarana Kesehatan
Kecamatan Batuatas Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	-	-
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	1	1	1	1
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	1	-	-	-	-
4	PUSTU	1	1	1	1	1
5	Posyandu	9	9	9	12	13
6	Puskesmas Boat /Speed Boat	-	-	-	1	1
JUMLAH		11	12	12	15	16

Sumber : Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Sarana kesehatan yang bertambah setelah terbentuknya Kecamatan Batuatas hanya posyandu sebanyak 4 buah dan penambahan *speedboat*/puskesmas boat.

Tabel 4.22
Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Batuatas Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	-	-	-	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	1	-	7
4	- PARA MEDIS	8	21	9	9	-
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	7	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	-	-	-	-	1
8	- PERAWAT	-	-	-	-	6
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	2
JUMLAH		8	28	10	9	16

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tenaga kesehatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.22 tersebut memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Pada tahun 2004 merupakan jumlah terbanyak menurut data statistik, tetapi menurut keadaan di lapangan tidak sebanyak itu karena mereka yang menurut SK penugasan dan data dari Dinas Kesehatan ditempatkan di Batuatas tidak menjalankan tugas, bahkan beberapa di antara mereka adalah pegawai yang dimutasi karena hukuman.

e. Kecamatan Wolowa

Kecamatan Wolowa dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasarwajo yang pada saat pembentukannya, terdiri atas 4 desa dan 1 desa persiapan, masing-masing:

1) Desa Kaombu; 2) Desa Wolowa; 3) Desa Matawia; 4) Desa Wolowa Baru; dan 5) Desa Persiapan/ Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sukamaju.

Adapun luas wilayah Kecamatan Wolowa yaitu 65,02 Km² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siotapina;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kapontori; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.

Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemekaran wilayah yakni sudah meningkatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta meningkatnya fasilitas pemerintah seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh *informan* di wolowa, antara lain sebagaimana yang diutarakan oleh *informan* nomor 27 berikut:

“... dengan terbentuknya Kecamatan Wolowa maka pelayanan pemerintah kepada masyarakat makin meningkat, masyarakat juga makin mudah berurusan dengan kantor kecamatan. Selain itu perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur meningkat seperti pembuatan jalan usaha tani sepanjang ± 10 Km, pengaspalan jalan, dan pembuatan perkantoran ... “ (*Wawancara tanggal 30 Nopember 2008*).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh *informan* nomor 161 yang diwawancarai tanggal 22 Desember 2008, bahwa:

“... sejak dijadikan kecamatan di wilayah Wolowa, sudah kelihatan perubahannya, yakni adanya kantor camat, adanya jalan usaha tani, peningkatan status PUSTU menjadi PUSKESMAS yang tentunya diiringi dengan penambahan fasilitasnya, dibukanya SMA meskipun masih swasta, dan yang paling kelihatan perubahannya yakni di UPT Sukamaju sehingga pada tahun 2006 telah dijadikan desa yang tadinya hanya Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) ... “

Informan nomor 146 sebagai mantan Camat Pasarwajo yang ketika itu wilayah pemerintahannya masih meliputi Wolowa, mengatakan, bahwa:

“... kalau dilihat dari aspek pelayanan, pembentukan Kecamatan Wolowa telah meningkatkan pelayanan, tapi dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, jujur kita katakan belum kelihatan karena aktifitas masyarakat belum banyak yang berubah. Kalaupun ada pembangunan di Wolowa skalanya masih kecil dan tidak berpengaruh banyak pada pendapatan masyarakat ...” (*Wawancara tanggal 12 Desember 2008*).

Keberadaan dan perkembangan pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Wolowa, dapat dilihat pada Tabel 4.23, Tabel 4.24 dan Tabel 4.25 berikut:

Tabel. 4.23.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Wolowa

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK						
	- Sekolah	-	2	4	5	5	
	- Guru	-	3	9	14	14	
	- Murid	-	36	64	146	115	
2.	SD :						
	- Sekolah	5	5	5	7	7	
	- Guru	16	21	37	42	42	
	- Murid	864	857	987	1138	1139	
3.	SLTP :						
	- Sekolah	1	1	1	1	1	
	- Guru	15	20	23	23	15	
	- Murid	279	268	282	293	284	
4.	SMU :						
	- Sekolah	-	-	-	1	1	
	- Guru	-	-	-	14	10	
	- Murid	-	-	-	114	203	

Sumber: *Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007*

Tabel 4. 24

Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Wolowa Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	1	1
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	-	-	-	-
4	PUSTU	1	1	1	1	1
5	Posyandu	-	-	-	-	9
6	Puskesmas Keliling/Mobil	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	1	2	11

Sumber: Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 25

Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Wolowa Tahun 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	-	-	-	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	-	-	1
4	- PARA MEDIS	-	-	-	7	10
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	1	1	1	-	3
8	- PERAWAT	-	-	1	1	7
9	- TNG KES. LAINNYA	1	1	1	1	2
JUMLAH		2	2	3	9	23

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Berdasarkan Tabel 4.24 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk sarana pendidikan belum banyak yang berubah, sedangkan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.25 dan Tabel 4.26 telah ada peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum pemekaran yang hingga sekarang ini umur Kecamatan Wolowa baru 4 tahun.

f. Kecamatan Wabula

Kecamatan Wabula dibentuk melalui Perda Nomor 16 Tahun 2004 dengan ibukota di Wabula dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Pasarwajo. Pada saat pembentukannya, Kecamatan Wabula terdiri dari 4 (empat) desa yaitu: (1) Desa Wabula, (2) Desa Wasuemba, (3) Desa Wasampela, dan (4) Desa Holimombo. Pada tahun 2006 Desa Holimombo mekar dan terbentuk desa baru yakni Desa Koholimombona.

Adapun batas-batas Kecamatan Wabula yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda.

Beberapa *informan* di Wabula telah memeberikan keterangan seputar keadaan Kecamatan Wabula setelah pemekaran, antara lain disampaikan oleh *informan* nomor 43 yang diwawancarai tanggal 28 Nopember 2008, menjelaskan:

“... pembentukan Kecamatan Wabula disambut gembira oleh masyarakat, meskipun dampak pemekaran kecamatan belum berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan tetapi dari sisi pelayanan sangat berpengaruh. Sebelum pemekaran, aparat pemerintah Kecamatan Pasarwajo jarang yang bekunjung ke Wabula karena di samping jaraknya yang cukup jauh juga karena jalanan ke sana sangat berbahaya karena ada pendakian Warope yang ketajamannya kira-kira 40° yang menyulitkan kendaraan mendaki. Setelah persiapan pemekaran, pendakian itu dipotong dan sekarang sudah tidak berbahaya. Dengan keadaan seperti itu kendaraan umum ke Wabula sudah lancar. Di Wabula sekarang sudah ada SMA Negeri dan PUSKESMAS, jalanan dan pelabuhan rakyat sudah diperbaiki dan Desa Wabula sudah lebih ramai ... “

Pendapat lain yang menyoroti tingkat pendapatan masyarakat dan perumahan yang dikaitkan dengan kultur budaya disampaikan oleh beberapa *informan*. Keterangan dari *informan* tersebut hampir sama, antara lain seperti diungkapkan oleh *informan* nomor 44 yang diwawancarai tanggal 29 Nopember 2008 sebagai berikut:

“... dari segi pendapatan masyarakat, bukan tidak meningkat tetapi peningkatan itu kurang kelihatan karena adanya kultur kebiasaan masyarakat yang malu diketahui orang lain. Biasanya peningkatan pendapatan seseorang berpengaruh pada pola hidup dan kondisi perumahan, kalau di sini keadaan seperti itu masih tabuh, walaupun mau dilihat yakni dengan kemampuan orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi yang dulu-dulu sangat kurang karena tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ...”

Untuk melihat keberadaan dan perkembangan pembangunan pada bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Wabula, dapat dilihat pada Tabel 4.26, Tabel 4.27 dan Tabel 4.28 berikut:

Tabel. 4. 26.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Wabula

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK : Sekolah	1	2	2	3	3	
	Guru	2	3	4	7	7	
	Murid	36	64	81	128	155	
2.	SD : Sekolah	4	5	5	6	7	
	- Guru	28	32	49	58	58	
	- Murid	487	657	693	891	891	
3.	SLTP : Sekolah	1	1	1	1	1	
	- Guru	19	19	26	28	34	
	- Murid	149	242	228	213	221	
4.	SMU : Sekolah	1	1	1	1	1	
	- Guru	7	12	14	14	18	
	- Murid	42	94	137	156	200	

Sumber: Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 27

Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Wabula 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	1	1	1	1	1
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	-	-	-	-
4	PUSTU	1	1	1	2	2
5	Posyandu	-	-	-	-	10
6	Puskesmas Keliling /mobil	-	1	1	1	1
JUMLAH		2	3	3	4	14

Sumber : Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 28

Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Wabula 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	-	-	-	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	-	-	1
4	- PARA MEDIS	1	1	1	6	6
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	2	-
7	- BIDAN	1	2	2	2	3
8	- PERAWAT	1	1	2	-	3
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	1
JUMLAH		3	4	5	10	14

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Berdasarkan Tabel 4.26 tersebut terlihat tidak adanya perubahan pada bidang pendidikan kecuali penambahan jumlah murid untuk semua jenjang pendidikan sedangkan pada bidang kesehatan yang ditunjukkan pada Tabel 4.27 dan Tabel 4.28 menunjukkan peningkatan. Tahun 2006 jumlah

posyandu tidak ada menjadi 10 unit pada Tahun 2007, sedangkan tenaga kesehatan bertambah 4 orang.

g. Kecamatan Mawasangka Timur

Pembentukan Kecamatan Mawasangka Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 yang beribukota Di Lamena, terdiri dari (1) Desa Lasori, (2) Desa Inulu, (3) Desa Wantopi, (4) Desa Bungi, (5) Desa Bonemarambe, (6) Desa Wambuloli, dan (7) Desa Lagili.

Adapun batas-batas Kecamatan Mawasangka Timur adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Mawasangka Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lianabanggai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Spelman; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Lasongko.

Kecamatan Mawasangka Timur adalah merupakan hasil pemekaran Kecamatan Mawasangka dengan jarak antara ibukota Kecamatan Mawasangka dengan Mawasangka Timur adalah \pm 40 km. Kondisi jalanan sebelum pemekaran kecamatan sangat rusak dan tidak aman untuk dilalui kendaraan sehingga menyulitkan aparat pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan aparat desa, sebaliknya aparat desa sangat sulit berkoordinasi dengan aparat kecamatan.

Dengan rentang kendali yang sangat jauh dan kondisi infrastruktur pemerintah dan pembangunan yang sangat minim menjadi alasan utama pembentukan Kecamatan Mawasangka Timur. Menurut *informan* nomor 93 menjelaskan:

“... keterbelakangan masyarakat Mawasangka Timur ketika awal pembentukan kecamatan terlihat dari kekumuhan desa dan kondisi perumahan serta fasilitas umum lainnya. Bayangkan, Lamena saja sebagai ibukota kecamatan sudah jarang rumah yang punya jamban keluarga dan sumur, apalagi desa-desa lain, padahal hubungan dengan Bau-Bau lancar karena setidaknya ada 2 unit motor laut yang ke Bau-Bau setiap harinya. Oleh karena itu program kerja pertama saya memberi motivasi masyarakat untuk merubah pola hidup masyarakat pedesaan ke arah yang lebih maju. Setiap rumah harus dibersihkan dan ditata halamannya, membuat jamban dan membuat pagar serta merelakan halamannya untuk pelebaran jalanan. Semangat gotong royong dikembangkan sehingga pada saat MTQ tingkat Kabupaten di Lombe pada Tahun 2005, ketika itu baru kira-kira 6 bulan kecamatan di bentuk, kafilah Kecamatan Mawasangka Timur merupakan yang terbesar karena segala sesuatunya didukung penuh oleh masyarakat, baik yang ada di kecamatan maupun warga yang ada di tempat lain. Sekarang ini perkembangan di Kecamatan Mawasangka Timur sudah cukup maju dan dapat disejajarkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Buton ... “ (*Wawancara tanggal 30 Nopember 2008*).

Selanjutnya, *informan* nomor 94 yang diwawancarai tanggal 4 Desember 2008) menjelaskan bahwa:

“... selain faktor pelayanan pemerintahan yang makin baik, dana-dana untuk membiayai pembangunan cukup banyak yang diturunkan di Kecamatan Mawasangka Timur. Di sini ada pembuatan dermaga baru, gedung SMP, Kantor Camat, rehab SD, pembuatan jalan usaha tani dan pengaspalan jalan yang cukup panjang lebih 10 km. Program-program pemberdayaan juga banyak yang masuk di kecamatan seperti PPK, *Coremap* maupun bantuan dari Dinas Sosial dan Perikanan. Mata pencaharian masyarakat sudah banyak yang berubah, dari petani tradisional menjadi petani rumput laut sehingga penghasilan bertambah 2 sampai 3 kali lipat ... “

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh *informan* nomor 95, *informan* nomor 96, *informan* nomor 107, *informan* nomor 108, *informan* nomor 109, *informan* nomor 110, *informan* nomor 111, *informan* nomor 112, dan *informan* nomor 113 yang kesemuanya diwanwancarai pada tanggal 3 dan 4 Desember 2008.

Sebagai perbandingan atas pernyataan *informan* mengenai keberadaan dan perkembangan pembangunan pada bidang pendidikan di Kecamatan Mawasangka Timur, dapat dilihat pada Tabel 4.29.

Tabel. 4. 29.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Mawasangka Timur

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK :						
	- Sekolah	1	1	1	7	7	
	- Guru	1	1	5	18	18	
	- Murid	39	44	81	285	130	
2.	SD :						
	- Sekolah	8	8	8	9	9	
	- Guru	33	34	42	38	38	
	- Murid	1122	1036	976	950	950	
3.	SLTP :						
	- Sekolah	1	1	1	1	2	
	- Guru	13	10	15	14	15	
	- Murid	183	170	171	193	233	
4.	SMA :						
	- Sekolah	-	-	-	1	1	
	- Guru	-	-	-	5	8	
	- Murid	-	-	-	81	50	

Sumber : Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Secara umum, jumlah sekolah di Kecamatan Mawasangka Timur yang mengalami peningkatan adalah TK sebanyak 6 unit dan SMA Swasta sebanyak 1 unit. Adapun jumlah guru relatif tidak berkembang, sedangkan jumlah murid menurun, kecuali murid SLTP yang bertambah jumlahnya khususnya pada Tahun 2007.

Untuk mengetahui perkembangan pembangunan pada bidang kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.30 dan Tabel 4.31.

Tabel 4.30
Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Mawasangka Timur 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	-	-
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	1	1	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	1	-	-	1
4	PUSTU	3	3	3	3	3
5	Posyandu	10	10	10	10	10
6	Mobil Puskesmas keliling	-	-	-	-	1
7	Puskesmas Boat /Speed Boat	1	1	1	2	2
JUMLAH		14	15	15	16	17

Sumber: Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4.31
Keadaan Tenaga Kesehatan
Kecamatan Mawasangka Timur 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	1	1	1	-	-
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	1	2	2	-	1
4	- PARA MEDIS	4	4	7	11	10
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	-	-
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	-
7	- BIDAN	-	-	-	-	5
8	- PERAWAT	-	-	-	-	5
9	- TNG KES. LAINNYA	-	-	-	-	1
JUMLAH		6	7	10	11	22

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Berdasarkan Tabel 4.30, memperlihatkan bahwa sejak pemekaran terdapat peningkatan sarana kesehatan yaitu penambahan mobil puskesmas dan *speed boat*. Menurut *informan* nomor 109 saat diwawancarai

tanggal 4 Desember 2008 menjelaskan bahwa adanya kebijakan penambahan *Speed boat* di Kecamatan Mawasangka Timur karena selama ini pemanfaatannya juga digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Mawasangka apabila ada pasien yang hendak dirujuk ke RSUD Bau-Bau.

h. Kecamatan Sangia Wambulu

Kecamatan Sangia Wambulu merupakan pemekaran Kecamatan Gu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 dengan ibukotanya berkedudukan di Tolandona. Pada awal pembentukannya, Kecamatan Sangia Wambulu terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu: 1) Desa Tolandona, 2) Desa Baruta, 3) Desa Baruta Lestari, 4) Desa Baruta Analalaki, dan 5) Desa Doda Bahari.

Kemajuan Desa Tolandona sebagai ibukota kecamatan begitu pesat sehingga pada Tahun 2005 Desa Tolandona memekarkan satu desa dengan terbentuknya Desa Tolandona Matanaeo melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 29 Juni 2005, dan pada tahun yang sama status Desa Tolandona berubah menjadi Kelurahan Tolandona melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tanggal 27 Oktober 2005.

Adapun batas-batas Kecamatan Sangia Wambulu adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lakudo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Buton;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Buton.

Informan nomor 157 (*Wawancara tanggal 23 Desember 2008*) menjelaskan panjang lebar seputar pembentukan Kecamatan Sangia Wambulu, sebagai berikut:

”... proses pembentukan Sangia Wambulu cukup alot, mulai dari persoalan nama dan ibukota sampai pada cakupan wilayah karena ada 2 desa yang keluar, ... perkembangan pembangunan sudah cukup memadai yang ditandai dengan perubahan drastis di Tolandona. ... Puskesmas sudah ditingkatkan, SMA sudah ada, jalanan ada yang baru dibuka dan ada yang diaspal, pasar sudah ada tiap hari ... dan berkurangnya persoalan sosial dan kriminalitas. Setelah pemekaran, perkelahian antar kampung sudah tidak ada, ini semua karena di samping sudah ada aparat polsek dengan jumlah personil yang cukup, juga karena setelah ada pemerintah kecamatan maka segala persoalan cepat diselesaikan ... ”
 [Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh *informan* nomor 116, *informan* nomor 117, *informan* nomor 118 dan *informan* nomor 119, yang diwawancarai tanggal 5 dan 6 Desember 2008].

Gambaran dari perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan dibidang pendidikan, ditunjukkan pada Tabel 4.32 berikut:

Tabel. 4. 32.

Perkembangan Jumlah Sekolah, Guru dan Murid untuk Jenjang Pendidikan TK, SD, SLTP dan SMU Tahun 2003 – 2007 di Kecamatan Sangia Wambulu

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					KET
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	TK : Sekolah	4	4	5	5	7	
	Guru	5	5	7	13	13	
	Murid	99	134	186	161	147	
2.	SD : Sekolah	6	6	7	7	7	
	Guru	36	42	56	48	48	
	Murid	952	873	1150	964	1004	
3.	SLTP : Sekolah	1	1	2	2	2	
	Guru	18	18	27	28	30	
	Murid	359	378	409	387	317	
4.	SMU : Sekolah	-	-	1	1	1	
	Guru	-	-	10	13	7	
	Murid	-	-	217	215	160	

Sumber: *Diolah dari Wawancara serta Data Dinas Dikbud dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007*

Data Tabel 4.32 tersebut, memperlihatkan bahwa pada tahun 2005 Kecamatan Sangia Wambulu belum ada SMA. Menurut *informan* nomor 133 (*Wawancara tanggal 6 Desember 2008*) menjelaskan bahwa SMA Swasta Sangia Wambulu dibentuk pertama akhir tahun 2005 dengan siswanya merupakan murid-murid SMAN Lombe yang berasal dari Tolandona. Dengan demikian awalnya siswa di SMA tersebut merupakan titipan dari SMAN Lombe. Tahun 2006 mulai menerima murid baru termasuk siswa titipan dari SMAN Lombe yang menduduki kelas 2 sehingga jumlah muridnya mencapai 215 orang. Setelah tahun 2007, siswa SMA Lombe yang telah kelas 3 dikembalikan sehingga jumlah murid secara keseluruhan berkurang. Secara umum yang meningkat di Kecamatan Sangia Wambulu adalah TK dan SMA.

Gambaran perkembangan sarana kesehatan di Kecamatan Sangia Wambulu dapat dilihat pada Tabel 4.33 dan Tabel 4.34, sebagai berikut:

Tabel 4.33

Keadaan Sarana Kesehatan
Kecamatan Sangia Wambulu 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Puskesmas Non Perawatan	1	1	1	1	1
2	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Perawatan Persalinan	-	-	-	-	-
4	PUSTU	-	-	-	1	1
5	Posyandu	3	3	7	11	11
6	Mobil Puskesmas	-	-	1	1	1
7	Puskesmas Boat /Speed Boat	-	-	-		1
JUMLAH		4	4	9	14	15

Sumber: Diolah dari data Dinkes dan BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 34.

KeadaanTenaga Kesehatan
Kecamatan Sangia Wambulu 2003 -2007

NO	ITEM	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	- DOKTER UMUM	1	1	1	1	1
2	- DOKTER GIGI	-	-	-	-	-
3	- SKM	-	-	-	-	-
4	- PARA MEDIS	2	5	7	13	11
5	- PEMB. PARA MEDIS	-	-	-	1	1
6	- TNG NON KES. LAINNYA	-	-	-	-	1
7	- BIDAN	1	1	1	1	1
8	- PERAWAT	2	1	2	-	8
9	- TNG KES. LAINNYA	1	1	1	1	1
JUMLAH		7	9	12	16	24

Sumber: Diolah dari data BPS Kab. Buton Tahun 2003-2007

Tabel 4. 33 menunjukkan keadaan sarana kesehatan di Kecamatan Sangia Wambulu yakni pada tahun 2007 mendapat tambahan *speed boat*, sedangkan Tabel 4. 34 memperlihatkan tenaga kesehatan yang keadaannya mengalami peningkatan dengan penambahan tenaga bidan dan perawat pada tahun 2007 sebanyak 9 orang.

3. Evaluasi Kebijakan Pemekaran

Setiap kebijakan setelah dirumuskan dan diimplementasikan, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Dunn (2003 : 609-611) menjelaskan bahwa:

”ada 3 fungsi utama dalam melakukan evaluasi, 1) akan didapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan dengan mengungkapkan tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang ingin dicapai, 2) memberi sumbangan pada *klarifikasi* dan *kritik* terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target tersebut, dan 3) memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis lainnya, termasuk perumusan masalah baru dan rekomendasi.”

Pendapat umum memandang bahwa sebuah kebijakan akan dikatakan baik apabila hasil yang didapatkan sesuai dengan perencanaan, namun pada kenyataannya banyak pihak yang takut atau segan terhadap evaluasi kinerja. Keban (2008 : 215), mengatakan bahwa "hal tersebut disebabkan oleh adanya tradisi bahwa evaluasi memberikan justifikasi tentang apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan dan siapa yang harus diberikan sanksi atau harus ada yang diberikan insentif karena keberhasilan suatu kebijakan".

Pelaksanaan kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja kebijakan pemekaran yakni perumusan dan pembuatan usulan kebijakan dalam bentuk rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan antara pemerintah dan DPRD, persetujuan dan penetapan peraturan daerah serta hasil-hasil yang ditimbulkannya. Fase perumusan dan pembuatan usulan kebijakan dimulai dengan kegiatan pengumpulan berbagai masukan (*input*) berupa aspirasi masyarakat yang tertuang dalam proposal pemekaran, aturan-aturan pendukung serta berbagai pertimbangan dan analisa kelayakan hingga dihasilkannya rumusan kebijakan dalam bentuk rancangan peraturan daerah. Adapun personil yang terlibat pada fase ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan pemekaran yang membuat proposal serta tim pemekaran yang beranggotakan aparat pemerintah daerah terkait yang bertugas membahas proposal, melakukan peninjauan dan penelitian lapangan untuk menilai kelayakan pemekaran. Pada fase ini telah dilaksanakan monitoring untuk melihat proses yang dilakukan dengan merujuk pada pedoman yang ada.

Fase pembahasan dan penetapan kebijakan merupakan fase yang menentukan diterima atau ditolaknya sebuah kebijakan. Pada fase ini rancangan peraturan daerah yang telah dibuat oleh tim pemerintah diajukan ke DPRD yang kemudian dilaksanakan proses pembahasan dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Beberapa rancangan peraturan daerah tentang pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah dilakukan menurut mekanisme tersebut dan telah sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa pertanyaan yang dikemukakan oleh Dunn (2003 : 610) untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan pada tahap monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi panduan, yakni sebagai berikut:

”apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? ”

Beberapa pertanyaan Dunn tersebut relevan dengan permasalahan yang dievaluasi, dan berdasarkan informasi dan fakta yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terbentuknya 13 kecamatan hasil pemekaran yang didukung dengan penempatan personil beserta kewenangannya, pembiayaan, perkantoran dan sarana perlengkapannya.

Terkait dengan kewenangan kecamatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan kecamatan sebagai perangkat daerah otonom kabupaten/kota yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, unit kerja kecamatan yang dipimpin oleh camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah serta menjalankan tugas umum pemerintahan yaitu:

- a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) mengkoordinasikan penerapan dan penyakkan peraturan perundang-undangan;
- d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Segala kewenangan aparat pemerintah kecamatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya kesiapan anggaran. Berdasarkan keterangan para camat serta diperkuat keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton, setiap kecamatan mendapat dana rutin dari pemerintah kabupaten yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.35. Mekanisme penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap setiap triwulan yang hingga saat ini penyaluran berjalan lancar sesuai ketentuan. Selain dana

rutin tersebut, pemerintah kecamatan tidak memperoleh dana-dana lain namun untuk kondisi tertentu, dengan persetujuan kepala daerah atau sekretaris daerah para camat dapat memperoleh dana khusus yang diambil atau merupakan pengalihan dari pos anggaran lain.

Tabel 4.35.

Anggaran Rutin Kecamatan Tahun 2004 s.d Tahun 2007

NO	NAMA KECAMATAN	ANGGARAN PERTAHUN (Juta Rupiah)					KOMENTAR CAMAT
		2004	2005	2006	2007	2008	
1	LASALIMU SELATAN	32	28	31	50	85	Cukup
2	WOLOWA	10	28	31	50	65	Harus cukup
3	WABULA	10	28	31	50	65	Harus cukup
4	SIOMPU	28	28	31	50	65	Cukup
5	BATUATAS	10	28	31	50	65	Belum cukup
6	SANGLA WAMBULU	10	28	31	50	65	Cukup
7	MAWASANGKA TENGAH	10	28	31	50	70	Harus cukup
8	TALAGA PAYA	28	28	31	50	70	Belum cukup

Sumber: BPKAD Kab. Buton Tahun 2008

Permasalahan pembiayaan terlihat lebih jelas pada besaran anggaran yang diberikan. Beberapa camat yang dimintai komentar hampir seluruhnya menyatakan bahwa anggaran tidak cukup, tetapi para camat harus pandai-pandai mencukupkan anggaran manakala diperhadapkan dengan keharusan menjalankan TUPOKSI dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang kurang ini merupakan

permasalahan umum yang dirasakan hampir setiap satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Buton. Seperti dijelaskan oleh *informan* nomor 137 bahwa:

”kekurangan anggaran tidak hanya terjadi pada kecamatan, tetapi juga pada hampir setiap SKPD yang disebabkan oleh keterbatasan APBD, namun demikian, dengan anggaran yang ada diharapkan setiap SKPD dapat memanfaatkannya dengan baik serta memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi kinerja pemerintahan.” (*Wawancara, tanggal 12 Desember 2008*).

Jika mengamati tabel 4.35, pada tahun 2004 terdapat perbedaan jumlah anggaran rutin yang diterima oleh tiap kecamatan. Menurut *informan* nomor 145 (*wawancara tanggal 18 Desember 2008*) dan *informan* nomor 148 (*wawancara tanggal 11 Desember 2008*) perbedaan jumlah anggaran rutin dilihat dari keberadaan kecamatan tersebut. Pada tahun 2004, Kecamatan Lasalimu Selatan mendapatkan anggaran Rp 40 juta karena kecamatan tersebut telah terbentuk sejak tahun 2001 sehingga keberadaannya dipersamakan dengan kecamatan-kecamatan yang telah lama terbentuk. Kecamatan Siompu dan Talaga Raya yang sudah berumur 2 tahun mendapat anggaran yang sama sebesar Rp 28 juta sedangkan kecamatan yang baru terbentuk di tahun 2004 mendapat anggaran pertama sebanyak Rp 10 juta. Pada tahun 2005, secara umum porsi anggaran untuk semua SKPD termasuk kecamatan mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten Buton membiayai anggaran Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi serta pemindahan ibukota Kabupaten Buton dari Bau-Bau ke Pasarwajo.

Menurut *informan* nomor 138 bahwa ”besarnya anggaran tahun 2008 yang diterima oleh tiap kecamatan tidak merata yang berkisar antara

Rp. 65 juta sampai Rp. 85 juta. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan jumlah tenaga honorer yang bekerja di kantor kecamatan dan bantuan lain yang tiap-tiap kecamatan berbeda”, (*Wawancara, tanggal 11 Desember 2008*).

Adapun fasilitas sarana prasarana kebutuhan dasar lainnya seperti penambahan atau pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan telah berjalan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah, termasuk pembukaan dan perbaikan jalan, jembatan, dermaga, dan PDAM, sedangkan penyambungan listrik dari PLN disesuaikan dengan kapasitas daya dukung mesin PLN.

C. HUBUNGAN PEMEKARAN WILAYAH/KECAMATAN DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Saat ini telah banyak pakar yang berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pemekaran mempunyai keterkaitan erat dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi suatu kawasan. Beberapa faktor tadi antara lain, peran perencanaan, transportasi, investasi daerah, *social capital* (modal sosial), pajak dan sebagainya.

Pendapat yang lebih tegas mengenai hubungan antara pemekaran wilayah dengan titik pertumbuhan ekonomi adalah seperti dikemukakan oleh Arsyad (1997 : 357) sebagai berikut:

“Bagi NSB, supaya pembangunan tidak hanya menumpuk pada suatu daerah, maka perlu campur tangan pemerintah terutama untuk membantu perkembangan daerah-daerah yang sulit berkembang. Campur tangan pemerintah tersebut dapat dilakukan baik dengan cara mencegah aglomerasi pada daerah tertentu maupun mendorong timbulnya pusat pertumbuhan pada daerah tertentu.”

Arsyad yakin bahwa campur tangan langsung pemerintah dapat merangsang penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Salah satu tindakan penyebaran pusat pertumbuhan yang sejalan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah adalah kebijakan perangsang institusional. Perangsang jenis ini satu di antaranya berhubungan dengan administrasi pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah penataan dan pemekaran wilayah pemerintahan.

Berkaitan dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, secara teoritis, kesejahteraan absolut dapat dipercepat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui efisiensi, sedangkan kesejahteraan relatif atau keadilan dapat diakselerasi melalui pendistribusian pendapatan yang lebih merata. Secara teoritis mengenai optimalisasi kesejahteraan ini telah dikembangkan oleh Bergson dan Samuelson yang terkenal dengan *Bergson-Samuelson Curve*-nya (Richard W. Trech, 2002 dalam LAN, 2004 : 4). Pendapat tersebut, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya ada hubungan yang positif dengan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai dengan adanya pemekaran wilayah adalah untuk mendorong munculnya titik-titik pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan yang bersifat absolut yang dinikmati oleh setiap individu dan kelompok masyarakat, maupun kesejahteraan yang bersifat relatif dalam arti pemerataan kesejahteraan atau keadilan.

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai kebijakan pemekaran dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu dikemukakan kembali beberapa indikator yang mempengaruhi kesejahteraan,

yakni tingkat pendapatan masyarakat, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar serta perumahan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif-deskriptif, sehingga proses analisis telah dilaksanakan sejak pengumpulan data. Dari data dan fakta yang ditemukan di lapangan, memperlihatkan hubungan yang positif antara pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan ini ditetapkan setelah dilakukan beberapa tahapan analisa data, baik data yang dikumpulkan pada saat wawancara dengan *informan* maupun data sekunder yang didapat dari mengkaji catatan atau laporan dari lembaga maupun instansi yang berwenang, seperti Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Kantor BAPPEDA, Kantor BPS, Dinas-dinas, maupun data di kantor kecamatan, UPTD dan Puskesmas.

Secara umum, hasil analisis terhadap beberapa indikator kesejahteraan yang mendukung kesimpulan di atas pada kecamatan wilayah pemekaran dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan adalah merupakan indikator yang paling dominan diperhitungkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat karena hal ini berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ditinjau dari segi pendapatan masyarakat, dari 136 informan yang diwawancarai dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam, mengemukakan bahwa setelah adanya pemekaran kecamatan, telah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut bervariasi untuk tiap kecamatan sebagaimana diungkapkan oleh 42 *informan*..

Menurut *informan* nomor 1 yang wawancarai tanggal 24 Nopember 2008 mengatakan bahwa: "Untuk di Kecamatan Lasalimu Selatan, pendapatan rata-rata penduduk di Lasalimu Selatan yang telah bekerja meningkat dari Rp. 10.000,- per hari sebelum dilakukan pemekaran, sekarang ini sudah mencapai Rp. 35.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari", sedangkan *informan* nomor 146 mengatakan:

" ... kalau dilihat dari aspek pelayanan, pembentukan Kecamatan Wolowa dan Wabula telah meningkatkan pelayanan, tapi dampaknya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, belum kelihatan perubahannya karena aktifitas masyarakat belum banyak yang berubah. Walaupun ada pembangunan fasilitas pemerintah, volumenya masih kecil dan tidak berpengaruh banyak pada kenaikan pendapatan masyarakat ..."
(Wawancara tanggal 12 Desember 2008).

Pendapatan yang bervariasi ini hampir berlaku untuk semua kecamatan pemekaran, dan berdasarkan analisis yang didapat dari pernyataan para *informan* maupun kondisi di lapangan, prosentase pendapatan mengalami kenaikan antara 15% - 50% (Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Batuatas); 35% - 75% (Kecamatan Siompu, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangia Wambulu), serta 50% - 125% (Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Talaga Raya).

Hasil pantauan di lapangan, untuk Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Batuatas belum ada pasar yang memadai, yang ada hanya para penjual lapak-lapak yang jumlahnya tidak sampai 10 orang di lokasi yang menurut mereka sebagai lokasi persiapan pasar kalau sudah di programkan pemerintah. Mata pencaharian masyarakat di ketiga kecamatan tersebut belum banyak yang berubah. Di Kecamatan Batuatas, mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah nelayan yang sangat

dipengaruhi oleh cuaca, sedangkan untuk di Wolowa dan Wabula mata pencaharian masyarakat sebahagian besar adalah petani dan nelayan tradisional.

Perbandingan peningkatan pendapatan sebelum dan setelah pemekaran yang cukup besar dialami oleh masyarakat di Kecamatan Lasalimu Selatan dan Kecamatan Talaga Raya. Berkaitan dengan peningkatan pendapatan di Kecamatan Talaga Raya, *informan* nomor 59 mengatakan:

”... pasar sekarang sudah lancar tiap hari, demikian pula motor-motor yang ke Kota Bau-Bau sudah beberapa unit, kemudian ada juga pengusaha ikan yang masuk dan yang paling penting bahwa di Talaga sudah beroperasi tambang nikel dengan standar gaji minimal Rp. 35.000 per hari untuk buruh dan tenaga terampil sampai Rp.70.000, per hari ... ” (*Wawancara tanggal 14 Desember 2008*).

Mengacu pada keterangan *informan* dan analisis fakta yang ada di masyarakat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi di Kecamatan Talaga Raya karena adanya pasar yang sudah berlangsung setiap hari dan lancarnya kendaraan/transportasi ke Kota Bau-Bau yang menghidupkan urat nadi perdagangan. Selain itu, hadirnya pengusaha yang bergerak dibidang perikanan maupun pertambangan nikel ikut mendongkrak pendapatan masyarakat di Talaga Raya. Kemudian untuk Kecamatan Lasalimu Selatan, hal yang paling berpengaruh atas peningkatan prosentase pendapatan lebih disebabkan karena pemekarannya terjadi sejak tahun 2001 dan Ambuau sebagai ibukota kecamatan sudah ramai. Selain itu, sarana jalanan dan jembatan sudah memadai yang membuka isolasi, sehingga petani-petani yang sebagian besar transmigran tidak kesulitan lagi memasarkan hasil kebunnya. Program-program pemberdayaan juga cukup mengangkat tingkat pendapatan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh *informan* nomor 94 berikut:

“... Program-program pemberdayaan juga banyak yang masuk di kecamatan seperti PPK, *Coremap* maupun bantuan dari Dinas Sosial dan Perikanan. Mata pencaharian masyarakat sudah banyak yang berubah, dari petani tradisional dengan hasil yang kadang hanya untuk dimakan menjadi petani rumput laut dengan hasil berkisar Rp. 1.500.000,- sampai Rp. 3.000.000,- per bulan sehingga penghasilan bertambah 2 sampai 3 kali lipat ... “ (*Wawancara tanggal 4 Desember 2008*).

Secara umum peningkatan pendapatan masyarakat pada kecamatan pemekaran sebelum dan setelah pemekaran tergambar pada tabel 4.36 berikut:

Tabel 4.36

Pendapatan Rata-Rata Masyarakat Pada Kecamatan Pemekaran Sebelum Dan Sesudah Pemekaran

NO	KECAMATAN	PENDAPATAN RATA-RATA PERBULAN		KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	LASALIMU SELATAN	225.000 *)	1.250.000	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008
2	TALAGA RAYA	400.000 **)	1.500.000	
3	SIOMPU	400.000 **)	1.100.000	
4	BATUATAS	350.000 **)	700.000	
5	MAWASANGKA TIMUR	400.000 **)	1.200.000	
6	WAMBULA	550.000 ***)	750.000	
7	WOLOWA	600.000 ***)	750.000	
8	SANGIA WAMBULU	600.000 ***)	1.200.000	

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2001 s/d Tahun 2008 dan wawancara di lapangan

Data pada Tabel 4.36 tersebut merupakan hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat/*informan* yang mewakili petani, nelayan, pedagang, PNS dan wiraswasta lainnya ditiap kecamatan pemekaran. Penentuan besaran pendapatan rata-rata didapatkan dari hasil bagi rata-rata atas pengakuan/pernyataan *informan* yang mewakili tiap bidang pekerjaan.

Selain menganalisis pernyataan para *informan* yang menerangkan penghasilan/pendapatan yang berhubungan dengan mata pencaharian masyarakat, penulis juga mengkaji keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kecamatan pemekaran. Banyaknya obyek PBB serta target pajak dan realisasi pembayaran PBB oleh masyarakat setidaknya dapat menunjukkan tingkat kemampuan/pendapatan masyarakat. Analisis mengenai target dan realisasi PBB tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3

Berdasarkan Lampiran 3, pada Kecamatan Wolowa dan Kecamatan Wabula memperlihatkan realisasi pembayaran PBB yang kurang baik sejak kedua kecamatan tersebut lepas dari Kecamatan Pasarwajo. Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Sangia Wambulu, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Talaga Raya realisasi pembayaran PBB menurun pada tahun 2007 dan tahun 2008, tetapi target PBB meningkat, bahkan untuk Kecamatan Lasalimu Selatan target PBB tahun 2008 meningkat 211% dibanding tahun 2007 dan realisasi pembayarannya meningkat hingga 146%. Kecamatan Batuatas dan Kecamatan Mawasangka Timur realisasi PBB 100% setiap tahun, tetapi PBB sangat rendah yakni rata-rata tiap obyek pajak untuk Kecamatan Batuatas Rp. 2.480,- dan untuk Mawasangka Timur Rp. 3.710,-.

Mengamati keberadaan PBB dikaitkan dengan persoalan tingkat pendapatan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan oleh para *informan*, menunjukkan adanya kesesuaian antara prosentase tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat dengan rata-rata realisasi pembayaran PBB atas obyek pajak terhadap rata-rata target PBB atas obyek pajak sebagaimana diperlihatkan pada Lampiran 4.

Berdasarkan Lampiran 4, dapat dilihat bahwa prosentase peningkatan rata-rata pendapatan per tahun Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangia Wambulu sebesar 50% ke atas sedangkan Kecamatan Siompu, Kecamatan Batuatas, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Wolowa di bawah 50%, sementara prosentase realisasi pajak terhadap target pajak pada Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Mawasangka Timur dan Kecamatan Sangia Wambulu berada di atas 100% sedangkan Kecamatan Siompu, Kecamatan Batuatas, Kecamatan Wabula dan Kecamatan Wolowa berada 100% ke bawah. Data dan fakta tersebut menunjukkan kesesuaian antara kenaikan rata-rata pendapatan dengan kenaikan rata-rata realisasi PBB terhadap target PBB.

Hasil wawancara dengan 136 *informan* ditemukan beberapa kesimpulan yang memperlihatkan tingkat keterpengaruhan derajat kesejahteraan oleh tingkat pendapatan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.37.

Tabel 4. 37

Prosentase kenaikan pendapatan setelah pemekaran

NO	Tingkat Pengaruh	Prosentase kenaikan Pendapatan	Jumlah Pengakuan informan	
			orang	%
1	Sangat berpengaruh	80 % keatas	54	39,7
2	Cukup berpengaruh	40 - 80 %	21	15,4
3	Berpengaruh	15 – 40 %	43	31,6
4	Relatif berpengaruh	sampai 15 %	16	11,8
5	Tidak/Belum berpengaruh	0 %	2	1,5
J u m l a h			136	100

Sumber: *Data diolah dari hasil wawancara dengan informan*

Tabel 4. 37 tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar *informan* (39,7%) mengakui pemekaran *sangat berpengaruh* terhadap peningkatan pendapatan dengan prosentase kenaikan pendapatan di atas 80%, sedangkan yang menyatakan belum hanya 2 orang (1,5 %).

2. Sarana dan Prasarana Dasar

Sarana dan prasarana dasar sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pembahasan ini dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu (1) sarana dan prasarana dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sebagai petunjuk bahwa dengan terpenuhinya sarana tersebut merupakan bukti atas keberdayaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti telah terpasangnya PLN dan PDAM (sumber air) di rumah serta adanya jamban keluarga; (2) sarana dan prasarana dasar yang telah dibangun di kecamatan setelah pembentukan kecamatan, yang turut mempengaruhi aktifitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya. Sarana-prasarana tersebut dibangun atau disediakan oleh pemerintah, seperti pembuatan/perbaikan jalan, jembatan, dermaga, pasar, serta fasilitas listrik dan air. Keberadaan sarana tersebut sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh *informan* nomor 142, yakni:

”... peningkatan sarana kesehatan seperti status PUSTU menjadi PUSKESMAS, perbaikan PUSTU, pembuatan posyandu, pembukaan pasar baru, dibidang perhubungan yakni pembuatan jalan penambahan/perbaikan dermaga, paling berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat di Kecamatan Talaga Raya ... ” (*Wawancara tanggal 13 Desember 2008*).

Pendapat yang sama disampaikan oleh *informan* nomor 164, yakni:

“... setelah pemekaran maka masyarakat Siompu dan Kadatua sudah merasakan dampak positifnya antara lain yang paling terasa adalah aspek pelayanan pemerintahan yang tidak perlu lagi ke Batauga yang membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dana-dana pembangunan juga sudah banyak yang turun seperti sekarang ini sudah 16 km jalan yang diaspal di Siompu, sudah ada 2 SMA, 2 Puskesmas, perbaikan dermaga, dan tidak kalah pentingnya yakni pendapat masyarakat meningkat ...” (*Wawancara tanggal 23 Desember 2008*).

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana oleh pemerintah, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Di semua kecamatan pemekaran telah dilaksanakan pembukaan jalan baru (jalan usaha tani dengan panjang 3 km sampai 22 km, dan jalan pengerasan 2 km sampai 16 km) serta perbaikan jalan (meliputi pengaspalan jalan 2 km sampai 12 km dan rabat beton 3 km sampai 16 km); perbaikan/pengadaan pasar di tiap kecamatan (kecuali Wolowa, Wabula dan Batuatas) termasuk pembenahan hari pasar dari 2-3 hari per minggu menjadi tiap hari, pembuatan/perbaikan jembatan atau gorong-gorong seperti di Kecamatan Lasalimu Selatan, Wolowa, Wabula, Sangia Wambulu dan Kecamatan Mawasangka Timur; perbaikan/pembuatan dermaga pelabuhan yang dilaksanakan di semua kecamatan pemekaran; serta perbaikan/pengadaan fasilitas air minum sebagaimana yang dilaksanakan di Kecamatan Talaga Raya, Siompu, Mawasangka Timur, Lasalimu Selatan, dan Batuatas.

Sejumlah 136 *informan* yang diwawancarai menyatakan bahwa seluruh pengadaan/perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Semua *informan* mengakui bahwa sebelum ada fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sebagaimana disebutkan sebelumnya,

tingkat pendapatan masyarakat tidak seperti saat ini. *Informan* nomor 163

mengatakan:

”... Setelah Ambuau Indah jadi ibukota kecamatan, keadaannya sudah ramai sehingga petani dan tukang kebun sudah memasarkan hasil-hasil kebunnya setiap hari. Selain itu, sudah banyak pedagang yang datang membeli hasil kebun masyarakat langsung ke Lasalimu Selatan karena jalanan sudah bagus. Fasilitas pendidikan juga meningkat, dulu SMA tidak ada sedangkan sekarang sudah 2 unit. Dengan kemajuan itu, Lasalimu Selatan juga sudah memekarkan kecamatan baru yakni Kecamatan Siotapina. Itu merupakan bukti yang paling nyata atas kemajuan Lasalimu Selatan ... ” (*Wawancara tanggal 22 Desember 2008*).

Hasil analisis pengakuan/pernyataan *informan* berkaitan dengan peningkatan jumlah dan pengaruh sarana prasarana serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4. 38.

Tabel 4. 38
Pengaruh sarana-prasarana
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

NO	Jenis Sarana	Tingkat Pengaruh	Prosentase kenaikan sarana-prasarana	Jumlah Pengakuan <i>Informan</i>	
				orang	%
1	Jalanan, jembatan dan pelabuhan	Sangat Berpengaruh	40 % - 300 %	71	52,21
2	Pasar dan Pertokoan	Berpengaruh	15 - 40 %	48	35,29
3	PLN dan PDAM	Relatif Berpengaruh	Sampai 10 %	17	12,50
J U M L A H				136	100

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara dengan *informan*

Tabel 4. 38 memperlihatkan bahwa jenis sarana/prasarana yang sangat berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan adalah sarana jalan, jembatan dan pelabuhan dengan peningkatan jumlah/panjang untuk tiap kecamatan

pemekaran menunjukkan kenaikan antara 40% sampai dengan 300%. Adapun laju perkembangan/kenaikan sarana-prasarana (sampai tahun 2008) sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.38 untuk tiap kecamatan diperlihatkan pada Tabel 4.39.

Tabel 4.39
Keadaan Sarana-Prasarana Dasar Kecamatan Pemekaran
Tahun 2008

NO	LOKASI	SARANA DAN PRASARANA							
		Jalan Usaha Tani	Jln di Aspal	Rabat beton	Jembatan	Dermaga Pelabuhan	Pasar	Sumber Listrik	Sumber Air
1	Lasalimu Selatan	± 22 Km	8 Km	-	11 Bh	50 mtr (1 bh)	1 bh	PLN	PDAM dan sumur
2	Wolowa	6 Km	-	3 Km	1*	Perbaikan	-	Generator masyarakat	Sumur
3	Wabula	4 Km	6 Km	3 Km	2*	Perbaikan	-	PLN	Sumur
4	Sangia Wambulu	4 Km	2 Km	5 Km	1*	Perbaikan	1 bh	PLN	Sumur
5	Mawasangka Timur	3 Km	11 Km	-	1*	20 mtr (1 bh)	darurat	Generator masyarakat	Sumur
6	Siompu	-	± 12 Km	6 Km	-	Perbaikan (2 bh)	1 bh	Generator masyarakat	Sumur
7	Talaga Raya	-	3 Km	4 Km	-	Perbaikan (2 bh)	1 bh darurat	Generator masyarakat	Ambil di P.Kabaena
8	Batuatas	-	-	± 14 Km	-	20 mtr (1 bh)	-	Generator masyarakat	Air hujan

Data: Diolah dari wawancara dengan informan serta Data Statistik 2007, data Dinas PU Kab. Buton Tahun 2008, data Bagian Ekonomi Setda Kab Buton 2007 dan Data Dinas Pertambangan Kab. Buton tahun 2007.

Dengan demikian, intervensi pemerintah melakukan pembangunan fasilitas umum telah membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bukti keberhasilan kebijakan pemekaran kecamatan sebagaimana kemajuan yang telah terjadi di Kecamatan Lasalimu Selatan dan Talaga Raya serta kecamatan pemekaran lainnya.

Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008 : 60) yang menyatakan bahwa “kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan“, serta pendapat Arsyad (2005 : 121): ” Pemerintah daerah sebagai fasilitator dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus, pengendalian perencanaan dan pembangunan, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan, dan penyediaan infrastruktur.”

3. Pendidikan

Penetapan indikator pendidikan bagi penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat diukur pada 3 hal, yakni:

- 1) Kemampuan masyarakat mengikuti atau melanjutkan pada jenjang pendidikan tertentu secara umum dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga. Dalam penelitian ditemukan fakta bahwa semakin sejahtera sebuah keluarga semakin besar kesempatan anggota dalam keluarga tersebut menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Selain fakta tersebut, juga ditemukan adanya masyarakat dengan latar belakang keluarga yang kurang sejahtera dapat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, namun setelah dilakukan pendalaman terhadap fakta tersebut ditemukan penyebab-penyebabnya, yaitu karena prestasi sehingga mendapat beasiswa, karena dibantu sanak-keluarga, dan karena kemauan keras si anak

sehingga selain melanjutkan pendidikan, yang bersangkutan juga bekerja sampingan, tetapi fakta ini relatif kecil sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap asumsi bahwa semakin sejahtera sebuah keluarga semakin besar kesempatan anggota dalam keluarga tersebut menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

- 2) Tersedianya sarana pendidikan berupa gedung sekolah dan ruang belajar serta gedung atau ruang pembelajaran lainnya menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara teoritis, semakin bertambah jumlah ruang belajar semakin bertambah jumlah orang yang mendapatkan pendidikan dan secara ideal berkorelasi positif dengan makin bertambahnya jumlah orang terpelajar dan cerdas. Oleh karena itu, PQLI, HDI serta BKKBN (Chalid, 2006 : 6.19), menempatkan pengetahuan atau pendidikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Terkait dengan bertambahnya fasilitas pendidikan ini, *informan* nomor 141 menjelaskan bahwa:

... perkembangan pendidikan di Kabupaten Buton cukup pesat, khususnya bila diukur dari tersedianya sekolah-sekolah. Pada tahun 2004 hanya 3 buah SMA Negeri di Kabupaten Buton, sekarang hampir 20 buah, kalau dihitung dengan SLTA kejuruan dan SMA swasta maka jumlahnya lebih kurang 30 buah, demikian pula halnya SLTP, semua kecamatan sudah ada SMP negeri, bahkan beberapa kecamatan ada yang memiliki 2-3 buah SLTP negeri dan swasta. Kalau SD penambahannya hanya sedikit karena sejak dulu hampir setiap desa sudah memiliki SD, jadi penambahan SD baru sekarang mengikuti penambahan jumlah pemekaran desa sekitar 30-an ... setiap tahun milyaran dana APBD untuk rehabilitasi sekolah-sekolah dan pengadaan sarana pendidikan ... ” (*Wawancara tanggal 29 Desember 2008*).

- 3) Guru merupakan pendukung terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Secara teoritis, semakin banyak guru maka semakin besar

peluang pelajar mendapatkan pengajaran dan perhatian dari gurunya, sehingga dengan demikian semakin besar daya serap murid terhadap pelajaran. Untuk memenuhi kebutuhan guru, setiap tahun diadakan penerimaan guru untuk setiap jenjang pendidikan yang jumlahnya ratusan, sebagaimana diungkapkan oleh *informan* nomor 147 bahwa:

” ... secara umum Kabupaten Buton masih kekurangan guru, ini disebabkan oleh beberapa faktor, (1) bertambahnya jumlah sekolah, (2) adanya guru yang pensiun atau meninggal, dan (3) banyaknya guru yang dialih tugaskan menjadi tenaga administrasi atau pejabat pada unit kerja lainnya. Untuk mengantisipasi kekurangan itu, formasi guru pada penerimaan CPNSD untuk tiap tahun jumlahnya cukup banyak berkisar 150 sampai 200-an orang yang diterima ... ”.
(Wawancara tanggal 29 Desember 2008).

Perkembangan pendidikan pada kecamatan pemekaran dapat dilihat pada Lampiran 5. Data pada Lampiran 5 memperlihatkan bahwa keberadaan guru untuk masing-masing kecamatan fluktuatif. Untuk Kecamatan Batuatas dan Kecamatan Talaga Raya, mempunyai masalah tersendiri terhadap keberadaan guru maupun pegawai lainnya. Semenjak adanya pemekaran kecamatan hingga sekarang ini, belum ada penambahan jumlah guru, yang terjadi adalah mutasi guru, yang sudah agak lama mengajar digantikan oleh guru yang baru diangkat dan setelah mengajar beberapa tahun, guru tersebut bermohon lagi untuk pindah tugas. Hal ini terjadi karena kondisi Talaga dan Batuatas yang merupakan kepulauan yang terpisah dengan Pulau Buton, sementara guru yang ditempatkan di sana kebanyakan berasal dari Buton daratan, selain itu adanya kelonggaran kebijakan yang tidak memperhatikan azas manfaat dalam penempatan seorang PNS. Terkait hal ini, *informan* nomor 149 menjelaskan bahwa “rasio kecukupan guru terhadap murid di Kecamatan Talaga Raya dan Batuatas belum terpenuhi, sedangkan untuk kecamatan pemekaran lainnya

sudah memadai. Idealnya, rasio perbandingan guru terhadap murid yakni tingkat SD seorang guru untuk 28 murid sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA minimal sejumlah mata pelajaran yakni 15 orang untuk SMP dan 18 orang untuk SMA ...” (Wawancara tanggal 29 Desember 2008).

Keterangan yang disampaikan oleh *informan* 149 tersebut dikaitkan dengan keberadaan sarana pendidikan di kecamatan pemekaran dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2003, rasio kecukupan guru untuk semua jenjang pendidikan masih kurang memadai pada kecamatan pemekaran, sedangkan pada tahun 2007, hanya sebagian kecil kecamatan pemekaran yang masih kekurangan guru, yakni kecamatan-kecamatan yang berada di kepulauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 136 *informan* untuk mengetahui korelasi tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, telah memberikan pengakuan/pernyataan sebagaimana terlihat pada Tabel 4. 40 dan Tabel 4. 41.

Tabel 4. 40

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesejahteraan

No	PERNYATAAN	Informan	%
1	Pendidikan sangat berpengaruh bagi kesejahteraan	36	26,47
2	Pendidikan berpengaruh bagi kesejahteraan	54	39,705
3	Pendidikan kurang berpengaruh bagi kesejahteraan	37	27,205
4	Pendidikan tidak berpengaruh bagi kesejahteraan	9	6,62
	J u m l a h	136	100

Tabel 4. 41

Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Pendidikan

No	PERNYATAAN	Informan	%
1	Kesejahteraan sangat berpengaruh bagi pendidikan	71	52,21
2	Kesejahteraan berpengaruh pada pendidikan	49	36,03
3	Kesejahteraan kurang berpengaruh pada pendidikan	14	10,29
4	Kesejahteraan tidak berpengaruh pada pendidikan	2	1,47
	J u m l a h	136	100

Berdasarkan analisis hasil penelitian terhadap data dan fakta pada bidang pendidikan, maka pernyataan yang semula sebagai suatu *asumsi* seperti yang dikemukakan pada Tabel 4.40 maupun Tabel 4.41 tersebut adalah merupakan suatu kesimpulan akhir sekaligus pembenaran akan adanya hubungan atau pengaruh yang positif antara peningkatan sarana dan jenjang pendidikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya pendidikan, kesehatan pun kami akan analisis dalam 3 sudut pandang yaitu:

- 1) Dari sudut pandang masyarakat sendiri, bahwa semakin sehat sebuah keluarga tentu dapat menggambarkan tingkat kesejahteraannya, meskipun untuk hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain pola hidup, faktor genetika, dan sanitasi lingkungan. PQLI, HDI serta BKKBN (Chalid, 2006 ; 6.19), menempatkan kesehatan sebagai salah satu indikator kesejahteraan,

bahkan lebih tegas dijelaskan dalam PQLI dan HDI bahwa semakin panjang usia hidup masyarakat suatu negara berarti semakin sejahtera negara tersebut. Dalam penelitian di lapangan, tidak diperoleh informasi yang dapat dijadikan kesimpulan berkaitan usia harapan hidup pada kecamatan pemekaran. Oleh karena itu, analisis diarahkan pada frekuensi kunjungan warga di sarana kesehatan yang setiap tahunnya meningkat, berkurangnya penderita penyakit menular, dan terpantaunya perkembangan anak usia balita yang diselenggarakan di tiap POSYANDU. Gambaran dan analisis data kunjungan ke PUSKESMAS dan kasus penyakit menular sebagaimana Lampiran 6

- 2) Sarana kesehatan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *informan* serta pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kecuali di Kecamatan Lasalimu Selatan, belum ada sarana kesehatan yang pembangunannya baru diadakan oleh pemerintah setelah pemekaran di wilayah kecamatan baru, yang ada hanyalah rehabilitasi gedung serta peningkatan status dari PUSTU menjadi PUSKESMAS atau dari PUSKESMAS tanpa rawat inap menjadi rawat inap. Ada beberapa posyandu yang dibangun di beberapa desa merupakan swadaya masyarakat.
- 3) Tenaga kesehatan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam peningkatan derajat kesehatan di kecamatan pemekaran. Sekitar 87 *informan* (14 orang di antaranya petugas kesehatan) yang diwawancarai terkait dengan persoalan kesehatan ini, semua mengatakan bahwa untuk tenaga kesehatan masih belum memadai di kecamatan pemekaran. Di antara 13 kecamatan pemekaran, hanya Kecamatan Lasalimu Selatan dan

Sangia Wambulu yang memiliki dokter umum, sementara untuk dokter gigi belum ada satupun di kecamatan pemekaran. Inilah merupakan tantangan yang utama bagi Pemerintah Kabupaten Buton karena untuk pengadaan tenaga kesehatan dibutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. Terkait dengan tenaga kesehatan ini, *informan* nomor 140 mengatakan:

” ... kita memang kekurangan tenaga dokter, setiap tahun kita buka pendaftaran tetapi yang mendaftar juga hanya 1-2 orang, jadi jangankan di kecamatan pemekaran, di RSUD saja tenaga kesehatannya masih kurang. Kita kan tahu bahwa sebelum pindahnya Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo, konsentrasi tenaga kesehatan tersebar di wilayah Bau-Bau sehingga ketika terjadi pembentukan Kota Bau-Bau maka secara otomatis mereka menjadi pegawai Kota Bau-Bau ... ”. (*Wawancara tanggal 30 Desember 2008*).

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta di lapangan dapat disimpulkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan masih perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pembangunan di bidang kesehatan pada kecamatan pemekaran dapat dilihat pada Lampiran 7. Namun demikian, dengan memperhatikan fakta terbangunnya beberapa posyandu dari swadaya masyarakat cukup menggambarkan bahwa telah ada kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

5. Perumahan

Persoalan perumahan dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan adalah merujuk pada indikator yang disajikan oleh BKKBN dengan asumsi bahwa sebuah keluarga ideal harus mempunyai tempat tinggal sendiri. Berkaitan dengan perumahan ini, Suparmako mengatakan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Rumah

yang sehat dan nyaman berdampak baik terhadap kesehatan dan ketenangan penghuninya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi. (Suparmoko, 2002 : 119). Namun demikian, pada penelitian didapatkan keterangan dan fakta yang menggambarkan bahwa indikator perumahan bukan merupakan hal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat untuk sebagian masyarakat pada wilayah kecamatan pemekaran. Hal ini disebabkan oleh struktur masyarakat pada beberapa kecamatan tersebut masih terpengaruh kultur dan pemahaman bahwa tinggal bersama orang tua adalah wujud dari kasih sayang dan pengabdian anak kepada orang tua, sebagaimana penuturan *informan* nomor 50, bahwa:

” ... kepatuhan pada adat di sini masih kental, hampir semua kegiatan masyarakat diselaraskan dengan kebiasaan-kebiasaan tetua dulu, mulai dari kelahiran, sunatan, pingitan, perkawinan sampai pada kematian ..., orang membuat rumah atau pergi bersekolah dan mencari kerja juga tanya pada tetua adat. Coba lihat, di sini rumah-rumah bagus kurang padahal banyak orang-orang kaya tapi mereka bikin di luar karena di sini masih ada rumah orang tua ... ”. (*Wawancara tanggal 29 Nopember 2008*)

Penuturan tersebut diperkuat oleh *informan* nomor 44, yang mengatakan bahwa:

”... nilai-nilai kultur di Wabula masih terpelihara dan dipatuhi, persoalan perumahan kurang berkembang karena adanya keengganan orang tua meninggalkan rumah sendiri meskipun usia mereka sudah uzur. Oleh karena itu, sebagian anak-anak yang secara ekonomis mampu membikin rumah terpaksa ditanggihkan hanya karena memikirkan orang tua mereka. Tapi seiring dengan perkembangan kemajuan dan pengetahuan masyarakat, nilai-nilai adat yang kurang positif perlahan-lahan terabaikan ... ”. (*Wawancara tanggal 29 Nopember 2008*).

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh *informan* nomor 100, bahwa: “Kurang berkembangnya perumahan di sini bukan karena masyarakat tidak mampu membikin rumah tetapi kebanyakan masih tinggal

dengan orang tua. karena kebanyakan orang tua tidak mau tinggalkan rumahnya sementara anak-anak punya tanggung jawab merawat orang tua”.

Berdasarkan penelitian, laju pertumbuhan perumahan yang layak huni di kecamatan pemekaran menunjukkan tingkat perkembangan yang cukup lamban, bahkan untuk Kecamatan Wolowa dan Wabula selama 2 tahun awal pembentukannya tidak ada penambahan jumlah rumah layak huni. Kalaupun ada perubahan, yang terjadi hanyalah berupa perbaikan rumah. Jadi tidak sepenuhnya benar anggapan atau penilaian bahwa yang belum memiliki rumah karena tidak mampu membikin rumah. Oleh karena itu, hasil analisis terhadap indikator kepemilikan rumah relatif berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dengan pengertian bahwa pada situasi tertentu keberadaan perumahan ini sangat penting, dan pada situasi tertentu pula keberadaan perumahan dapat dikesampingkan sepanjang indikator-indikator lain telah terpenuhi. Dengan kata lain bahwa perumahan merupakan indikator pelengkap.

Secara umum, BKKBN melakukan analisis terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pendekatan keluarga sejahtera dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan makan/minum, perumahan serta pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan indikator BKKBN tersebut, telah dilakukan analisis tingkat kesejahteraan keluarga tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebagaimana Lampiran 8.

Berdasarkan data pada Lampiran 8, prosentase tingkat kesejahteraan Kecamatan Lasalimu Selatan pada tahun 2005 sebesar - 42,56%. Menurut *informan* nomor 3 bahwa hal tersebut terjadi karena data pada tahun 2005

masih termasuk dengan data Kec. Siotapina, sehingga dibanding tahun 2006 yang ketika itu data Kecamatan Siotapina sudah dipisahkan maka jumlah keluarga menurun. Pada tahun 2006, terjadi lonjakan peningkatan jumlah keluarga khususnya pada Kecamatan Batuatas dan Talaga. Hal ini disebabkan oleh datangnya secara besar-besaran masyarakat berasal dari ke 2 pulau tersebut yang sebelum pemekaran berdomisili di luar Kabupaten Buton. Kehadiran mereka terkait dibentuknya kecamatan baru di daerah mereka, namun kemudian menurun pada tahun berikutnya karena sebagian kembali lagi di tempat domisili semula. Secara keseluruhan, perkembangan/kenaikan jumlah keluarga pada kecamatan pemekaran relatif rendah berkisar 0,1% sampai 4%, bahkan ada yang negatif. Indikator tingkat kesejahteraan keluarga rata-rata pada tiap kecamatan menunjukkan peningkatan dari Pra Sejahtera menjadi Sejahtera I, dari Sejahtera I menjadi Sejahtera II dan seterusnya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat setelah adanya pemekaran kecamatan.

D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebagaimana dipaparkan terdahulu, bahwa secara umum kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun ditemukan fakta di lapangan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut tidak merata untuk setiap kecamatan pemekaran. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor dominan yang menjadi pendukung dan penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

1. Faktor-faktor Pendukung

Berdasarkan analisis data dan fakta di lapangan, faktor dominan yang menjadi pendukung peningkatan kesejahteraan di masyarakat yaitu adanya intervensi pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan pada kecamatan baru. Hal tersebut senada dengan pendapat Suharto (2006 : 35) bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial.

Intervensi tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam kapasitasnya sebagai fasilitator dan stimulator dalam proses pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, sebagaimana yang disinyalir oleh Arsyad (2005 : 121), yakni memfasilitasi percepatan proses pembangunan dan lahirnya inisiatif pembangunan di daerah serta menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha kerakyatan melalui tindakan-tindakan khusus.

Dalam konteks pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton, yang dimaksud dengan intervensi berupa tindakan khusus sebagaimana pendapat Suharto dan Arsyad, antara lain pembangunan/perbaikan jalan dan pembangunan jembatan maupun pelabuhan, yang menghidupkan arus transportasi, memutus simpul-simpul isolasi dan keterbelakangan serta menghadirkan titik-titik pertumbuhan baru, juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian pula dengan pembangunan/perbaikan pasar serta pembangunan sarana lainnya, di samping menghidupkan lalu lintas

jual beli dan memenuhi kebutuhan masyarakat, juga membuka peluang kerja baru. Semua intervensi pemerintah tersebut merangsang peningkatan pendapatan warga dan pada gilirannya meningkatkan keberdayaan masyarakat. Ketika masyarakat telah berdaya, maka ini merupakan potensi sekaligus menjadi pendorong dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Selain kemauan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemekaran juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya karena masyarakatlah yang menjadi obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan, sebagaimana dikemukakan Suharto (2006 : 41): masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan yang tadinya tidak dilibatkan, sekarang dipandang sebagai aktor sentral yang memiliki potensi dan kemampuan mengembangkan kualitas hidupnya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pemekaran kecamatan dapat dilihat sejak proses awal yang dimulai dari penyusunan proposal pemekaran/pembentukan kecamatan oleh tokoh-tokoh masyarakat, memfasilitasi kehadiran tim pemekaran untuk meninjau kelayakan pemekaran, serta penyiapan lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pemerintahan.

Pada bidang pendidikan, dukungan masyarakat dapat dilihat dari penyiapan lahan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah, pembangunan TK yang dilakukan secara swadaya serta keterlibatan masyarakat dalam setiap diskusi perencanaan dan pengembangan kependidikan, baik dalam komite

sekolah maupun pada pertemuan-pertemuan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Pada bidang kesehatan, dukungan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pembuatan posyandu serta penyiapan lahan untuk pembangunan puskesmas dan bangunan kesehatan lainnya

2. Faktor-faktor Penghambat

Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambatnya yakni masih adanya kebijaksanaan yang kurang berpihak pada "pemerataan" seperti adanya mutasi pegawai dari kecamatan pemekaran yang berimplikasi pada menurunnya rasio kecukupan tenaga kependidikan terhadap murid maupun sekolah, atau kurangnya tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Selain hal tersebut, faktor penghambat lainnya yakni masih adanya kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang kurang berpihak pada perubahan meskipun pada saat penelitian, hal-hal tersebut relatif kecil. Pada beberapa tempat, masih ada orang tua yang berlatar belakang petani belum meyakini bahwa dengan pendidikan anaknya yang baik akan dapat merubah keberadaannya, bahkan secara gamblang mereka memberikan contoh bahwa seorang sarjana anak petani terlalu sulit untuk menjadi PNS. Ukuran keberhasilan pendidikan menurut mereka adalah ketika anak-anak menjadi PNS, karena alternatif pekerjaan yang menjanjikan untuk menjamin hari tua menurut mereka hanyalah PNS. Adapun kebiasaan masyarakat yang menjadi hambatan pada bidang kesehatan yakni masih adanya masyarakat yang lebih mempercayai pengobatan pada dukun atau

tabib tradisional, meskipun kadang metode atau cara pengobatan dukun tersebut kurang rasional.

Permasalahan yang diungkapkan tersebut adalah merupakan gambaran sisi negatif dari kebijakan pemerintah daerah maupun kebiasaan masyarakat yang menjadi faktor pengambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Namunpun demikian, pemerintah daerah terus berbenah diri untuk mengatasi persoalan tersebut untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap fakta dan data yang diperoleh selama penelitian berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kabupaten Buton, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah terselenggara dengan baik berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Para implementator dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan hak yang melekat padanya serta mendapat dukungan positif dari warga masyarakat.

Beberapa indikator kesejahteraan seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, serta perumahan digunakan dalam menganalisis hubungan pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan. Hasil analisis ditemukan hubungan yang positif antara pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan, karena dengan terbentuknya kecamatan baru, mengharuskan pemerintah melakukan *intervensi pembangunan sarana dan prasarana* dan dengan terbangunnya sarana dan prasarana, pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan serta keberdayaan masyarakat yang merupakan potensi sekaligus menjadi pendorong dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Indikator pendidikan dan kesehatan merupakan indikator untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi jenjang pendidikan yang diikuti sebuah keluarga, atau semakin tinggi kesadaran/pemahaman akan pendidikan dan kesehatan, maka semakin tinggi tingkat kesejahtraannya. Pada sisi lain indikator pendidikan dan kesehatan ini juga dijadikan tolok ukur peranan atau intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di kecamatan pemekaran. Semakin banyak sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan di kecamatan, maka semakin banyak kesempatan atau dukungan yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahtraannya.

Perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dikemukakan oleh BKKBN, namun pada penelitian tidak berpengaruh banyak pada wilayah pemekaran, hal ini disebabkan oleh persoalan-persoalan kultur dan kebiasaan. Selain itu, keberadaan kecamatan-kecamatan yang mekar masih relatif berumur muda, kecuali Kecamatan Lasalimu Selatan, sehingga dengan demikian belum berpengaruh banyak pada masalah perumahan.

Faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kecamatan pemekaran adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemekaran serta sikap dan kemauan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan faktor penghambatnya yakni masih adanya kebijaksanaan yang kurang berpihak pada "pemerataan" seperti adanya mutasi pegawai dari kecamatan pemekaran serta adanya kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang kurang berpihak pada perubahan, meskipun pada saat penelitian hal-hal tersebut relatif kecil.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap pemekaran beberapa kecamatan di Kabupaten Buton, ditemukan beberapa fakta yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada wilayah induk maupun hasil pemekaran kecamatan. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah pusat agar tidak mengeluarkan kebijakan pelarangan pemekaran wilayah karena fakta menunjukkan bahwa banyak daerah hasil pemekaran telah memperlihatkan kemajuan, yang ditandai dengan terbukanya daerah-daerah yang semula terisolir, menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peranan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyiapkan infrastruktur guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan pada kecamatan pemekaran agar segera diatasi dengan pengangkatan dan penempatan pegawai di kecamatan pemekaran, menghentikan perpindahan pegawai dari kecamatan pemekaran ke tempat lain dan menghentikan pengalihan tugas tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan ke tenaga administrasi atau struktural.

Beragamnya pendapat yang menyikapi persoalan pemekaran wilayah, maka dibutuhkan penelitian yang lebih eksploratif dengan pengembangan indikator dan wilayah cakupan penelitian untuk mengukur keberhasilan pemekaran wilayah dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anderson, E. James. (2003). *Public policy making*. Cambridge: Harvard University Press.
- Arsyad, Lincoln. (1997). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: Penerbitan STIE YKPN.
- Arsyad, Lincoln. (2005). *Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: PT. BPFE.
- BAPPENAS. (2007). Studi evaluasi pemekaran daerah (*Jurnal*, 4 Juli 2007), *Building and Reinventing Decentralized Governance Project* - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bekerja sama dengan United Nation Development Program, Jakarta. diambil 24 Desember 2008 dari http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah.pdf.
- Budiawan, Sidik A dan Indah Surya Wardhani. (2008). Pemekaran Belum Bawa Perubahan, diambil 24 Desember 2008 dari <http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/18/18422610>.
- Chalid, Pheni. (2006). *Teori dan isu pembangunan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2004). *Public policy analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Eko Prasajo, dkk. (2007). *Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gibson, L. James, dkk. (1994). *Organisasi: Prilaku – Struktur – Proses*. Jakarta: Erlangga
- Irawan, Prasetya. (2006). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iswanto, Yun. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Jones, O. Charles. (1996). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kismartini, dkk. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam dimensi strategi administrasi publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Ekonomi pembangunan – Teori, masalah dan kebijakan*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- LAN. (2004). *Laporan akhir evaluasi kinerja pembangunan pra dan pasca pemekaran wilayah (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya); Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I (PKP2A-I) Lembaga Administrasi Negara, Bandung*. http://www.geocities.com/triwidodowu/otda_pasca_pemekaran.pdf.
- Mahi, Raksaka. (2006). Upaya mendongkrak lokomotif perekonomian daerah, *Media Praja I* (18) 5-8. Jakarta: DEPDAGRI.
- Miles, Mathew B. dan Michel A. Hurberman. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, J. Lexi. (2000). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Muhammad Qudrat. (2007). *Manajemen strategi organisasi publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho, D. Riant. (2007). *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public policy: Pengantar teori dan analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.
- Syarmadani. (2005). Implikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap titik pertumbuhan ekonomi kawasan. *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana UGM.
- Soehardi. (1990). *Pertumbuhan, pemerataan, dan pembangunan wilayah dalam respektif perkembangan pemikiran ekonomi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (1997). *Metode penelitian administras*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2006). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.

Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi publik: Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weimer, David. L dan Aidan R. Vining. (1999). *Policy analysis: Concepts and practice*. New Jersey, Prentice Hall.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

----- (2007). *Buton dalam angka Tahun 2007*. Pasarwajo: BPS Kabupaten Buton.

----- (2007). *Kumpulan Lembaran Daerah Kabupaten Buton*. Pasarwajo: Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton.

----- (2007). *Kumpulan-kumpulan Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV. Eko Jaya.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Agar dalam proses pengumpulan data lebih fokus dan terarah dalam menggali informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemekaran kecamatan, maka dipergunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Namun demikian, sangat disadari bahwa akan ada pengembangan pertanyaan ketika dilakukan penelitian di lapangan. Adapun pedoman wawancara adalah sebagai berikut:

A. Materi pertanyaan untuk aparat pemerintah kabupaten dan DPRD yang terlibat secara langsung dalam penggodokan kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan

1. Bagaimana tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan.
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan kemungkinan dan kemudahan pemekaran kecamatan, bagaimana tanggapannya.
3. Apakah ada faktor penghambat dalam pembuatan kebijakan pemekaran kecamatan.
4. Bagaimana kontribusi aparat birokrasi dalam pelaksanaan program pemekaran.
5. Bagaimana kesiapan sumberdaya aparat birokrasi untuk mendukung pelaksanaan pemekaran kecamatan.
6. Bagaimana dukungan yang diberikan untuk merangsang motivasi dan mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pasca pemekaran.
7. Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.
8. Apakah ada penghambat dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan.
9. Nilai positif apa yang didapat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan.

10. Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran baik ditingkat kabupaten, diwilayah yang baru dibentuk maupun pada wilayah kecamatan induk.

B. Materi pertanyaan untuk camat dan aparat pemerintah kecamatan

1. Bagaimana tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan.
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan kemungkinan dan kemudahan pemekaran kecamatan, bagaimana tanggapannya.
3. Bagaimana kontribusi aparat birokrasi kecamatan dalam pelaksanaan program pemekaran.
4. Bagaimana kesiapan sumberdaya aparat birokrasi ditingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemekaran kecamatan.
5. Apakah dukungan dana, perlengkapan dan personil sudah memadai untuk mendukung kinerja kantor kecamatan.
6. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan *pasca* pemekaran.
7. Apakah ada penghambat dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan.
8. Nilai positif apa yang didapat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan.
9. Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.
10. Perubahan apa yang terjadi di kecamatan setelah dilakukan pemekaran.
11. Sarana dan prasarana apa yang telah dibangun setelah ada pemekaran kecamatan.
12. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.

C. Materi pertanyaan untuk tokoh Masyarakat dan Ketua LPM (Lembaga Pembangunan Masyarakat)

1. UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan kemungkinan dan kemudahan pemekaran kecamatan, bagaimana tanggapannya.
2. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan program pemekaran
3. Bagaimana kesiapan sumberdaya aparat birokrasi ditingkat kecamatan untuk mendukung pelaksanaan pemekaran kecamatan.
4. Apa ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pasca pemekaran!, bagaimana bentuknya.
5. Apakah ada penghambat dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan.
6. Nilai positif apa yang didapat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan.
7. Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.
8. Perubahan apa yang terjadi di kecamatan setelah dilakukan pemekaran.
9. Bagaimana keadaan masyarakat setelah terjadinya pemekaran.
10. Apakah ada peningkatan pendapatan masyarakat setelah terbentuknya kecamatan baru.
11. Sarana dan prasarana apa yang telah dibangun setelah ada pemekaran kecamatan.
12. Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.

D. Materi pertanyaan untuk masyarakat.

1. Bisa disebutkan identitas saudara (Nama, umur, pekerjaan, dan pendidikan).
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang pemekaran kecamatan.

3. UU Nomor 22 Tahun 1999 maupun UU Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan kemungkinan dan kemudahan pemekaran kecamatan, bagaimana tanggapannya.
4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan program pemekaran
5. Apakah ada penghambat dalam pelaksanaan pemekaran kecamatan.
6. Nilai positif apa yang didapat setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan.
7. Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.
8. Perubahan apa yang terjadi di kecamatan setelah dilakukan pemekaran.
9. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga setelah terjadinya pemekaran.
10. Apa mata pencaharian anda dan mata pencaharian masyarakat yang utama di kecamatan ini.
11. Sarana dan prasarana apa yang telah dibangun setelah ada pemekaran kecamatan.
12. Apakah ada peningkatan pendapatan saudara setelah dilakukan pemekaran wilayah.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : LA AFA, BA.
 Alamat : B a t a u g a
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 23 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Sebenarnya sudah lama keinginan masyarkat untuk membentuk kecamatan sendiri, khususnya yang berada di Pulau Siompu dan Kadatua, akan tetapi pembentukan kecamatan sangat sulit harus usulkan dari kabupaten, propinsi kemudian ke pusat. Karena itu setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan maka segenap warga di Siompu dan Kadatua mengusulkan pembentukan kecamatan dan tentu saja usulan itu patut disahuti, keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan merupakan keinginan yang positif.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran maka masyarakat Siompu sudah merasakan dampak positifnya antara lain yang paling terasa adalah aspek pelayanan pemerintahan yang tidak perlu lagi ke Batauga yang membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, dana-dana pembangunan juga sudah banyak yang turun seperti sekarang ini sudah 16 km jalan yang diaspal di Siompu, sudah ada 2 SMA, 3 SLTP, 2 Puskesmas, perbaikan pasar dan dermaga.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Saat ini pendapatan masyarakat meningkat pada kisaran 30% sampai 80%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : WAODE ST. KHADIJAH, Sm.Hk.
 Alamat : Pasarwajo
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 22 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Tanggapn saya positif. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan sebagaimana contoh yakni Kecamatan Lasalimu Selatan. Keinginan masyarakat Lasalimu Selatan yang semula dalam cakupan wilayah Kecamatan Persiapan Siontapina untuk menjadi kecamatan defenitif dapat segera terkabulkan. Keinginan Masyarakat tersebut merupakan hal yang positif karena dengan pemekaran mereka berharap akan terjadi percepatan pembangunan pada wilayah tersebut.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksanaan pemekaran kecamatan	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Fasilitas pendidikan juga meningkat, Dulu SMA tidak ada sedangkan sekarang sudah 2 unit, SLTP 4 unit, TK ada tiap desa, juga fasilitas kesehatan meningkat seperti Puskesmas 1 unit, Pustu hampir tiap desa, ada mobil ambulans. Fasilitas lain, jalan-jalan sudah diaspal, jalan tani puluhan kilometer, ada PLN, pembuatan jembatan puluhan buah, dermaga.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Pendapatan masyarakat meningkat berlipat-lipat, khususnya petani karena hasil kebun mereka sudah dapat dipasarkan di pasar, demikian pula nelayan. Kesemuanya itu berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. Majene Saputra.
 Alamat : Bau-Bau
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 22 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Saya anggota DPRD berasal dari Batuatas Sebelum pemekaran wilayah, masyarakat Kecamatan Batuatas merasakan sulitnya jika mereka melakukan urusan di Mambulu ibukota Kecamatan Sampolawa, mereka harus menyeberangi laut dengan jarak yang puluhan mil dan kondisi alam yang tidak menentu. Sebenarnya sudah lama keinginan masyarakt untuk membentuk kecamatan sendiri, akan tetapi pembentukan kecamatan sangat sulit, setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan maka masyarakat Batuatas mengusulkan pembentukan kecamatan dan tentu saja usulan itu patut disahuti, ..Keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan merupakan keinginan yang positif.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi untuk mendukung pelaksanaan pemekaran di Kecamatan Batuatas masih kurang memadai.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Pemkab banyak memberikan dukungan berupa pembiayaan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Dulu SMA tidak ada sekarang sudah ada, gurunya masih kurang, banyak yang pindah. Puskesmas dan beberapa Pustu serta dokter sudah ada, jalanan sudah diaspal sejauh 16 km sehingga melancarkan transportasi masyarakat. Sarana angkutan motor laut sudah beroperasi secara tetap setiap hari.. Pasar juga sudah ada sehingga masyarakat yang sebelumnya hanya berpencaharian di laut sekarang ada yang berdagang sembako.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Saat ini pendapatan masyarakat meningkat dengan kisaran pendapatan rata-rata Rp. 35.000,- Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakt.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Abubakar, S.Sos.
 Alamat : Wabula
 Pekerjaan : Camat Wabula
 Tgl Wawancara : 28 Nopember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Tanggapan kami menggembirakan karena dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 masyarakat Wabula yang jauh dari ibukota kecamatan di Pasarwajo segera mengusulkan pembentukan kecamatan Wabula. Dengan terbentuknya Kecamatan Wabula disambut gembira oleh masyarakat meskipun dampak pemekaran kecamatan belum berpengaruh banyak pada peningkatan pendapatan tetapi dari sisi pelayanan sangat berpengaruh.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam mer-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran	Di Wabula sekarang sudah ada SMA Negeri dan PUSKESMAS, jalanan yang dulu ada yang ketajamannya pendakian diatas 40° sudah dipotong, pelabuhan rakyat sudah diperbaiki dan pasar juga sudah ada dan ramai.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Saat ini pendapatan masyarakat meningkat pada kisaran 30% sampai 80%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : MUHAMAD RIJAL, SE..
 Alamat : Lamena
 Pekerjaan : Camat Mawasangka Timur
 Tgl Wawancara : 4 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.	UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan rahmat bagi masyarakat di daerah. Terkait dengan pemekaran kecamatan keberadaan UU tersebut sangat sangat positif karena dengan UU itu keinginan masyarakat yang berada jauh dari ibikota kecamatan seperti wilayah kami sangat diuntungkan karena dengan itu kami bisa membentuk kecamatan tersendiri sehingga pelayanan pemerintah pada masyarakat makin baik.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam mer-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran maka masyarakat Mawasangka Timur sudah merasakan dampak positifnya antara lain yang paling terasa adalah aspek pelayanan pemerintahan, dana-dana untuk membiayai pembangunan cukup banyak yang di turunkan di Kecamatan Mawasangka Timur. Di sini ada pembuatam dermaga baru, gedung SMP, Kantor Camat, rehab SD, pembuatan jalan usaha tani dan pengasapalan jalan yang cukup panjang lebih 10 km. Program-program pemberdayaan juga banyak yang masuk di kecamatan seperti PPK, <i>Coremap</i> maupun bantuan dari Dinas Sosial dan Perikanan.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Mata pencaharian masyarakat sudah banyak yang berubah, dari petani tradisional menjadi petani rumput laut sehingga penghasilan bertambah 2 sampai 3 kali lipat yang berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. LAODE MUSTARI, M.Si.
 Alamat : Pasarwajo
 Pekerjaan : Asisten Tata Praja Sekda Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 18 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat di wilayah pemekaran untuk memekarkan wilayah mereka menjadi kecamatan direspon positif oleh pemerintah sepanjang persyaratan formal terpenuhi, yakni luas wilayah, jumlah desa/kelurahan serta jumlah penduduk sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2000. Selain persyaratan formal, pemerintah kabupaten juga membentuk tim untuk melakukan kajian lapangan menilai kelayakan pemekaran dari segi geografis dan demografis serta aspek sosial-politik dan kamtibmas.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran. Sebelum perda pembentukan kecamatan ditetapkan, pemerintah bersama DPRD terlebih dulu melakukan kajian menyeluruh, termasuk pembiayaan, personil dan perlengkapan.
3	Bagaimana dukungan pemer-intah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Pemerintah Kabupaten Buton melakukan berbagai pembangunan dan pembenahan pada tiap kecamatan pemekaran. Secara umum dana yang dialokasikan untuk tiap kecamatan yang dimasukan dalam APBD minimal Rp. 1,5 M tiap kecamatan yang masih ditambah dengan dana-dana pusat melalui SKPD terkait sehingga secara keseluruhan setelah pemekaran terjadi peningkatan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan sarana kimpraswil lainnya.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Secara umum tingkat pendapatan masyarakat meningkat, kemudian fasilitas pendidikan dan kesehatan meningkat serta sarana perhubungan dan perdagangan. Kesemuanya itu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. KAHARUDDIN SYUKUR
 Alamat : Pasarwajo
 Pekerjaan : Kepala BPKAD. Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 11 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat untuk memekarkan wilayah kecamatan harus direspon positif oleh pemerintah sepanjang persyaratan formal terpenuhi, yakni luas wilayah, jumlah desa/kelurahan serta jumlah penduduk sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2000. Selain persyaratan formal, juga dilakukan kajian lapangan menilai kelayakan pemekaran dari segi geografis dan demografis serta aspek sosial-politik dan kamtibmas.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran. Sebelum perda pembentukan kecamatan ditetapkan, pemerintah bersama DPRD terlebih dulu melakukan kajian menyeluruh, termasuk pembiayaan, personil dan perlengkapan.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat "besarnya anggaran yang diturunkan ditiap kecamatan. Pada tahun 2008 dana pembangunan melalui APBD tiap kecamatan Rp. 1 Milyar sampai lebih Rp. 2 Milyarsedangkan untuk tiap kantor kecamatan berkisar antara Rp. 65 juta sampai Rp. 85 juta.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Pemerintah Kabupaten Buton melakukan berbagai pembangunan dan pembenahan pada tiap kecamatan pemekaran. Dana yang dialokasikan untuk tiap kecamatan yang dimasukan dalam APBD minimal Rp. 1 Milyar tiap kecamatan, ditambah dengan dana-dana pusat melalui SKPD terkait sehingga secara keseluruhan setelah pemekaran terjadi peningkatan pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan sarana kimpaswil lainnya.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Secara umum pendapatan masyarakat meningkat, fasilitas pendidikan dan kesehatan meningkat serta sarana perhubungan dan perdagangan. Kesemuanya itu mendorong peningkatan kedsejahteraan asyarakat.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs.H. NASRUN FAIZU
 Alamat : Pasarwajo
 Pekerjaan : Sekretris DPRD Kab. Buton
 Tgl Wawancara : 18 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Setelah ada UU Nomor 22 Tahun 1999 di mana kewenangan pembentukan kecamatan berada di pemerintahan daerah, maka banyak masyarakat yang mengajukan proposal pemekaran kecamatan dengan alasan mereka membentuk kecamatan baru karena persoalan pelayanan pemerintahan. Semua wilayah yang mengusulkan pemekaran kecamatan adalah wilayah-wilayah yang sangat jauh dari ibukota kecamatan, seperti wilayah Mawasangka Timur yang jaraknya lebih 40 Km dari Mawasangka; Siompu dan Kadatau yang beribukota di Laompo yang dipisahkan laut, demikian pula Talaga Raya dengan Kabaena bahkan seperti Batuatas dengan ibukota kecamatan di Sampolawa dipisahkan laut yang cukup jauh dengan kondisi perairan yang tidak menentu. Sentu saja usulan itu patut disahuti. Keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan merupakan keinginan yang positif.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumber daya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksanaan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setiap tahun kecamatan pemekaran mendapatkan dana pembangunan dari APBD lebih Rp. 1 Milyar untuk membiyai sarana pemerintahan dan saran sosial. Secara umum telah terjadi peningkatan saran pendidikan, kesehatanmaupun sarana lainnya di kecamatan pemekaran.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Setelah pemekaran telah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun kita akui bahwa antara kecamatan yang satu dan lainnya berbeda.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. MUCHTASAR NTEWO
 Alamat : Talaga
 Pekerjaan : Pensiunan/Tokoh Masyarakat
 Tgl Wawancara : 14 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan rahmat bagi masyarakat di daerah. Dengan UU itu keinginan masyarakat yang berada jauh dari ibikota kecamatan seperti wilayah kami yang berada di kepulauan sangat diuntungkan karena dengan itu kami bisa membentuk kecamatan tersendiri sehingga pelayanan pemerintah pada masyarakat makin baik.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan	Menurut pengamatan saya sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran, tetapi persoalan yang sering dihadapi di kecamatan kami yakni kurangnya pegawai yang beta bekerja disini.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari percepatan peresmian setelah penetapan perda pembentukan serta disiapkannya dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran telah terjadi perubahan yang besar di Talaga. Saat ini sudah ada SMA Negeri, SMP Negeri, Puskesmas dan <i>speed boat</i> Puskesmas, pembuatan pasar, perbaikan dermaga, pengasapalan jalan dan pembukaan tambang nikel.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Dengan adanya pasar, baiknya dermaga dan terbukanya tambang maka perekonomian masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sekarang pendapatan masyarakat berkisar antara Rp. 35.000,- sampai Rp. 70.000,- sehari.
6	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Sejau ini tidak ada hal-hala negatif yang terjadi setelah pemekaran, bahkanmasyarakat sangat bergembira karena telah terjadi perubahan mengarah hal-hal yang positif.

.TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. LANAJI
 Alamat : Wabula
 Pekerjaan : Ka. UPTD Dikbud/Tokoh Masyarakat
 Tgl Wawancara : 29 Nopember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Sebelum pemekaran wilayah, masyarakat Wabula merasakan sulit jika mereka melakukan urusan di Kantor Kecamatan karena jaraknya jauh dan jalanannya berbahaya. Sebenarnya sudah lama keinginan masyarkat untuk membentuk kecamatan sendiri, akan tetapi pembentukan kecamatan sangat sulit. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan maka segenap warga mengusulkan pembentukan kecamatan dan usulan itu disahuti. Keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan merupakan keinginan yang positif.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab baik yang dapat dilihat dari cepatnya proses pembuatan perda hingga peresmian kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana pemerintahan dan saran sosial lainnya.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran dana-dana pembangunan banyak yang turun seperti sekarang ini sudah 26 km jalan yang diperbaiki dan diaspal, sudah ada SMAN dan swasta, SLTP Neg dan Swasta, Puskesmas, perbaikan pasar dan dermaga.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Secara umum pendapatan masyarakat meningkat pada kisaran 15% sampai 50%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Nilai positifnya banyak. Ada nilai budaya dan kebiasaan yang kurang bagus yakni dibidang perumahan. Ada masyarakat iyang mampu secara ekonomis tapi tidak membuat rumah karena adanya pemahaman memberikan kasih sayang dsan perhatian pada orang tua sehingga merka tetap seruma dengan orang tua.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : LAODE TASDIN, S.Pd
 Alamat : Tolandona
 Pekerjaan : Ka. SMA/Anggota BPD
 Tgl Wawancara : 6 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan adalah positif dan dijamin oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Ada kemudahan dari UU tersebut karena selama ini pemerintah pusat terlalu sentralistis sehingga keinginan daerah untuk memekarkan diri dihambat. Khusus di Kecamatan Sangia Wanbulu, dengan mekarnya kecamatan semakin memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kaena sebelumnya ibukota kecamatan di Lombe sangat jauh dengan kondisi jalanan yang rusak.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Seebenarnya sumberdaya aparat birokrasi adalah urusan pemerintah. Sudah menjadi konsekwensinya untuk menyediakan pegawai agar pelaksanaan pemekaran berjalan dengan lancar dan baik.
3	Bagaimana dukungan pemer-intah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dan anggota DPRD sangat positif. Hal ini ditunjukan dengan perhatian aparat pemerintah kabupaten dan DPRD dalam mengusahakan pemekaran kecamatan.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran terjadi perubahan yang cukup signifikan. Pelayanan pemerintahan yang tidak perlu lagi ke Lombe. Dana-dana pembangunan juga sudah banyak yang turun seperti sekarang ini sudah pembuatan jalan baru 10 km, sudah ada 2 SMA, SLTP, Puskesmas, perbaikan pasar dan dermaga.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Saat ini pendapatan masyarakat meningkat pada kisaran 50% sampai 100%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Sejau ini tidak ada hal-hala negatif yang terjadi setelah pemekaran, bahkan masyarakat sangat bergembira karena telah terjadi perubahan mengarah hal-hal yang positif.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. HASAN BAKRY
 Alamat : Pasarwajo
 Pekerjaan : PNS/Mantan Camat Pasarwajo/Tokoh Masyarakat
 Tgl Wawancara : 12 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Kalau dilihat dari aspek pelayanan, pembentukan Kecamatan Wolowa telah meningkatkan pelayanan. Hal itu yang menjadi tuntutan utama masyarakat dengan adanya pemekaran kecamatan karena selama ini mereka harus menegluarkan waktu dan dana yang besar untuk ke ibukota kecamatan.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan peme-rintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab baik, ini dapat dilihat dari cepatnya proses pembuatan perda hingga peresmian kecamatan yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kantor kecamatan.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran	Jujur saya katakan bahwa perubahan pembangunan belum banyak di Wolowa, mungkin karena usia pemekaran masih muda. Yang bertambah hanyalah Kantor camat, SMA Swasta, pembuatan jalan usaha tani dan beberapa PUSTU.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Secara umum pendapatan masyarakat belum terlalu meningkat pada kisaran 15% sampai 25%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terlalu berubah.
6	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Nilai nilai negatifnya tidak ada tapi ada beberapa warga masyarakat yang mengeluhkan banyaknya pendatang yang kadang membawa kebiasaan yang kurang positif seperti pergaulan yang kurang sopan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : H. LAKARIA
 Alamat : Biwinapada
 Pekerjaan : Pedagang/Tokoh Masyarakat
 Tgl Wawancara : 2 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004.	Kami masyarakat mau mekara karena merasakan sulit jika mereka melakukan urusan dengan Kantor Kecamatan di Laompo yang harus menyeberang laut. Sebenarnya sudah lama keinginan kami untuk membentuk kecamatan sendiri, akan tetapi pembentukan kecamatan sangat sulit. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diterbitkan maka keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan terkabul dan itu merupakan keinginan yang positif.
2	Bagaimana kontribusi dan ke-siapan sumberdaya aparat biro-krasi untuk mendukung pelaksa-naan pemekaran kecamatan.	Sumberdaya aparat birokrasi cukup tersedia untuk untuk mendukung pelaksanaan pemekaran.
3	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam men-dorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab cukup baik.
4	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Sekarang sudah ada 2 SMA, 2 SLTP, jalan sudah diperbaiki dan diaspal, Puskesmas, perbaikan pasar dan dermaga.
5	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Mengukur pendapatan masyarakat dengan pemekaran kecamatan susah, tapi dengan banyaknya masyarakat tentu akan menambah volume penjualan barang-barang, dengan banyaknya bangunan dan pekerjaan di Siompu akan membuka lapangan kerja. Upah buruh saja sudah Rp. 30.000,- perhari, jadi penghasilan paling rendah sudah Rp. 30.000 perhari itu. Kalau dulu karena pekerjaan kurang maka upah buruh bangunan cuma Rp. 15.000,- sampai Rp. 20.000, perhari, dulu banyak juga yang nganggur.
6	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Dengan pemekaran tidak ada nilai negatifnya kaena semuanya berakibat baik.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : JURA HAMKAL, S.Pd.
 Alamat : Ambuau
 Pekerjaan : Kasi PMD/anggota BPD
 Tgl Wawancara : 24 Nopember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat merupakan hal logis. Masyarakat gembira dengan pemekaran kecamatan karena berurusan dengan pemerintah kecamatan yang jaraknya lebih 80 Km tidak susah lagi. Setelah jadi kecamatan, Desa Ambuau sebagai ibukota kecamatan makin ramai.
2	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
3	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya setelah ada pemekaran.	Setelah pemekaran Pemerintah semakin banyak menurunkan dana-dana pembangunan, jalan-jalan sudah diperbaiki, pembukaan jalan usaha tani, pendirian sekolah baru, pendirian PUSKESMAS dan PUSTU baru, pendirian pasar di desa-desa lain sebagai tempat pertumbuhan baru, dan banyaknya pemukim baru yang datang dan menetap di Ambuau serta beberapa desa tempat pertumbuhan baru seperti Desa Matanauwe dan Desa Kumbewaha.
4	Apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah dilakukan pemekaran wilayah.	Saat ini pendapatan masyarakat meningkat pada kisaran 30% sampai 125%. Dengan fakta ini berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Dengan pemekaran tidak ada nilai negatifnya kaena semuanya berakibat baik.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Drs. H. LAODE ANWAR AMIRI, M.Si.
 Alamat : Bau-Bau
 Pekerjaan : Kadis Pendidikan dan Kebudayaan
 Tgl Wawancara : 29 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat merupakan hal logis. Masyarakat gembira dengan pemekaran kecamatan karena umumnya kecamatan yang mekar adalah kecamatan yang jauh dari wilayah kecamatan induk . Dengan terbentuknya kecamatan baru pada wilayah mereka maka akan memudah pelayanan pemerintah dan memudahkan masyarakat berurusan dengan pemerintah kecamatan.
2	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari percepatan pembahasan di DPRD yang ditinjakanjuti dengan percepatan pengresmiannya.
3	Bagaimana keadaan kependidikan dan sarana prasarananya, khususnya di kecamatan pemekaran.	Strategi pembangunan pendidikan Kabupaten Buton dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan belajar, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar. Relevansi pendidikan yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan agar pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal inilah yang diimplementasikan ditiap kecamatan seluruh Kabupaten Buton sehingga secara fisik terjadi peningkatan sarana pendidikan, peningkatan jumlah dan kualitas guru serta peningkatan lulusan sekolah.
4	Selain nilai positif, adakah hal-hal negatif yang timbul pasca pemekaran khususnya diwilayah yang baru dibentuk.	Dari sisi pendidikan pemekaran tidak ada nilai negatifnya kaena semuanya berakibat baik.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Informan : dr. H. ZUHUDIN KASIM, MM.
 Alamat : Bau-Bau
 Pekerjaan : Kadis Kesehatan Kabupaten Buton
 Tgl Wawancara : 30 Desember 2008

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaiman tanggapan anda berkaitan dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan kecamatan dikaitkan dengan kemudahan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004.	Keinginan masyarakat untk mekar lebih disebabkan oleh kondisi wilayah mereka yang relatif jauh dari ibukota kecamatan induk. Jadi dengan pemekaran merupakan solusi ats pemasalahan yang mereka alami selama ini. Karena itu keinginan untk membentuk kecamatan baru meruapakan hal logis.
2	Bagaimana dukungan pemerintah kabupaten dalam mendorong percepatan implementasi pemekaran kecamatan.	Dukungan pemkab dapat dilihat dari percepatan peresmian pasca penetapan perda pembentukan serta penyiapan dana untuk membiayai pemerintah kecamatan dan pembangunan infrastruktur pendukung serta penyiapan SDM.
3	Bagaimana keadaan sarana dan prasarana kesehatan serta pendukung lainnya, khususbya pada kecamatan pemekaran.	Kita mengakui bahwa pembangunan sarana kesehatan relatif lambat karena kita memfokuskan pada pembangunan RSUD di pasarwajo. Kalaupun ada di kecamatan pemekaran hanyalah rehabilitasi puskesmas yang sudah ada sehingga statusnya dapat ditingkatkan, sedangkan untuk PUSTU lebih banyak swadaya masyarakat. Untuk tenaga kesehatan kita masih kekurangan walaupun tiap tahun ada penambahan pegawai. Kita juga kekurangan tenaga dokter, setiap tahun kita buka pendaftaran tetapi yang mendaftar juga hanya 1-2 orang, jadi jangankan di kecamatan pemekaran, di RSUD saja tenaga kesehatannya masih kurang. Kita kan tahu bahwa sebelum pindahnya Ibukota Kabupaten Buton di Pasarwajo, kosentrasi tenaga kesehatan tersebar di wilayah Bau-Bau sehingga ketika terjadi pembentukan Kota Bau-Bau maka secara otomatis mereka menjadi pegawai Kota Bau-Bau.
4	Bagaimana kondisi kesehatan masyarakat khususnya pada kecamatan yang baru dibentuk.	Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Buton biasa-biasa saja. Untuk kecamatan pemekaran keberadaanya juga sama seperti sebelumnya.

LAMPIRAN 6

**KUNJUNGAN WARGA KE PUSKEMAS
SERTA KASUS PENYAKIT MENULAR
PADA TAHUN 2005 SD. 2007**

NO	NAMA PUSKEMAS	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN
1	Puskesmas Lasalimu Selatan	2.420	33	2.512	29	2.546	18
2	Puskesmas Wolowa	1.021	28	1.328	22	1.572	16
3	Puskesmas Wabula	1.121	26	1.344	25	1.683	11
4	Puskesmas Sangia Wambulu	2.005	22	1.997	18	2.243	8
5	Puskesmas Mawasangka Timur	1.142	11	1.198	12	1.204	9
6	Puskesmas Siompu	2.361	16	2.563	13	2.579	12
7	Puskesmas Talaga	1.843	14	2.012	12	2.447	11
8	Puskesmas Batuatas	1.324	19	1.542	14	2.076	7
	J u m l a h	13.237	169	14.501	145	16.350	92

DATA DIOLAH DARI HASIL WAWANCARA DAN DOKUMENTASI DILAPANGAN
KETERANGAN : KNJNG = JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKEMAS
P. MEN = KASUS PENYAKIT MENULAR

ANALISA DATA:

Jumlah kunjungan ke Puskesmas tahun 2006 dibanding tahun 2005 naik dari 13.237 menjadi 14.501 atau naik 1,09% dan tahun 2007 naik 1,13%, sedangkan kasus penyakit menular yang terdeteksi di Puskesmas pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 menurun dari 169 kasus menjadi 145 atau turun 1,17% dan tahun 2007 menurun lagi 1,58%.

LAMPIRAN 11

DAFTAR INFORMAN / RESPONDEN :

NO	N A M A	ALAMAT /ASAL	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5
A	KEC. LASALIMU SELATAN			
1.	DRS. ISA SAYUTI	Desa Ambuau	Camat	
2.	HAMID A	Desa Kinapani	Wiraswasta	
3.	RAUF, SH	Desa Ambuau	Sekretaris Camat	
4.	RANO ERNO	Desa Ambuau	Magang	
5.	MUH. TAUFIK	Desa Ambuau	Guru	
6.	HARTONO	Desa Umalaoge	Ketua BPD/Pedagang	
7.	PURNOMO	Desa Ambuau Indah	Tani	
8.	SANG NYOMAN	Desa Ambuau	Wiraswasta	
9.	SABARUDDIN	Desa Ambuau Indah	Tani	
10.	I NENGA SUCIPTA	Desa Ambuau Indah	Tani	
11.	ALUDIN	Desa Sumber Agung	Ketua LPM/Guru	
12.	SITTI AISYAH	Desa Ambuau	Tokoh Perempuan/ PNS	
13.	JURA HANKAL, S.Pd	Desa Ambuau	Kasi PMD	
14.	GAFAFUDDIN	Desa Kinapani	Guru	
15.	SUPARDIN	Desa Kamaru	Pensiunan	
B	KEC. SIOMPU			
16.	SYARIFUDDIN BALUMBI, SE	Desa Biwinapada	Camat	
17.	NURDIN, S.Pd	Desa Tongali	Sekretaris Camat	
18.	POMILI WOMAL, S.Pd	Desa Biwinapada	Ka. UPTD Dikbud	
19.	LA KATA	Desa Wakinamboro	Kepala Puskesmas	
20.	KASIM	Desa Wakinamboro	Kades Wakinamboro	
21.	LA MALUDU	Desa Kaimbulawa	Kepala Desa Kaimbulawa	

1	2	3	4	5
22.	H. LA KARYA	Desa Tongali	Tokoh Masyarakat	
23.	H. LA MANE	Desa Biwinapada	Tokoh Masyarakat	
24.	LA AMIRI, SH	Desa Wakinamboro	PNS/Tokoh Pemuda	
25.	LA HIJIRA, SH	Bau-Bau	Wiraswasta	
26.	Ir. MANAN	Desa Molona	Tokoh Pemuda	
C	KEC. WOLOWA			
27.	SYAMSUDDIN, S.Pd	Desa Wolowa	Camat Wolowa	
28.	LAODE GASIA	Desa Matawia	Kasi Pembangunan	
29.	LA GARISI	Desa Kaumbu	Kepala Desa Kaumbu	
30.	LAODE HALIDIN	Desa Matawia	Kepala Desa Matawia	
31.	DAMAHUDIN, SE	Desa Matawia	PNS	
32.	BARUDIN	Desa Kamubu	Tokoh Masyarakat/ PNS	
33.	LA WUJU	Desa Wolowa Baru	Pemuda	
34.	LAODE BAYANUDDIN	Desa Wolowa	PNS	
35.	LA SUT ARIF	Desa Matawia	PNS	
36.	SIRIN, S.Sos	UPT Sukamaju	Kasi Trantib	
37.	LA CITA, S.Sos	Pasarwajo	Sekretaris Camat	
38.	JAMIN	Desa Wolowa	Wiraswasta	
39.	LA JONI	Desa Wolowa	Dagang	
40.	LA JUDIN T	Desa Kaumbu	Petani / Anggota BPD	
41.	LAODE MA'RUF	Desa Wolowa	Wiraswasta	
42.	SURIADIN ABI	Desa Kamubu	Ketua BPD	
D	KEC. WABULA			
43.	ABU BAKAR, S.Sos	Desa Wabula	Camat Wabula	
44.	Drs. LA NAJI	Desa Wabula	Kepala UPTD Dikbud	
45.	Drs. MURTABA MURU	Pasarwajo	Kepala SMA	

1	2	3	4	5
46.	Drs. BASRI SENA	Desa Wasuemba	Kepala Desa Wasuemba	
47.	ALIMUDIN	Desa Wabula	Kepala Desa Wabula	
48.	ZAINAL, SH	Desa Holimombo	Kepala Desa Holimombo	
49.	LA SAMITI	Desa Wabula	Imam	
50.	LA TAISO	Desa Wabula	Parabela/Tokoh Adat	
51.	H. AMIR	Desa Wasampela	Pengusaha	
52.	ALI JAKARI	Desa Wabula	Wiraswasta	
53.	H. MUH. IKA	Desa Wabula	Tokoh Masyarakat	
54.	MUDOR TORUNCU	Desa Wabula	Tokoh Masyarakat	
55.	LA DADE	Pasarwajo	Tokoh Masyarakat	
56.	JAKY WABULA, SH	Desa Wabula	Tokoh Pemuda/ Pedagang	
E	KEC. TALAGA RAYA			
57.	Drs. H. MUCHTASAR NTEWO	Kel Talaga Satu	Tokoh Masyarakat	
58.	Drs. HAMIZU	Bau – Bau	PNS/Tokoh Masyarakat	
59.	LA ODE KAMALUDDIN, S.Pd	Desa Talaga Dua	Camat Talaga Raya	
60.	RUSDIN, A.Ma.Pd	Desa Talaga Dua	Guru SD	
61.	ABDUL KARIM	Kel Talaga Satu	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
62.	ALIMIN, S.Sos	Kel Talaga Satu	Kasi Pembangunan	
63.	AZIDIN	Kel Talaga Satu	Lurah Talaga Satu	
64.	ALWI, S.Pd	Kel Talaga Satu	Guru SMP	
65.	MARDIANA	Kel Talaga Satu	Pedagang	
66.	ALI. AS	Desa Kokoe	Wiraswasta	
67.	LA ZALIO	Desa Talaga Dua	Kepala Desa Talaga Dua	
68.	LA SAREMBE	Desa Kokoe	Kepala Desa Kokoe	

1	2	3	4	5
69.	LA HIJIRA	Kel. Talaga Satu	Ketua Koperasi	
70.	ANDI, S.Sos	Kel Talaga Satu	Ketua PPK Talaga Raya	
71.	H. LA AMBOI	Desa Talaga Dua	Pengusaha	
72.	LA KAKUBA	Kelurahan Talaga Satu	Ketua LPM Talaga Satu	
73.	ZALUDDIN, SE	Desa Talaga Dua	Ketua BPD Talaga Dua	
74.	LA TOBI	Desa Wulu	Karyawan Tambang	
75.	HAMSUN	Desa Wulu	Karyawan Tambang	
F	KEC. BATU ATAS			
76.	Drs. MAHMUD BUNARFA	Bau-Bau	PNS/Mantan Camat Batu Atas	
77.	LA BARIU, S.Pd	Desa Wacuala	Kepala SMP	
78.	Ir. LAODE ALIRMAN	Desa Wacuala	Kepala SMA Swasta	
79.	LA ODE RAUF	Desa Wacuala	Kepala Puskesmas	
80.	LA MIMI	Desa Tolando	Nelayan	
81.	LAODE BANCANA	Desa Wacuala	Pedagang Sembako	
82.	SURIADI	Desa Batuatas Timur	Kepala Desa Batu Atas Timur	
83.	LA ODE SURYA	Desa Wacuala	Kasi Kesra Kec. Batu Atas	
84.	LA MUJI	Desa Wacuala	Imam Desa	
85.	LAODE ARDAM	Desa Wambongi	Ketua BPD Wambongi	
86.	LA BANGURU	Desa Batuatas liwu	Pelayar	
87.	WA HAMIDA	Desa Batuatas Timur	Ketua PKK Batu Atas Timur	
88.	WA SITI KILA	Desa Tolando	Penenun Sarung	
89.	LA SEKO		Tukang Kayu	
90.	LA ACOU	Desa Batuatas Timur	Kepala Dusun Batu Atas Timur	
91.	LAODE SAMUPU	Desa Batuatas Barat	Ketua RT Miko Jaya	
92.	WA ATI SURIATI	Desa Wacuala	Ketua Dharma Wanita Kecamatan	

1	2	3	4	5
G	KEC. MAWASANGKA TIMUR			
93.	Drs. GABUNGA	Bau-Bau	Mantan Camat Mawasangka Timur	
94.	MUH. RIJAL, SE	Desa Lamena	Camat Mawasangka Timur	
95.	LA SARIPI, S.Sos	Desa Lamena	Sekretaris Camat Mawasangka Timur	
96.	LA AGO, SE	Desa Wantopi	Kepala Desa Wantopi	
97.	Drs. MAELUDDIN	Desa Lamena	Kepala Desa Lamena	
98.	Drs. LAODE MOLO	Desa Lamena	Kepala SMP Lamena	
99.	Drs. LAODE KAMALUDDIN	Desa Wambuoli	Kepala SMP Wambuoli	
100.	LA DIA	Desa Inulu	Imam Desa Inulu	
101.	LA ODE SAAFI	Desa Lamena	Kasi Pembangunan Kecamatan	
102.	UDDIN	Desa Lamena	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
103.	LM. NAFIUDDIN	Desa Lamena	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
104.	RAMLI	Desa	Pedangan	
105.	BAYU	Desa Lasori	Nelayan	
106.	NANDA	Desa Wantopi	Nelayan	
107.	ISMAIL GUNARSO	Desa Lalibp	Kepala MTs Lalibo	
108.	LA WALI	Desa Lasori	Petani	
109.	LA UTU	Desa Lamena	PNS Puskesmas	
110.	LA BANTE	Desa Lasori	Nelayan Rumput Laut	
111.	LAODE ZULI	Desa Metere	Ketua RW Desa Metere	
112.	WA MULI	Desa Bungi	Guru SD Bungi	
113.	LA BAKARI	Desa Lamena	Tokoh Agama / Nelayan Agar-agar	
114.	RAHMUDDIN	Desa Bonemarambe	Kepala Desa Benemarambe	
115.	LA SAMUNI	Desa Bungo	Kepala Desa Bungi	

1	2	3	4	5
H	KEC. SANGIA WAMBULU			
116.	LA UMBO, SE	Kel. Tolandona	Camat Sangia Wambulu	
117.	Drs. AHMAD BASRI	Kel. Tolandona	Sekretaris Camat	
118.	ASMAN, A.Md	Desa Baruta	Kasi Pembangunan	
119.	SANIMA, SP	Bau-Bau	Kasi Trantib	
120.	BAHARI, SE	Desa Baruta Lestari	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
121.	CHALID	Kel. Tolandona	PNS / Tokoh Masyarakat	
122.	ZAMINA	Desa Tolandona Matanaeo	Tokoh Perempuan / Anggota BPD	
123.	DALIA	Kel. Tolandona	Pedagang	
124.	SUAEBA	Kel. Tolandona	Pengurus PKK	
125.	WA IYE	Kel. Tolandona	Pensiunan PNS	
126.	LAODE TAUHID	Desa Baruta	Tokoh Agama	
127.	LAODE SALIHU	Kel. Tolandona	Pedagang	
128.	SAHIDA	Desa Baruta Lestari	Pedagang	
129.	RAFIUN	Kel. Tolandona	P3NTR	
130.	ZAINUDDIN	Desa Baruta	Tokoh Pemuda	
131.	ZAMIUN	Desa Baruta Analalaki	Tokoh Adat	
132.	LAODE SAAFI, A.Md	Kel. Tolandona	Lurah Tolandona	
133.	LAODE TASDIN, S.Pd	Desa Tolandona Matanaeo	Guru SMA Tolandona	
134.	KASMAN	Desa Baruta Analalaki	Wiraswasta	
135.	HAZIZU	Desa Baruta Analalaki	Nelayan	
136.	HAZALU	Desa Tolandona Matanaeo	Pensiunan / Ketua BPD	

1	2	3	4	5
I	PEMERINTAH KABUPATEN			
137.	LM. DJAFIR, SH, M.Si	Pasarwajo	Sekretaris Daerah Kab. Buton	
138.	Drs. H. KAHARUDDIN SYUKUR	Pasarwajo	Kepala BPKAD Kab. Buton	
139.	Drs. H. NASRUN FAIZU	Bau-Bau	Ex. Kabag Pemerintahan / Sekretaris DPRD	
140.	Drs. H. ZUHUDIN KASIM, MM	Bau-Bau	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Buton	
141	Drs. H. LAODE ANWAR AMIRI, M.Si	Bau-Bau	Kepala Dinas Dikbud Kab. Buton	
142.	Drs. HAMIZU	Bau-Bau	Kepala Dinas Nakertrans / Tomas Talaga	
143.	Drs. LA ODE MUSTARI, M.Si	Pasarwajo	Asisten Tata Praja Sekda Kab. Buton	
144.	Drs. TAMRIN	Pasarwajo	Kabag Otdes	
145.	Drs. LA SIAMBO	Pasarwajo	Staf Ahli Pemerintahan / Pls. Kabag Tapem	
146.	Drs. HASAN BAKRI	Pasarwajo	Kabag Humas / Ex. Camat Pasarwajo	
147.	Dra. ZANURIA	Bau-Bau	Sekretaris BKD Kab. Buton	
148.	TOHIR, SE	Pasarwajo	Staf BPKAD Kab. Buton	
149.	Drs. H. BUHARI	Bau-Bau	Kabid. pada Diknas Kab. Buton	
150.	Drs. LM. TAKDIR, M.Si	Bau-Bau	Staf Bappeda Kab. Buton	
151.	Ir. AHMAD ZAKIH	Pasarwajo	Staf Statistik	
152.	WA ODE ISKA, SH	Pasarwajo	Staf Bagian Hukum	
153.	Drs. MURSAL ZUBAIR	Lasalimu	Ex. Camat Talaga Raya	
154.	Dr. Hj Aty Sanga, M.Kes.	Bau-Bau	Direktur RSUD Pasarwajo	

1	2	3	4	5
J	ANGGOTA DPRD			
155.	LAODE ABDUL HUKUM, SIP	Bau-Bau	Anggota DPRD asal Mawasangka	
156.	H. ZARIUN, SH	Bau-Bau	Anggota DPRD asal Sangia Wambulu	
157.	ARDIN	Sangia Wambulu	Anggota DPRD asal Sangia Wambulu	
158.	Drs. H. MAJENE SAPUTRA	Bau-Bau	Anggota DPRD asal Batu Atas	
159.	LA ARADIA, SH	Bau-Bau	Anggota DPRD asal Batu Atas	
160.	Drs. H. RASYID MANGURA	Pasarwajo	Anggota DPRD asal Pasarwajo	
161.	LM. YAMIN, BSc	Pasarwajo	Anggota DPRD asal Pasarwajo	
162.	LA SAALI, BA	Bau-Bau	Anggota DPRD asal Siompu	
163.	WAODE ST. KHADIJAH, SmHk	Pasarwajo	Anggota DPRD asal Lasalumu Selatan	
164.	LA AFA, BA	Batauga	Anggota DPRD asal Batauga	

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 5

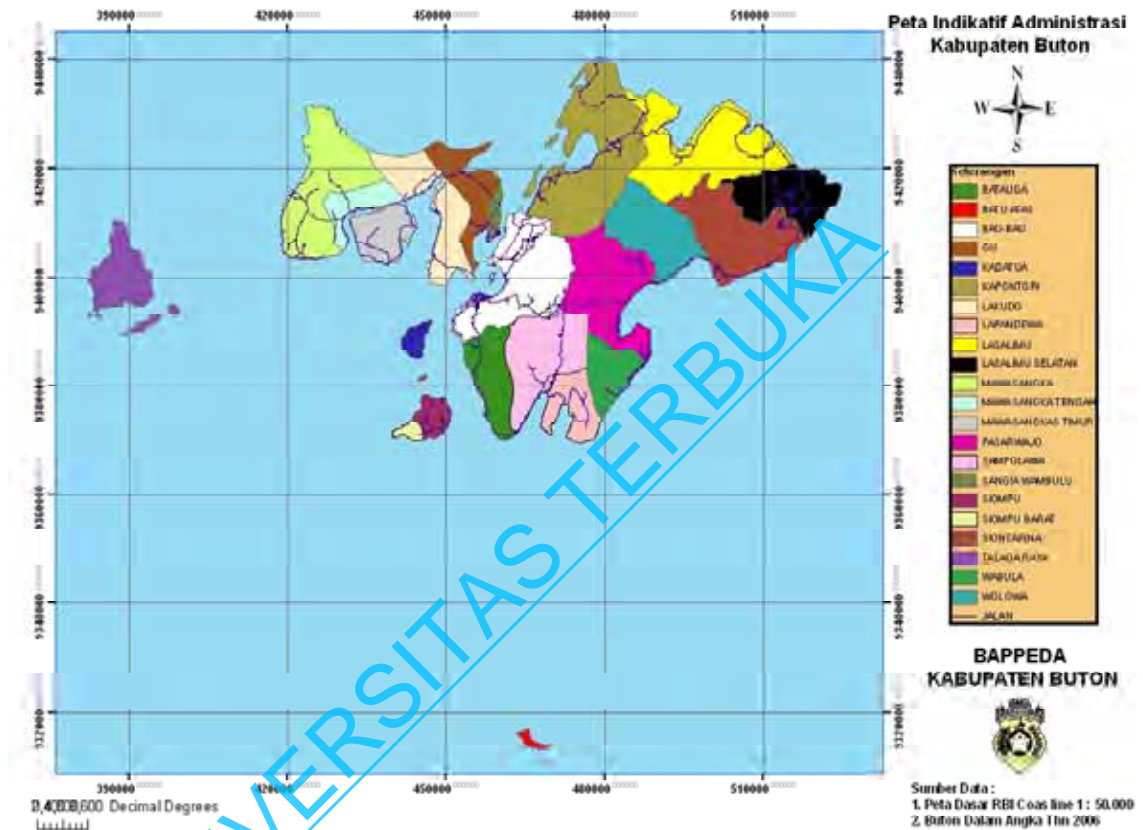
KEADAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON
TAHUN 2000 - 2005

KEADAAN PERKEMBANGAN KECAMATAN DARI TAHUN 2000 S.D. 2005						CATA- TAN
2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1. BETOAMBARI 2. WOLIO. 3. BUNGI 4. SORAWOLIO 5. KAPONTORI 6. LASALIMU 7. PASARWAJO 8. BATAUGA 9. SAMPOLAWA 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. KABAENA 14. KABAENA BARAT 15. RUMBIA 16. POLEANG 17. POLEANG TIMUR 18. WANGI- WANGI 19. KALEDUPA 20. TOMIA 21. BINONGKO	1. BETOAMBARI 2. WOLIO. 3. BUNGI 4. SORAWOLIO 5. KAPONTORI 6. LASALIMU - LASALIMU SELATAN *) 7. PASARWAJO 8. BATAUGA 9. SAMPOLAWA 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. KABAENA 14. KABAENA BARAT 15. RUMBIA - RAROWATU *) 16. POLEANG 17. POLEANG TIMUR 18. WANGI-WANGI 19. KALEDUPA 20. TOMIA 21. BINONGKO	1. KAPONTORI. 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. PASARWAJO 5. BATAUGA - SIOMPU *) - KADATUA *) 6. SAMPOLAWA - BATUATAS *) 7. GU 8. LAKUDO 9. MAWASANGKA - MAWANGKA TIMUR *) 10. KABAENA - TALAGA RAYA *) 11. KABAENA BARAT 12. RUMBIA 13. RAROWATU 14. POLEANG 15. POLEANG TIMUR 16. WANGI-WANGI - WANGI-WANGI SELATAN *) 17. KALEDUPA 18. TOMIA 19. BINONGKO	1. KAPONTORI. 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. PASARWAJO 5. BATAUGA 6. SIOMPU 7. KADATUA 8. SAMPOLAWA 9. BATUATAS 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. MAWASANGKA TIMUR 14. TALAGA RAYA 15. KABAENA 16. KABAENA BARAT 17. RUMBIA 18. RAROWATU 19. POLEANG 20. POLEANG TIMUR 21. WANGI-WANGI 22. WANGI-WANGI SELATAN 23. KALEDUPA 24. TOMIA. 25. BINONGKO	1. KAPONTORI 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN - SIOTAPINA *) 4. PASARWAJO - WOLOWA *) - WABULA *) 5. BATAUGA 6. SIOMPU - SIOMPU BARAT *) 7. KADATUA 8. SAMPOLAWA - LAPAN- DEWA *) 9. BATUATAS 10. GU - SANGIA WAMBULU *) 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA - MAWASANGKA TENGAH *) 13. MAWASANGKA TIMUR 14. TALAGA RAYA	1. KAPONTORI 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. SIOTAPINA 5. PASARWAJO 6. WOLOWA 7. WABULA 8. BATAUGA 9. SIOMPU 10. SIOMPU BARAT 11. KADATUA 12. SAMPOLAWA 13. LAPANDEWA 14. BATUATAS 15. GU 16. SANGIA WAMBULU 17. LAKUDO 18. MAWASANGKA 19. MAWASANGKA TENGAH 20. MAWASANGKA TIMUR 21. TALAGA RAYA	KEADAAN KECAMATAN DI TAHUN 2005 SEBANYAK 21 BUAH HINGGA SEKARANG INI TETAP PADA JUMLAH YANG SAMA. *) = KECA- MATAN PEME- KARAN
4 KECAMATAN (NO. 1,2,3,4) ADALAH WILAYAH KOTIF BAU-BAU	NO 1,2,3,4 KELUAR SETELAH KOTIF BAU-BAU BERUBAH LADI KOTA BAU-BAU BERDASARKAN UU NO. 13 THN 2001 TGL 21 JUNI 2001	TANDA *) = PEMEKARAN 6 KECAMATAN SEBAGAI PERSIAPAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA DAN WAKATOBI	NO. 15 - 20 MASUK .KAB BOMBANA NO. 21-25 MASUK KAB. WAKATOBI (UU NO. 29 THN 2003 TGL 18 DESEMBER 2003)	PADA TAHUN 2005 MASYARAKAT DI WIL. BUTON TENGAH (NO. 15 SD. 21) DAN THN 2007 MASY. WIL. BUTON SELATAN (NO. 8 SD.14) USULKAN PEMEKARAN		

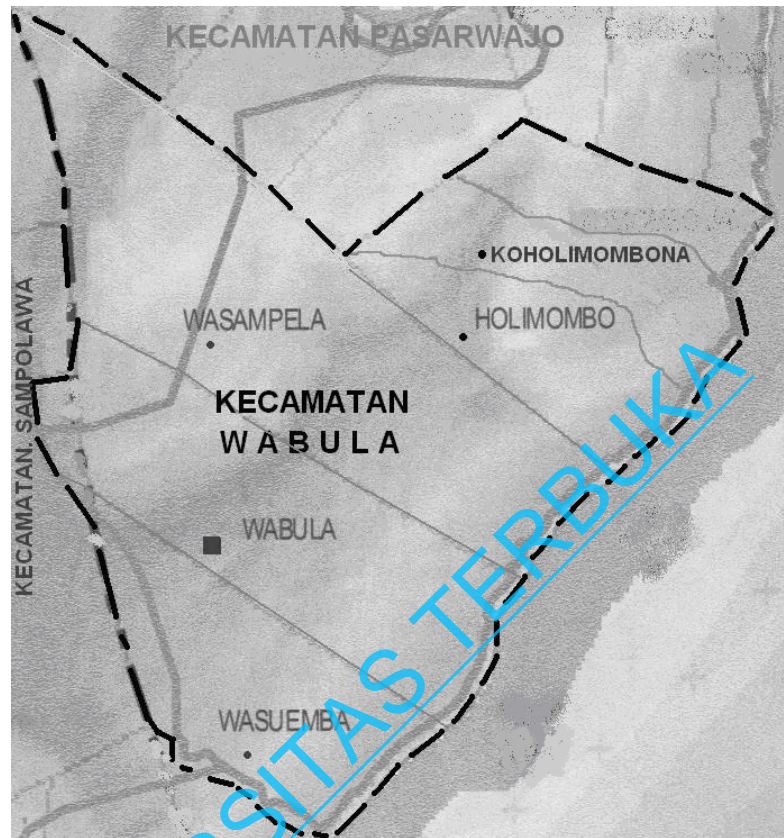
Sumber : Diolah dari Data Pemekaran pada Bag. Hukum
Setda Kabupaten Buton

LAMPIRAN 10

PETA KABUPATEN BUTON



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Wabula



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Talaga Raya



Gambar 2.3 Peta Kecamatan Siompu



Gambar 2.4 Peta Kecamatan Wolowa



Gambar 2.5 Peta Kecamatan Sangia Mambulu



Gambar 2.6 Peta Kecamatan Mawasangka Timur



Gambar 2.7 Peta Kecamatan Lasalimu Selatan



Gambar 2.8 Peta Kecamatan Batu Atas



LAMPIRAN 2

**KUNJUNGAN WARGA KE PUSKEMAS
SERTA KASUS PENYAKIT MENULAR
PADA TAHUN 2005 SD. 2007**

NO	NAMA PUSKEMAS	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN
1	Puskesmas Lasalimu Selatan	2.420	33	2.512	29	2.546	18
2	Puskesmas Wolowa	1.021	28	1.328	22	1.572	16
3	Puskesmas Wabula	1.121	26	1.344	25	1.683	11
4	Puskesmas Sangia Wambulu	2.005	22	1.997	18	2.243	8
5	Puskesmas Mawasangka Timur	1.142	11	1.198	12	1.204	9
6	Puskesmas Siompu	2.361	16	2.568	13	2.579	12
7	Puskesmas Talaga	1.843	14	2.012	12	2.447	11
8	Puskesmas Batuatas	1.324	19	1.542	14	2.076	7
	J u m l a h	13.237	169	14.501	145	16.350	92

DATA DIOLAH DARI HASIL WAWANCARA DAN DOKUMENTASI DI LAPANGAN

KETERANGAN : KNJNG = JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKESMAS
P. MEN = KASUS PENYAKIT MENULAR

ANALISA DATA:

Jumlah kunjungan ke Puskesmas tahun 2006 dibanding tahun 2005 naik dari 13.237 menjadi 14.501 atau naik 1,09% dan tahun 2007 naik 1,13%, sedangkan kasus penyakit menular yang terdeteksi di Puskesmas pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 menurun dari 169 kasus menjadi 145 atau turun 1,17% dan tahun 2007 menurun lagi 1,58%.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. kutipan langsung kurang dari 40 kata disertai dengan tanda kutipan ganda (“ ... “)
8. kutipan tidak langsung tdk pakai tanda petik ganda l
9. Kutipan lebih dari 40 kata ditulis blok tersendiri tanpa kutipan ganda

Cth 1, Wnarno (2009 :2) mengatakan : “(kurang 40 kat) “
untuk kutipan langsung

Cth 2. winarno (2009 :2) berpendapat bahwa

Jarak/spasi

Untuk kutipan langsung, judul table dan judul lampiran 1 spasi

Linea baru ditulis menjrok kedalam 5 ketuk.

Tabel 1.1 Perkiraan Kebutuhan Tenaga kesehatan
..... pada RSUD Kendari ...

TRASNKRIP HASIL WAWANCARA

Informan :

Tgl Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanan	

LAMPIRAN 2.

KUNJUNGAN WARGA KE PUSKEMAS SERTA KASUS PENYAKIT MENULAR PADA TAHUN 2005 SD. 2007

NO	NAMA PUSKESMAS	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007	
		KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN	KNJNG	P. MEN
1	Puskesmas Lasalimu Selatan	2.420	33	2.512	29	2.546	18
2	Puskesmas Wolowa	1.021	28	1.328	22	1.572	16
3	Puskesmas Wabula	1.121	26	1.344	25	1.683	11
4	Puskesmas Sangia Wambulu	2.005	22	1.997	18	2.243	8
5	Puskesmas Mawasangka Timur	1.142	11	1.198	12	1.204	9
6	Puskesmas Siompu	2.361	16	2.568	13	2.579	12
7	Puskesmas Talaga	1.843	14	2.012	12	2.447	11
8	Puskesmas Batuatas	1.324	19	1.542	14	2.076	7
	J u m l a h	13.237	169	14.501	145	16.350	92

DATA DIOLAH DARI HASIL WAWANCARA DAN DOKUMENTASI DILAPANGAN
KETERANGAN : KNJNG = JUMLAH KUNJUNGAN DI PUSKESMAS

P. MEN = KASUS PENYAKIT MENULAR

ANALISA DATA :

Jumlah kunjungan rata-rata ke Puskesmas tahun 2006 dibanding tahun 2005 naik 1,09 % dan tahun 2007 naik 1,13 %, sedangkan kasus penyakit menular yang terdeteksi di Puskesmas pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 menurun 1,17 % dan tahun 2007 menurun lagi 1,58 %.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 4

**PERBANDINGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA
TARGET DAN REALISASI PBB PADA KECAMATAN PEMEKARAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN**

NO	KECAMATAN	PENDAPATAN RATA-RATA		RATA-RATA TARGET DAN REALISASI PBB THN. 2008		PROSENTASE KENAIKAN PENDAPATAN	PROSENTASE REALISASI TERHADAP TARGET PBB	KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	TARGET PER OP. (Rp)	REALISASI PER OP. (Rp)			
1	LASALIMU SELATAN	225.000 *)	1.250.000	8.938,54	9.113,43	79,37 %	101,96 %	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 ****) TH 2005 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008 PASARWAJO DAN GU ADALAH KECAMATAN INDUK OP = Obyek PBB
2	TALAGA RAYA	400.000 **)	1.500.000	6.852,58	7.031,36	62,50 %	102,61 %	
3	SIOMPU	400.000 **)	1.100.000	4.376,40	4.168,01	45,83 %	95,24 %	
4	BATUATAS	350.000 **)	700.000	2.480,51	2.480,51	33,33 %	100,00 %	
5	MAWASANGKA TIMUR	400.000 **)	1.200.000	3.701,48	3.711,55	50,00 %	100,27 %	
6	WABULA	550.000 ***)	750.000	4.623,98	3.803,17	34,09 %	82,25 %	
7	WOLOWA	600.000 ***)	750.000	6.080,56	5.707,73	31,25 %	93,87 %	
8	SANGIA WAMBULU	600.000 ***)	1.200.000	6.674,75	6.914,36	50,00 %	103,59 %	

DATA : Diolah dari data Dispenda dan BPS Kab. Buton tahun 2001 S/D tahun 2008 serta hasil wawancara di lapangan

- Data *pendapatan* merupakan hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat/informan yang mewakili petani, nelayan, pedagang, PNS dan wiraswasta lainnya di tiap kecamatan pemekaran. Penentuan besaran pendapatan rata-rata didapatkan dari hasil bagi rata-rata atas pengakuan/pernyataan informan yang mewakili tiap bidang pekerjaan dengan pembulatan Rp 25.000,-
- Data rata-rata target terhadap OP adalah hasil bagi antara target pajak dengan OP, sedangkan data rata-rata realisasi terhadap OP adalah hasil bagi antara realisasi pajak dengan OP. Data prosentase realisasi terhadap target adalah hasil bagi Realisasi OP dengan Target OP.
- Prosentase peningkatan rata-rata pendapatan per tahun Kec. Lasalimu Selatan, Talaga Raya, Mawasangka Timur dan Kec. Sangia Wambulu sebesar 50% ke atas sedangkan Kec. Siompu, Batuatas, Wabula dan Kec. Wolowa di bawah 50%
- Prosentase realisasi pajak terhadap target pajak Kec. Lasalimu Selatan, Talaga Raya, Mawasangka Timur dan Kec. Sangia Wambulu di atas 100% sedangkan Kec. Siompu, Batuatas, Wabula dan Kec. Wolowa sebesar 100% ke bawah
- Data di atas menunjukkan kesesuaian antara kenaikan rata-rata pendapatan dengan kenaikan rata-rata realisasi PBB terhadap target PBB.

**DATA PERBANDINGAN PENDAPATAN MASYARAKAT SERTA
REALIASI PBB PADA KECAMATAN PEMEKARAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN**

NO	KECAMATAN	PENDAPATAN RATA-RATA		PAJAK BUMI & BANGUNAN		PROSENTASE KENAIKAN		KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	PENDAPATAN	PBB	
1	LASALIMU SELATAN	225.000 *)	1.250.000	20,900,664 *)	39.620.816	79.37 %	27.08 %	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 ****) TH 2005 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008 PASARWAJO DAN GU ADALAH KECAMATAN INDUK
2	TALAGA RAYA	400.000 **)	1.500.000	6.693.020 ***)	9.429.050	62.50 %	23.48 %	
3	SIOMPU	400.000 **)	1.100.000	5.005.631 ****)	7.073.105	45,83 %	18.59 %	
4	BATUATAS	350.000 **)	700.000	2.583.025 ****)	3.083.273	33,33 %	16.78 %	
5	MAWASANGKA TIMUR	400.000 **)	1.200.000	3.057.954 ***)	5.916.215	50,00 %	18.88 %	
6	WABULA	550.000 ***)	750.000	GABUNG PASARWAJO	2.879.003	34.09 %	-	
7	WOLOWA	600.000 ***)	750.000	GABUNG PASARWAJO	8.247.675	31.25 %	-	
8	SANGIA WAMBULU	600.000 ***)	1.200.000	GABUNG GU	7.446.771	50.00 %	-	

DATA : Diolah dari data Dispenda dan BPS Tahun 2001 S/D 2008 serta hasil wawancara di lapangan

- Data *pendapatan* merupakan hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat/informan yang mewakili petani, nelayan, pedagang, PNS dan wiraswasta lainnya di tiap kecamatan pemekaran. Penentuan besaran pendapatan rata-rata didapatkan dari hasil bagi rata-rata atas pengakuan/pernyataan informan yang mewakili tiap bidang pekerjaan dengan pembulatan Rp 25.000,-
- Data *PBB* merupakan data yang diolah dari data Dispenda dan Data BPS Tahun 2001 sampai Tahun 2008 serta hasil wawancara.
- Pada Tabel tergambar bahwa prosentase kenaikan tertinggi baik pendapatan maupun PBB adalah Kecamatan Lasalimu Selatan dan terendah adalah Kecamatan Batuatas namun realisasi tiap tahun 100 %

8.779.068	18.59
-----------	-------

NO	KECAMATAN	PENDAPATAN RATA-RATA		PROSENTASE KENAIKAN PENDAPATAN	KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	225.000 *)	1.250.000	79.37 %	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008
2	TALAGA RAYA	400.000 **)	1.500.000	62.50 %	
3	SIOMPU	400.000 **)	1.100.000	45.83 %	
4	BATUATAS	350.000 **)	700.000	33.33 %	
5	MAWASANGKA TIMUR	400.000 **)	1.600.000	41.67 %	
6	WABULA	550.000 ***)	750.000	34.09 %	
7	WOLOWA	600.000 ***)	750.000	31.25 %	
8	SANGIA WAMBULU	600.000 ***)	1.200.000	50.00 %	

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2008 dan hasil wawancara di lapangan

NO	KECAMATAN	PAJAK BUMI & BANGUNAN		PROSENTASE KENAIKAN PBB	KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	20,900,664 *)	39.620.816	27.08 %	
2	TALAGA RAYA	8.900.754 **)	9.429.050	17.66 %	*) THN 2001
3	SIOMPU	6.465.922 **)	7.073.105	18.23 %	**) THN 2002
4	BATUATAS	3.062.403 **)	3.085.273	16.78 %	***) THN 2004
5	MAWASANGKA TIMUR	5.222.220 **)	5.916.215	18.88 %	SESUDAH
6	WABULA	GABUNG PASARWAJO	2.879.003	-	PEMEKARAN
7	WOLOWA	GABUNG PASARWAJO	8.247.675	-	ADALAH
8	SANGIA WAMBULU	GABUNG GU	7.446.771	-	DATA

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2008 dan hasil wawancara di lapangan

NO	KECAMATAN		PAJAK BUMI & BANGUNAN		KENAIKAN PBB (%)	KET.
			SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	TGET		20,900,664 *)	39.620.816	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008 PASARWAJO DAN GU ADALAH KECAMATAN INDUK
		REAL				
2	TALAGA RAYA	TGET		6.693.020**)	9.429.050	
		REAL				
3	SIOMPU	TGET		6.465.922 **)	7.073.105	
		REAL				
4	BATUATAS	TGET		3.062.403 **)	3.083.273	
		REAL				
5	MAWASANGKA TIMUR	TGET		5.222.220 **)	5.916.215	
		REAL				
6	WABULA	TGET		GABUNG PASARWAJO	2.879.003	
		REAL				
7	WOLOWA	TGET		GABUNG PASARWAJO	8.247.675	
		REAL				
8	SANGIA WAMBULU	TGET		GABUNG GU	7.446.771	
		REAL				

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2008 dan hasil wawancara di lapangan

NO	KECAMATAN	TAHUN 2008	TAHUN 2007	TAHUN 2006	TAHUN 2005	TAHUN 2004
----	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

			O.P.	PAJAK (Rp)	O.P.	PAJAK (Rp)	O.P.	PAJAK (Rp)	O.P.	PAJAK (Rp)	O.P.	PAJAK (Rp)
1	LALSLIMU SELATAN	Target	8,566	76,832,469	4.831	28.206.752	4.831	28.206.752	10.038	64.557.438	8,108	30.118.082
		Realisasi	4,338	39,620,816	3.932	23.711.351	3.932	23.711.351	9.164	54.797.874	8,108	30.118.082
2	WABULA	Target	1,215	5,618,139	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realisasi	757	2,879,003	-	-	-	-	-	-	-	-
3	WOLOWA	Target	2,165	13,164,421	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realisasi	1,445	8,247,675	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BATUATAS	Target	1,243	3,083,273	1.243	2.711.526	1.243	2.711.526	1.193	2.583.025	1,193	746.484
		Realisasi	1,243	3,083,273	1.243	2.711.526	1.243	2.711.526	1.193	2.583.025	1,193	746.484
5	SIOMPU	Target	2,006	8,779,068	1.483	12.216.362	1.483	12.216.362	1.496	12.734.539	1,372	7.870.332
		Realisasi	1,243	3,083,273	1.483	12.216.362	1.483	12.216.362	1.496	12.734.539	1,372	7.870.332
6	SANGIA WAMBULU	Target	1,694	11,307,023	-	-	-	-	-	-	-	-
		Realisasi	1,077	7,446,771	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MAWASANGKA TIMUR	Target	1,595	5,918,215	965	5.290.437	965	5.290.437	965	5.222.025	790	3.057.954
		Realisasi	1,594	5,916,215	965	5.290.437	965	5.290.437	963	5.222.020	790	3.057.954
8	TALAGA RAYA	Target	1,750	11,992,020	1.774	8.832.011	1.774	8.832.011	1.774	8.900.754	1,774	6.693.020
		Realisasi	1,341	9,429,050	1.774	8.832.011	1.774	8.832.011	1.774	8.900.754	1,774	6.693.020

LAMPIRAN

Tabel 4.36

**PENDAPATAN RATA-RATA MASYARAKAT
PADA KECAMATAN PEMEKARAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN**

NO	KECAMATAN	PENDAPATAN RATA-RATA PERBULAN		KENAIKAN PENDAPATAN (%)	KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	225.000 *)	1.250.000	79,37	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008
2	TALAGA RAYA	400.000 **)	1.500.000	62,50	
3	SIOMPU	400.000 **)	1.100.000	45,83	
4	BATUATAS	350.000 **)	700.000	33,33	
5	MAWASANGKA TIMUR	400.000 **)	1.200.000	50,00	
6	WABULA	550.000 ***)	750.000	34,09	
7	WOLOWA	600.000 ***)	750.000	31,25	
8	SANGIA WAMBULU	600.000 ***)	1.200.000	50,00	

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2001 s/d Tahun 2008 dan wawancara di lapangan

Data pada Tabel di atas merupakan hasil analisis data yang didapatkan dari wawancara dengan beberapa masyarakat/informan yang mewakili petani, nelayan, pedagang, PNS dan wiraswasta lainnya ditiap kecamatan pemekaran. Penentuan besaran pendapatan rata-rata didapatkan dari hasil bagi rata-rata atas pengakuan/pernyataan informan yang mewakili tiap bidang pekerjaan.

LAMPIRAN

**DATA REALIASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PADA KECAMATAN PEMEKARAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN**

NO	KECAMATAN	PAJAK BUMI & BANGUNAN		KENAIKAN PBB (%)	KET.
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	20,900,664 *)	39.620.816	27.08	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008 PASARWAJO DAN GU ADALAH KECAMATAN INDUK
2	TALAGA RAYA	6.693.020**)	9.429.050	23.48	
3	SIOMPU	6.465.922 **)	8.779.068	18.59	
4	BATUATAS	3.062.403 **)	3.083.273	16.78	
5	MAWASANGKA TIMUR	5.222.220 **)	5.916.215	18.88	
6	WABULA	GABUNG PASARWAJO	2.879.003	-	
7	WOLOWA	GABUNG PASARWAJO	8.247.675	-	
8	SANGIA WAMBULU	GABUNG GU	7.446.771	-	

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2008 dan hasil wawancara di lapangan

4,525.57

6,022.70

8,201.40

4,082.90

3,663.85

6,630.79

6,580.91

2,472.11

LAMPIRAN

**DATA REALIASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PADA KECAMATAN PEMEKARAN
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN**

NO	KECAMATAN				SEBELUM	SESUDAH	KET.	
					(Rp)	(Rp)		
1	LASALIMU SELATAN	TGET			20,900,664 *)	39.620.816	39.620.816	*) THN 2001 **) THN 2002 ***) THN 2004 DATA SESUDAH PEMEKARAN ADALAH DATA THN 2008 PASARWAJO DAN GU ADALAH KECAMATA N INDUK
		REAL						
2	TALAGA RAYA	TGET			6.693.020**)	9.429.050	9.429.050	
		REAL						
3	SIOMPU	TGET			6.465.922**)	7.073.105	7.073.105	
		REAL						
4	BATUATAS	TGET			3.062.403**)	3.083.273	3.083.273	
		REAL						
5	MAWASANGKA TIMUR	TGET			5.222.220**)	5.916.215	5.916.215	
		REAL						
6	WABULA	TGET			GABUNG PASARWAJO	2.879.003	2.879.003	
		REAL						
7	WOLOWA	TGET			GABUNG PASARWAJO	8.247.675	8.247.675	
		REAL						
8	SANGIA WAMBULU	TGET			GABUNG GU	7.446.771	7.446.771	
		REAL						

DATA : Diolah dari data BPS Tahun 2008 dan hasil wawancara di lapangan

4,525.57	WB	4,427.17	-	4,623.98
6,022.70	WL	5,964.84		6,080.56
8,201.40	LS	7,464.26		8,938.54
4,082.90	SO	3,789.39		4,376.40
3,663.85	MT	3,617.22		3,710.48
6,630.79	TR	6,409.00		6,852.58
6,580.91	SW	6,487.07		6,674.75
2,472.11	BA	2,463.72		2,480.51

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN 9

**KEADAAN KECAMATAN DI KABUPATEN BUTON
TAHUN 2000 - 2005**

KEADAAN PERKEMBANGAN KECAMATAN DARI TAHUN 2000 S.D. 2005						CATATAN
2000	2001	2002	2003	2004	2005	
1. BETOAMBARI 2. WOLIO. 3. BUNGI 4. SORAWOLIO 5. KAPONTORI 6. LASALIMU 7. PASARWAJO 8. BATAUGA 9. SAMPOLAWA 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. KABAENA 14. KABAENA BARAT 15. RUMBIA 16. POLEANG 17. POLEANG TIMUR 18. WANGI- WANGI 19. KALEDUPA 20. TOMIA 21. BINONGKO	1. BETOAMBARI 2. WOLIO. 3. BUNGI 4. SORAWOLIO 5. KAPONTORI 6. LASALIMU - LASALIMU SELATAN *) 7. PASARWAJO 8. BATAUGA 9. SAMPOLAWA 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. KABAENA 14. KABAENA BARAT 15. RUMBIA - RAROWATU *) 16. POLEANG 17. POLEANG TIMUR 18. WANGI-WANGI 19. KALEDUPA 20. TOMIA 21. BINONGKO	1 KAPONTORI. 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. PASARWAJO 5. BATAUGA - SIOMPU *) - KADATUA *) 6. SAMPOLAWA - BATUATAS *) 7 GU 8. LAKUDO 9. MAWASANGKA - MAWSANGKA TIMUR *) 10. KABAENA - TALAGA RAYA *) 11. KABAENA BARAT 12. RUMBIA 13. RAROWATU 14. POLEANG 15. POLEANG TIMUR 16. WANGI-WANGI - WANGI-WANGI SELATAN *) 17. KALEDUPA 18. TOMIA 19. BINONGKO	1. KAPONTORI. 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. PASARWAJO 5. BATAUGA 6. SIOMPU 7. KADATUA 8. SAMPOLAWA 9. BATUATAS 10. GU 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA 13. MAWASANGKA TIMUR 14. TALAGA RAYA 15. KABAENA 16. KABAENA BARAT 17. RUMBIA 18. RAROWATU 19. POLEANG 20. POLEANG TIMUR 21. WANGI-WANGI 22. WANGI-WANGI SELATAN 23. KALEDUPA 24. TOMIA. 25. BINONGKO	1. KAPONTORI 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN - SIOTAPINA *) 4. PASARWAJO - WOLOWA *) - WABULA *) 5. BATAUGA 6. SIOMPU - SIOMPU BARAT *) 7. KADATUA 8. SAMPOLAWA - LAPANDEWA *) 9. BATUATAS 10. GU - SANGIA WAMBULU *) 11. LAKUDO 12. MAWASANGKA - MAWASANGKA TENGAH *) 13. MAWASANGKA TIMUR 14. TALAGA RAYA	1. KAPONTORI 2. LASALIMU 3. LASALIMU SELATAN 4. SIOTAPINA 5. PASARWAJO 6. WOLOWA 7. WABULA 8. BATAUGA 9. SIOMPU 10. SIOMPU BARAT 11. KADATUA 12. SAMPOLAWA 13. LAPANDEWA 14. BATUATAS 15. GU 16. SANGIA WAMBULU 17. LAKUDO 18. MAWASANGKA 19. MAWASANGKA TENGAH 20. MAWASANGKA TIMUR 21. TALAGA RAYA	KEADAAN KECAMATAN DI TAHUN 2005 SEBANYAK 21 BUAH HINGGA SEKARANG INI TETAP PADA JUMLAH YANG SAMA. *) = KECAMATAN PEMEKARAN
4 KECAMATAN (NO. 1,2,3,4) ADALAH WILAYAH KOTIF BAU-BAU	NO 1,2,3,4 KELUAR STELAH KOTIF BAU-BAU BERUBAH JADI KOTA BAU-BAU BERDASARKAN UU NO. 13 THN 2001 TGL 21 JUNI 2001	TANDA *) = PEMEKARAN 6 KECAMATAN SEBAGAI PERSIAPAN PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA DAN WAKATOBI	NO. 15 – 20 MASUK .KAB BOMBANA NO. 21-25 MASUK KAB. WAKATO (UU NO. 29 THN 2003 TGL 18 DESEMBER 2003	PADA TAHUN 2005 MASYARAKAT DI WIL. BUTON TENGAH (NO. 15 SD. 21) DAN THN 2007MASY. WIL. BUTON SELATAN (NO. 8 SD.14) USULKAN PEMEKARAN/PEMBENTUKAN KABUPATEN BARU		

Sumber : Diolah dari Data Pemekaran pada Bag. Hukum Setda Kabupaten Buton

LAMPIRAN 7

**DATA PERKEMBANGAN FASILITAS DAN TENAGA KESEHATAN
KECAMATAN PEMEKARAN DI KABUPATEN BUTON
TAHUN 2003 DAN TAHUN 2007**

NO	I T E M	LASALIMU SELATAN		TALAGA RAYA		SIOMPU		BATUATAS		WOLOWA		WABULA		MAWASANGKA TIMUR		SANGIA WAMBULU	
		2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007	2003	2007
A	TENAGA KESEHATAN																
	Dokter Umum	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skn	-	1	2	1	-	-	-	7	-	1	-	1	1	1	-	-
	Para Medis	14	16	6	8	11	-	8	-	-	10	1	6	4	10	2	11
	Pemb. Para Medis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Tng Non Kes. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Bidan	-	4	-	3	-	2	-	1	1	3	1	3	-	5	1	1
	Perawat	-	11	-	5	-	7	-	6	-	7	1	3	-	5	2	8
	Tng Kes. Lainnya	-	2	-	3	-	2	-	2	1	2	-	1	-	1	1	1
	J U M L A H	21	35	9	20	11	11	8	16	2	23	3	14	6	22	7	24
B	SARANA KESEHATAN																
	Puskesmas Non Perawatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1
	Puskesmas Perawatan Umum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Puskesmas Perawatan Persalinan	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Pustu	4	9	2	2	3	3	1	1	1	1	1	2	3	3	-	1
	Posyandu	46	24	9	10	11	12	9	13	-	9	-	10	10	10	3	11
	Puskesmas Keliling. Roda 4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Speed Boat Puskesmas	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1
	J U M L A H	54	36	11	14	14	17	11	16	1	11	2	14	14	17	4	15

DATA : Diolah dari data BPS dan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2008

LAMPIRAN

**DATA PERKEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN DAN TENAGA PENDIDIK
KECAMATAN PEMEKARAN DI KABUPATEN BUTON
TAHUN 2003 DAN TAHUN 2007**

NO	KECAMATAN	TK				SD				SMP				SMA																			
		TAHUN 2003				TAHUN 2007				TAHUN 2003				TAHUN 2007				TAHUN 2003				TAHUN 2007											
		S	G	M	M/G	S	G	M	M/G	S	G	M	M/G	S	G	M	M/G	S	G	M	M/G	S	G	M	M/G	S	G	M	M/G				
1	LASALIMU SELATAN	3	6	107	18	6	17	108	6	26	158	4691	30	17	123	2245	18	1	13	175	13	3	51	870	17	1	14	117	8	2	36	361	10
2	TALAGA RAYA	1	1	65	65	3	10	310	31	9	48	1811	42	9	37	2063	56	1	17	309	28	1	19	610	32	0	0	0	0	1	14	246	26
3	SIOMPU	1	4	62	16	7	18	310	17	10	77	2704	35	8	58	1670	29	1	10	101	10	1	28	481	17	1	12	177	15	1	13	134	10
4	BATUATAS	0	0	0	0	0	0	0	0	5	27	1785	66	5	44	1994	45	1	16	427	26	1	24	475	20	1	13	41	3	1	13	62	5
5	WOLOWA	0	0	0	0	5	14	115	8	5	16	864	54	7	42	1139	27	1	15	279	19	1	15	284	19	0	0	0	0	1	10	203	20
6	WABULA	1	2	36	18	3	7	155	22	4	28	487	17	7	58	891	17	1	19	149	8	1	34	221	7	1	7	42	6	1	18	200	11
7	MAWASANGKA TIMUR	1	1	39	39	7	18	130	7	8	33	1122	34	9	15	233	16	1	13	183	14	2	15	233	16	0	0	0	0	1	8	50	6
8	SANGIA WAMBULU	4	5	99	20	7	13	147	11	6	36	952	26	7	48	1004	21	1	18	359	20	2	30	317	11	0	0	0	0	1	7	160	23

SUMBER DATA : Diolah dari data BPS dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2008

C A T A T A N : S = Jumlah Sekolah G = Jumlah Guru M = Jumlah Murid M/G = rata-rata jumlah murid untuk satu orang guru.

A N A L I S I S : - Jumlah sekolah setiap jenjang pendidikan untuk setiap kecamatan menunjukkan peningkatan
- Rasio perbandingan guru per murid pada tahun 2003 terbesar yakni : Talaga Raya (TK= 1:65, SD=1:42, SMP=1:28); Batuatas (SD=1:66, SMP=1:26); Wolowa (SD=1:54)
Jumlah guru SMA minimal sejumlah mata pelajaran yakni 18 orang. Berdasarkan hal ini, hanya Kecamatan Wabula dan Lasalimu Selatan yang layak.

RIWAYAT HIDUP



H. La Ode Abdul Hambali, lahir di Bau-Bau pada tanggal 31 Oktober 1963. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Nganganaumala (tamat tahun 1976), SMP Negeri 1 Bau-Bau (tamat 1980), SMA Negeri 1 Bau-Bau (tamat tahun 1983), kemudian melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (tamat tahun 1990). Pada Tahun 2007 mengikuti pendidikan Pasacasarjana (S2) pada Universitas Terbuka Program Studi Administrasi Publik.

Karir PNS diawali sebagai Pembantu Pimpinan pada Kantor Dikbud Kec. Mawasangka Kab. Buton (tahun 1994), Penilik Kebudayaan Kec. Batauga (tahun 1999), Kasubag Tata Hukum Setda Kab. Buton (tahun 2001), Camat Batauga (tahun 2003) dan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buton (tahun 2004-sekarang)

Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti antara lain Diklat ADUM (Kendari, tahun 2000), SPAMA/Diklatpim III (Kendari, tahun 2003), Workshop Legal Drafting (Jakarta, tahun 2004), Diklat AMDAL (Makassar, tahun 2005), Diklat pengadaan Barang dan Jasa (Jakarta, tahun 2006), Diklat PPNS (Jakarta, tahun 2006), Diklat Penataan Batas Wilayah (Jakarta, tahun 2006) dan Diklat Sengketa TUN (Jogyakarta, tahun 2007).

Organisasi yang diikuti diantaranya Wkl Sekretaris DPC PPP Buton (Bau-Bau, tahun 1991-1995), Sekretaris Pimpinan Wilayah PUI Sultra (Kendari, 1993-1996), Wkl Ketua DPW PPP Sultra (Kendari, 1995-1997), Plt Ketua DPW PPP Sultra (Kendari, 1997-1999), Sekretaris DPC ANSOR Kab. Buton (Bau-Bau, 1996-2001), Wkl Sekretaris PC. NU Kab. Buton (Pasarwajo, 2003- 2008), Wkl Ketua Karang Taruna Kab. Buton (Pasarwajo, 2005-2009), Sekretaris PC. NU Kab. Buton (Pasarwajo, 2008-sekarang).

Menikah dengan Hj. Iriani Kadir, S.Sos pada tanggal 26 Juli 1996 dan memiliki dua anak, yaitu Wa Ode Rahmi Hairinnisa dan La Ode Muhammad Ibnu Hair.

Faktor pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemekaran serta sikap dan kemauan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan, sedangkan faktor penghambatnya yakni masih adanya kebijaksanaan yang kurang berpihak pada "pemerataan" seperti adanya mutasi pegawai dari kecamatan pemekaran serta adanya kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang kurang berpihak pada perubahan meskipun pada saat penelitian hal-hal tersebut relatif kecil.

The supporting factors of the community welfare increasing are active participation of the community in ancillary a territorial separation as well as behaviour and governmental will in executing the development intervention, whereas the inhibiting factors that is there are still being a policy which less take a part in the commonness, such as finding the civil servant mutation from district in territorial separation and some customary or cultural values which less take a part in the agent of change despite in the time of observation those cases is scrutiny.

UNIVERSITAS TERBUKA